



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

**RENCANA INDUK DAN PETA JALAN
PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah dan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Riset dan Inovasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
9. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
11. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pendanaan Riset dan Inovasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 851);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Riset dan Inovasi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 4);
16. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah.

8. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
10. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
11. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah, yang selanjutnya disingkat RIPJPID, adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau riset dan inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan/atau pemangku kepentingan terkait dalam rangka memberikan dukungan terhadap pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Riset dan Inovasi di Provinsi.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. menjadi arah kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pembangunan daerah;
 - c. mendorong Riset dan Inovasi;
 - d. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. menentukan prioritas program ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertahap;
 - f. memperkuat tata kelola dan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - g. menyokong transformasi digital dan industri.
- (3) Sasaran RIPJPID Provinsi meliputi penyelenggaraan Riset dan Inovasi, ekosistem dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan Riset dan Inovasi sesuai dengan permasalahan, kebutuhan, dan potensi daerah.

BAB II
SISTEMATIKA RIPJPID

Pasal 3

- (1) Dokumen RIPJPID Provinsi Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi daerah;
 - b. Bab II : gambaran/Kondisi Riset dan Inovasi di daerah;
 - c. Bab III : permasalahan utama pembangunan daerah dan potensi pemecahannya;
 - d. Bab IV : tema prioritas Riset dan Inovasi di daerah;
 - e. Bab V : tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di daerah; dan
 - f. Bab VI : analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
 - g. Bab VII : strategi Riset dan Inovasi di daerah;
 - h. Bab VIII : peta jalan Riset dan Inovasi di daerah;
- (2) Dokumen RIPJPID Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Gubernur melaksanakan RIPJPID Provinsi Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan RIPJPID Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Badan untuk diterapkan oleh Perangkat Daerah dan/atau pemangku kepentingan terkait.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan RIPJPID Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Aksi Riset dan Inovasi sebagai penjabaran dari RIPJPID Provinsi Tahun 2025-2029.

- (2) Penyusunan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Badan untuk dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau pemangku kepentingan terkait.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Rencana Aksi Tahunan.
- (4) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*); dan
 - b. program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi.
- (5) Penyusunan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RIPJPID Provinsi Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Gubernur melalui Badan serta dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau pemangku kepentingan terkait.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka sinergi pelaksanaan antara RIPJPID Provinsi dengan RIPJPID Kabupaten/Kota.
- (4) Pelaksanaan kajian Riset dan Inovasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi wajib dikoordinasikan dengan Badan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya pelaksanaan RIPJPID Provinsi Tahun 2025-2029 dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi terkait riset dan inovasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 agustus 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 11 agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025-2029.

BAB I
**GAMBARAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM/
POTENSI EKONOMI DAERAH**

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah yang berkelanjutan merupakan bagian penting dari tujuan pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara global, arah pembangunan kini bergeser dari eksploitasi sumber daya alam menuju pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Riset dan inovasi memegang peranan strategis, tidak hanya dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga dalam menyediakan solusi kreatif untuk tantangan pembangunan (Rohmah, 2025). Kolaborasi antara riset, pengembangan IPTEK, dan perumusan kebijakan daerah akan menghasilkan kebijakan yang berdasarkan bukti dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Hidayat, 2024). Misalnya, penelitian di bidang pertanian dapat mendorong kemajuan teknologi yang memperkuat ketahanan pangan, sementara riset energi terbarukan berperan dalam mendukung peralihan menuju energi ramah lingkungan. Penguatan riset dan IPTEK di tingkat lokal adalah langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan (Firdaus, 2022).

Walaupun demikian, hingga saat ini, pengembangan riset dan IPTEK di daerah sering menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sinergi antar-pemangku kepentingan, dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang riset (Suhardi, 2025). Oleh karena itu, diperlukan peta jalan pemajuan riset dan IPTEK daerah yang mampu menjadi panduan strategis dalam merumuskan kebijakan, menyinergikan program, serta mengarahkan sumber daya yang tersedia secara efektif.

Penguatan kegiatan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di tingkat daerah memegang peranan penting dalam menghasilkan pengetahuan serta inovasi yang aplikatif untuk mendukung proses pembangunan (Alam et al., 2022). Melalui hasil penelitian di bidang agrikultur, misalnya, dapat dikembangkan teknologi pertanian presisi yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas panen. Di sisi lain, inovasi pada sektor energi terbarukan berpotensi mendorong pengembangan sumber energi yang berkelanjutan di wilayah-wilayah tertentu. Integrasi antara hasil riset dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memberikan nilai tambah yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Akbar et al., 2023).

Dalam konteks otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan mandat konstitusional untuk menjalankan fungsi pemerintahan dengan dukungan perangkat daerah sebagai bagian dari pelaksanaan sistem desentralisasi. Mandat menjalankan pemerintahan tersebut bertujuan untuk mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui perumusan kebijakan publik yang responsif serta pengelolaan anggaran yang tepat sasaran (Taufiqurokhman, 2014). Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki beberapa fungsi, yaitu: (1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; (2) Menjalankan

otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah; dan (3) Memiliki hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Kemajuan dalam pelaksanaan otonomi daerah serta desentralisasi fiskal telah mempertegas posisi strategis Pemerintah Daerah sebagai entitas pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat (Hasanah et al., 2025). Dalam kerangka tersebut, perumusan kebijakan pembangunan di tingkat daerah menuntut perencanaan yang cermat, pelaksanaan yang terarah, serta evaluasi yang berkelanjutan agar mampu memberikan manfaat nyata bagi komunitas lokal. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan yang berbasis pada riset dan inovasi (Handini et al., 2025). Pendekatan berbasis pengetahuan ini memungkinkan perencanaan yang lebih fokus, berdampak signifikan, serta efisien dalam penggunaan sumber daya fiskal. Dengan demikian, pemanfaatan hasil riset dan inovasi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan publik diyakini dapat mempercepat akselerasi pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Transformasi kebijakan riset dan inovasi di Indonesia memasuki babak baru dengan dibentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada tahun 2021. BRIN diharapkan berperan sebagai motor penggerak dalam memperkuat ekosistem riset, termasuk mendorong pengembangan kapasitas riset di daerah. Dalam kerangka penguatan kelembagaan tersebut, Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah menegaskan bahwa riset dan inovasi di daerah diselenggarakan dan disinergikan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Pasal 2 Ayat (3) Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 juga menyebutkan bahwa penyelenggaraannya dapat disinergikan dengan

kemitraan bersama lembaga riset swasta, badan usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan/atau lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi riset dan inovasi di daerah mencakup serangkaian aktivitas, termasuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023. Penelitian bertujuan untuk: (1) peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) perbaikan tata kelola Pemerintah Daerah; (3) pemberdayaan dan peran serta masyarakat; (4) peningkatan daya saing daerah; dan (5) peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan bertujuan untuk menindaklanjuti hasil penelitian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban. Pengkajian melibatkan proses analisis dan rekayasa yang mencakup: (1) pengujian; (2) pengembangan teknologi; (3) rancang bangun; dan (4) pengoperasian. Program penerapan mencakup: (1) alih teknologi; (2) intermediasi teknologi; (3) difusi ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (4) komersialisasi teknologi.

Berdasarkan Perpres nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ PID) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau riset dan inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.

Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan telah mulai menjalankan fungsi strategis dalam bidang riset dan inovasi sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan daerah. Peran ini semakin mendapat penguatan melalui arahan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta BRIN, yang mendorong agar seluruh proses perumusan kebijakan pembangunan dilandasi oleh hasil riset dan inovasi yang relevan. Penguatan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem riset yang lebih kokoh dan adaptif, seiring dengan upaya perbaikan dan pengembangan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJ PID) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai dokumen turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Dokumen ini menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa proses pembangunan daerah berjalan secara terarah, berbasis bukti, dan selaras dengan agenda prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Tema Prioritas pada dokumen ini adalah "100.000 Sultan Muda Sumsel," yang menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong munculnya generasi pengusaha muda, pelaku ekonomi kreatif, dan inovator muda yang memiliki daya saing tinggi. Tema ini diarahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi daerah melalui penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta perluasan ekosistem inovasi yang adaptif. Seluruh arah pengembangan tersebut selaras dengan semangat Revolusi Industri 5.0, yang menempatkan manusia sebagai pusat inovasi dan menekankan integrasi teknologi cerdas dengan nilai kemanusiaan. Selain itu, penyusunan RIPJ PID Provinsi Sumatera Selatan ini juga mengacu pada Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yang menekankan penguatan SDM, hilirisasi industri, kewirausahaan,

pembangunan ekonomi hijau-biru, serta pemerataan pembangunan menuju kemandirian dan keberlanjutan.

1.2 Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- b) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148).
- d) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
- e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
- g) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
- h) Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52) yang direvisi terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan.
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

- k) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192)
- l) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.
- m) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 bertujuan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi di wilayah tersebut. Dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam menyelaraskan agenda riset dan inovasi di Provinsi Sumatera Selatan, guna mencapai integrasi, keberlanjutan, dan ketepatan dalam memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah. Adapun tujuan utama dari dokumen ini meliputi:

1. Mengkaji kondisi umum dan potensi sumber daya alam serta ekonomi Provinsi Sumatera Selatan;
2. Mengidentifikasi gambaran dan kondisi riset dan inovasi daerah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Menganalisis permasalahan utama pembangunan daerah dan potensi pemecahannya melalui riset dan inovasi;
4. Menetapkan tema-tema prioritas dalam riset dan inovasi daerah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Menganalisis tantangan serta peluang pengembangan riset dan inovasi daerah Provinsi Sumatera Selatan;
6. Menelaah kesenjangan antara kebijakan berbasis bukti dengan ekosistem riset dan inovasi di daerah Provinsi Sumatera Selatan;

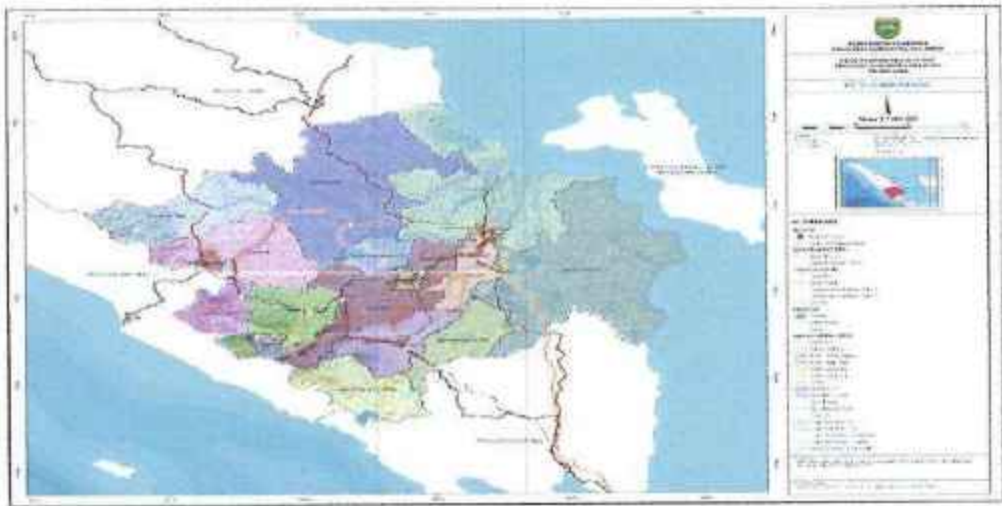
7. Merumuskan strategi untuk memperkuat dan meningkatkan ekosistem riset dan inovasi daerah Provinsi Sumatera Selatan;
8. Menyusun peta jalan program prioritas riset dan inovasi daerah yang relevan, terintegrasi, dan selaras dengan rencana pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan;
9. Merancang strategi berupa rencana aksi dalam mencapai dan mengembangkan tema prioritas 100.000 Sultan Muda Provinsi Sumatera Selatan.

Sasaran yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen ini adalah terwujudnya ekosistem riset dan inovasi daerah yang kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan, serta mampu mendukung terciptanya 100.000 wirausaha muda yang inovatif, produktif, dan berdaya saing di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2029.

1.4 Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah

Secara astronomis Provinsi Sumatera Selatan terletak antara $1^{\circ}25'13''$ - $4^{\circ}55'17''$ Lintang Selatan dan $102^{\circ}3'52''$ - $106^{\circ}19'45''$ Bujur Timur (Gambar 1.1). Berdasarkan letak geografis, Provinsi Sumatera Selatan berada pada posisi yang strategis dengan berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut ini:

- | | | |
|--------------------|---|------------------------------------|
| a) Sebelah Utara | : | Provinsi Jambi |
| b) Sebelah Selatan | : | Provinsi Lampung |
| c) Sebelah Barat | : | Provinsi Bengkulu |
| d) Sebelah Timur | : | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |



Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.1-1-6117 Tahun 2021 dan Garis Pantai Tahun 2021

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan secara administratif terdiri atas 17 daerah otonom yang mencakup 13 kabupaten dan 4 kota, dengan Kota Palembang berfungsi sebagai ibu kota provinsi (Tabel 1.1). Wilayah Provinsi Sumatera Selatan mencakup total luas sekitar 94.770,15 km², yang terbagi atas daratan seluas 86.769,34 km² dan wilayah perairan pesisir seluas kurang lebih 8.000,81 km². Secara struktural, provinsi ini terbagi menjadi 241 kecamatan, 403 kelurahan, dan 2.855 desa. Kabupaten dengan wilayah terluas adalah Ogan Komering Ilir dengan total luas 17.068,99 km², sementara Kota Palembang memiliki cakupan wilayah terkecil, yaitu seluas 352,51 km².

Tabel 1. 1 Luas Wilayah Daratan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1.	Ogan Komering Ulu	3.774,497	13	14	143
2.	Ogan Komering Ilir	17.068,99	18	13	314
3.	Muara Enim	6.763,912	22	10	245
4.	Lahat	4.333,065	24	18	360
5.	Musi Rawas	6.122,588	14	13	186
6.	Musi Banyuasin	14.550,788	15	13	229

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
7.	Banyuasin	12.262,756	21	25	288
8.	Ogan Komering Ulu Selatan	4.369,252	19	7	305
9.	Ogan Komering Ulu Timur	3.412,716	20	7	252
10.	Ogan Ilir	2.302,858	16	14	227
11.	Empat Lawang	2.234,097	10	9	147
12.	Penukal Abab Lematang Ilir	1.842,563	5	6	65
13.	Musi Rawas Utara	5.937,803	7	7	82
14.	Palembang	352,506	18	107	0
15.	Prabumulih	447,311	6	33	12
16.	Pagar Alam	625,913	5	35	0
17.	Lubuk Linggau	367,726	8	72	0
Sumatera Selatan		86.769,34	241	403	2.855

Sumber: Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044

Berdasarkan data luas wilayah daratan menurut kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan wilayah dengan daratan terluas, yaitu mencapai 17.068,99 km². Kabupaten Musi Banyuasin berada pada posisi kedua dengan luas wilayah 14.550,788 km². Kemudian diikuti Kabupaten Banyuasin seluas 12.262,756 km². Adapun wilayah dengan luas daratan terkecil di Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi Kota Palembang dengan luas 352,506 km² dan Kota Lubuk Linggau seluas 367,726 km². Dari segi jumlah kecamatan, Kabupaten Lahat memiliki jumlah kecamatan terbanyak, yakni sebanyak 24 kecamatan, diikuti oleh Kabupaten Muara Enim sebanyak 22 kecamatan. Sementara itu, jumlah kelurahan terbanyak terdapat di Kota Palembang sebanyak 107 kelurahan, disusul oleh Kota Lubuk Linggau sebanyak 72 kelurahan. Untuk jumlah desa, Kabupaten Lahat menempati urutan tertinggi dengan 360 desa, disusul oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 314 desa.

1.5 Demografi dan Ketenagakerjaan

Penduduk suatu wilayah merupakan elemen fundamental dalam proses pembangunan, tidak hanya sebagai sumber daya manusia (SDM) yang menjalankan pembangunan, tetapi juga sebagai penerima manfaat dari hasil pembangunan tersebut (Hasibuan & Rukiah, 2023). Dalam konteks pengembangan wilayah, keberadaan penduduk sebagai potensi SDM memiliki peran strategis dalam pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya lokal secara arif dan berkelanjutan. Kontribusi penduduk dalam pembangunan mencakup dua dimensi utama, yaitu sebagai subjek yang menggerakkan pembangunan dan sebagai objek yang merasakan dampaknya.

Penduduk dapat menjadi aset pembangunan apabila didukung oleh kualitas SDM yang memadai. Sebaliknya, tanpa kualitas yang memadai, keberadaan penduduk justru dapat menjadi tantangan yang menghambat kemajuan. Dengan demikian, upaya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM menjadi faktor krusial agar jumlah penduduk yang besar dapat memberikan kontribusi nyata dan positif terhadap percepatan pembangunan wilayah secara menyeluruh. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Kota Palembang tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu sebanyak 1.718.440 jiwa pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 1.729.843 jiwa pada tahun 2025. Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Banyuasin dengan jumlah penduduk sebanyak 885.902 jiwa pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 897.425 jiwa pada tahun 2025. Sementara itu, Kabupaten Ogan Komering Ilir menempati urutan ketiga, dengan jumlah penduduk sebanyak 807.085 jiwa pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 816.505 jiwa pada tahun 2025.

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, 2024 ,2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		2020	2024	2025
1.	Ogan Komering Ulu	367.603	383.039	386.816
2.	Ogan Komering Ilir	769.348	807.085	816.505
3.	Muara Enim	612.900	640.962	647.936
4.	Lahat	430.071	450.281	455.581
5.	Musi Rawas	395.570	411.787	415.744
6.	Musi Banyuasin	622.206	651.950	659.302
7.	Banyuasin	836.914	885.902	897.425
8.	Ogan Komering Ulu Selatan	408.981	429.535	434.789
9.	Ogan Komering Ulu Timur	649.853	674.184	680.094
10.	Ogan Ilir	416.549	436.141	441.183
11.	Empat Lawang	333.622	345.641	348.974
12.	Penukal Abab Lematang Ilir	194.900	205.384	208.032
13.	Musi Rawas Utara	188.861	198.413	200.799
14.	Palembang	1.668.848	1.718.440	1.729.843
15.	Prabumulih	193.196	203.312	205.905
16.	Pagar Alam	143.844	149.199	150.533
17.	Lubuk Linggau	234.166	246.046	249.054
Sumatera Selatan		8.467.432	8.837.301	8.928.515

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Tabel 1. 3 Kepadatan Penduduk per km² Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, 2024, 2025

No	Kabupaten/Kota	Kepadatan penduduk per (Jiwa/km ²)		
		2020	2024	2025
1.	Ogan Komering Ulu	76,63	101,48	102,48
2.	Ogan Komering Ilir	41,91	47,28	47,83
3.	Muara Enim	83,00	94,76	95,79
4.	Lahat	80,97	103,92	105,14
5.	Musi Rawas	62,29	67,26	67,90
6.	Musi Banyuasin	43,61	44,81	45,31
7.	Banyuasin	70,73	72,24	73,18
8.	Ogan Komering Ulu Selatan	74,44	125,86	127,40
9.	Ogan Komering Ulu Timur	192,83	154,30	155,65
10.	Ogan Ilir	156,24	189,39	191,58
11.	Empat Lawang	147,85	154,71	156,20
12.	Penukal Abab Lematang Ilir	105,92	111,47	112,90
13.	Musi Rawas Utara	31,43	33,42	33,82
14.	Palembang	4.519,93	4.874,87	4.907,22
15.	Prabumulih	766,83	454,52	460,32
16.	Pagar Alam	227,01	238,37	240,50
17.	Lubuk Linggau	583,23	669,09	677,27
Sumatera Selatan		92,45	101,85	102,90

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Sebaliknya, Kota Pagar Alam merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni 149.199 jiwa pada tahun 2024 dan

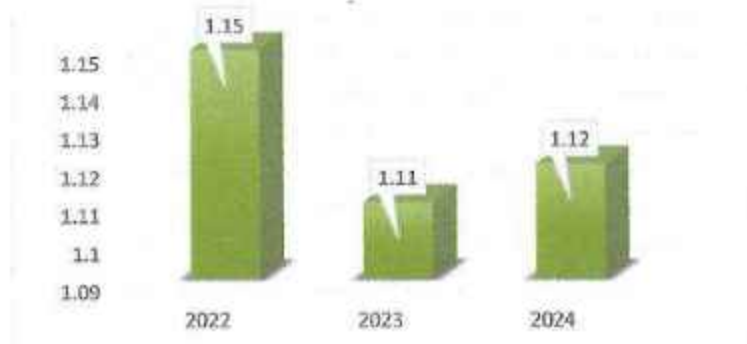
150.533 jiwa pada tahun 2025. Jumlah penduduk terendah kedua terdapat di Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan populasi sebesar 198.413 jiwa pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 200.799 jiwa pada tahun 2025. Temuan ini menunjukkan adanya variasi jumlah penduduk yang signifikan antarwilayah di Provinsi Sumatera Selatan, dengan kecenderungan peningkatan jumlah penduduk secara umum dari tahun 2024 ke tahun 2025.

Tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan variasi yang cukup signifikan antarwilayah (Tabel 1.3). Kota Palembang menempati urutan pertama sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu sebesar 4.874,87 jiwa/km² pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 4.907,22 jiwa/km² pada tahun 2025. Kepadatan tertinggi kedua terdapat di Kota Lubuk Linggau, yang mencatatkan angka sebesar 669,09 jiwa/km² pada tahun 2024 dan 677,27 jiwa/km² pada tahun 2025. Selanjutnya, Kota Prabumulih berada pada posisi ketiga, dengan kepadatan penduduk sebesar 454,52 jiwa/km² pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 460,32 jiwa/km² pada tahun 2025.

Di sisi lain, Kabupaten Musi Rawas Utara tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah, yaitu 33,42 jiwa/km² pada tahun 2024 dan 33,82 jiwa/km² pada tahun 2025. Kabupaten Musi Banyuasin menempati posisi kedua dengan kepadatan terendah, yakni sebesar 44,81 jiwa/km² pada tahun 2024 dan meningkat sedikit menjadi 45,31 jiwa/km² pada tahun 2025. Data ini mencerminkan adanya konsentrasi penduduk yang lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan dengan daerah kabupaten yang memiliki wilayah geografis lebih luas dan populasi yang tersebar.

Laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator demografis yang menggambarkan persentase peningkatan jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu, biasanya dihitung per tahun. Indikator ini mencerminkan dinamika perubahan jumlah penduduk sebagai hasil dari proses kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk.

Laju pertumbuhan yang stabil dan terukur penting untuk mendukung perencanaan pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan infrastruktur.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Gambar 1. 2 Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2022-2024 (%)

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren yang relatif stabil selama periode 2022 hingga 2024 (Gambar 1.2). Pada tahun 2022, laju pertumbuhan tercatat sebesar 1,15 persen, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 1,11 persen pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, angka tersebut mengalami peningkatan kembali menjadi 1,12 persen. Perubahan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan penduduk di wilayah ini masih berada dalam kisaran moderat, yang memerlukan perhatian dalam pengelolaan sumber daya dan penyediaan layanan publik secara berkelanjutan.

Distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 menunjukkan variasi jumlah yang cukup signifikan di antara wilayah kabupaten/kota (Tabel 1.4). Secara keseluruhan jumlah laki-laki di Provinsi Sumatera Selatan lebih banyak dengan jumlah 4.542.623 jiwa dibandingkan perempuan yang mencapai 4.385.892 jiwa. Kota Palembang tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk laki-laki terbanyak, yaitu sebanyak 866.246

jiwa, diikuti oleh Kabupaten Banyuasin dengan 459.026 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk laki-laki paling sedikit terdapat di Kota Pagar Alam, yaitu sebesar 76.979 jiwa.

Tabel 1. 4 Populasi Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Ogan Komering Ulu	197.773	189.043	386.816
2.	Ogan Komering Ilir	418.678	397.827	816.505
3.	Muara Enim	330.191	317.745	647.936
4.	Lahat	232.641	222.940	455.581
5.	Musi Rawas	212.339	203.405	415.744
6.	Musi Banyuasin	338.072	321.230	659.302
7.	Banyuasin	459.026	438.399	897.425
8.	Ogan Komering Ulu Selatan	224.464	210.325	434.789
9.	Ogan Komering Ulu Timur	347.480	332.614	680.094
10.	Ogan Ilir	223.544	217.639	441.183
11.	Empat Lawang	179.062	169.912	348.974
12.	Penukal Abab Lematang Ilir	105.028	103.004	208.032
13.	Musi Rawas Utara	102.266	98.533	200.799
14.	Palembang	866.246	863.597	1.729.843
15.	Prabumulih	103.479	102.426	205.905
16.	Pagar Alam	76.979	73.554	150.533
17.	Lubuk Linggau	125.355	123.699	249.054
Sumatera Selatan		4.542.623	4.385.892	8.928.515

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Di sisi lain, Kota Palembang juga menempati posisi tertinggi dalam jumlah penduduk perempuan, yakni sebanyak 863.597 jiwa. Kabupaten Banyuasin kembali menempati posisi kedua dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 438.399 jiwa. Jumlah penduduk perempuan paling sedikit juga tercatat di Kota Pagar Alam, yaitu sebanyak 73.554 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa Kota Palembang sebagai ibu kota provinsi memiliki konsentrasi penduduk tertinggi untuk kedua jenis kelamin, sedangkan Kota Pagar Alam merupakan wilayah dengan populasi terendah secara relatif, baik laki-laki maupun perempuan

Struktur penduduk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin menunjukkan dominasi penduduk usia muda (Tabel 1.5). Kelompok umur 10-14 tahun merupakan kelompok dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni sebesar 773.508 jiwa, terdiri atas 395.667 laki-laki dan 377.841 perempuan. Kelompok usia terbanyak kedua adalah usia 5-9 tahun dengan jumlah 766.093 jiwa, terdiri atas 392.076 laki-laki dan 374.017 perempuan.

Tabel 1. 5 Populasi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0-4	371.212	356.111	727.323
2.	5-9	392.076	374.017	766.093
3.	10-14	395.667	377.841	773.508
4.	15-19	363.980	342.168	706.148
5.	20-24	356.996	336.412	693.408
6.	25-29	361.648	343.685	705.333
7.	30-34	356.097	339.293	695.390
8.	35-39	351.885	336.331	688.216
9.	40-44	331.601	318.300	649.901
10.	45-49	307.232	296.719	603.951
11.	50-54	268.862	261.613	530.475
12.	55-59	221.929	218.726	440.655
13.	60-64	176.078	176.317	352.395
14.	65-69	129.859	131.491	261.350
15.	70-74	86.172	90.068	176.240
16.	75+	71.329	86.800	158.129
Jumlah		4.542.623	4.385.892	8.928.515

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Sementara itu, kelompok umur dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah usia 75 tahun ke atas, yaitu sebanyak 158.129 jiwa, yang terdiri dari 71.392 laki-laki dan 86.800 perempuan. Diikuti oleh kelompok umur 70-74 tahun, yang mencatatkan jumlah 176.240 jiwa, dengan rincian 86.172 laki-laki dan 90.068 perempuan. Distribusi ini menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Sumatera Selatan pada

tahun 2025 masih didominasi oleh kelompok usia anak-anak dan remaja, sedangkan proporsi penduduk lansia relatif lebih kecil

Ketenagakerjaan merupakan salah satu komponen kunci dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah (Suhandi et al., 2020). Aspek ini mencakup berbagai indikator penting, seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran, kompetensi serta keterampilan tenaga kerja, dan kondisi kerja yang meliputi aspek upah, durasi kerja, hingga perlindungan keselamatan kerja. Struktur penduduk berumur 15 tahun ke atas di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (Tabel 1.6). Jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 4.659.809 jiwa, yang terdiri dari 2.286.429 laki-laki dan 1.791.380 perempuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.480.100 jiwa merupakan penduduk yang bekerja, dengan rincian 2.760.733 laki-laki dan 1.719.367 perempuan. Sementara itu, pengangguran terbuka mencapai 179.709 jiwa, terdiri atas 107.696 laki-laki dan 72.013 perempuan.

Tabel 1. 6 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	2.868.429	1.791.380	4.659.809
a. Bekerja	2.760.733	1.719.367	4.480.100
b. Pengangguran Terbuka	107.696	72.013	179.709
Bukan Angkatan Kerja	474.978	1.444.946	1.919.924
a. Sekolah	211.563	242.526	454.089
b. Mengurus Rumah Tangga	86.630	1.112.167	1.198.797
c. Lainnya	176.785	90.253	267.038
Jumlah	3.343.407	3.236.326	6.579.733

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Selain itu, jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja sebanyak 1.919.924 jiwa, yang mencakup 474.978 laki-laki dan

1.444.946 perempuan. Kelompok ini terdiri dari penduduk yang masih sekolah sebanyak 454.089 jiwa (211.563 laki-laki dan 242.526 perempuan), penduduk yang mengurus rumah tangga sebanyak 1.198.797 jiwa (86.630 laki-laki dan 1.112.167 perempuan), serta penduduk dalam kategori lainnya sebanyak 267.038 jiwa. Distribusi ini mencerminkan adanya perbedaan signifikan dalam peran dan keterlibatan ekonomi antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam kategori bukan angkatan kerja, yang sebagian besar diisi oleh perempuan yang mengurus rumah tangga.

Tingkat partisipasi angkatan kerja mencerminkan proporsi penduduk usia produktif yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik sebagai tenaga kerja aktif maupun pencari kerja. Di sisi lain, tingkat pengangguran merepresentasikan jumlah individu yang belum memperoleh pekerjaan meskipun secara aktif mencarinya. Kondisi kerja yang layak, adil, dan aman turut menentukan tingkat kesejahteraan tenaga kerja serta berkontribusi terhadap peningkatan motivasi dan produktivitas. Oleh karena itu, perbaikan dalam sektor ketenagakerjaan tidak hanya memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Tabel 1. 7 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Kategori Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja				
		Bekerja	Pengangguran			Jumlah Angkatan Kerja
			Pernah Bekerja	Tidak Pernah Bekerja	Jumlah	
1.	Ogan Komering Ulu	192.425	5.113	3.007	8.120	200.545
2.	Ogan Komering Ilir	408.918	4.383	9.942	14.325	423.243
3.	Muara Enim	328.288	3.371	10.624	13.995	342.283
4.	Lahat	238.301	2.563	5.096	7.659	245.960
5.	Musi Rawas	224.946	1.334	3.106	4.440	229.386
6.	Musi Banyuasin	322.577	4.235	2.797	7.032	329.609

No	Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja				
		Bekerja	Pengangguran			Jumlah Angkatan Kerja
			Pernah Bekerja	Tidak Pernah Bekerja	Jumlah	
7.	Banyuasin	419.360	8.560	5.497	14.057	433.417
8.	Ogan Komering Ulu Selatan	257.318	806	3.912	4.718	262.036
9.	Ogan Komering Ulu Timur	379.157	5.288	8.256	13.544	392.701
10.	Ogan Ilir	244.614	2.777	3.886	6.663	251.277
11.	Empat Lawang	205.549	2.067	3.940	6.007	211.556
12.	Penukal Abab Lematang Ilir	111.755	1.005	3.308	4.313	116.068
13.	Musi Rawas Utara	97.329	1.740	3.289	5.029	102.358
14.	Palembang	744.367	28.027	27.825	55.852	800.219
15.	Prabumulih	98.550	885	4.240	5.125	103.675
16.	Pagar Alam	85.100	1.131	904	2.035	87.135
17.	Lubuk Linggau	121.546	3.497	3.298	6.795	128.341
Sumatera Selatan		4.480.100	76.782	102.927	179.709	4.659.809

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan yang tergolong sebagai angkatan kerja, yaitu penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja tercatat sebanyak 4.659.809 jiwa (Tabel 1.7). Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.480.100 jiwa, sedangkan sisanya, yaitu 179.709 jiwa, termasuk dalam kategori pengangguran. Kota Palembang merupakan wilayah dengan jumlah angkatan kerja terbanyak, yakni sebanyak 800.219 jiwa, yang terdiri atas 744.367 jiwa penduduk bekerja dan 55.852 jiwa pengangguran. Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Banyuasin dengan total angkatan kerja sebanyak 433.417 jiwa (419.360 bekerja dan 14.057 pengangguran), diikuti oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 423.243 jiwa (408.918 bekerja dan 14.325 pengangguran).

Sementara itu, jumlah angkatan kerja paling sedikit terdapat di Kota Pagar Alam, yakni sebanyak 87.135 jiwa, dengan rincian 85.100 jiwa bekerja dan 2.035 jiwa pengangguran. Disusul oleh Kabupaten Musi Rawas Utara dengan total angkatan kerja sebanyak 102.358 jiwa (97.329 bekerja dan 5.029 pengangguran). Data ini memberikan

gambaran mengenai sebaran potensi tenaga kerja antarwilayah serta menunjukkan dominasi jumlah angkatan kerja di wilayah perkotaan dan padat penduduk, seperti Kota Palembang. Informasi ini penting untuk mendukung perencanaan program ketenagakerjaan dan pengurangan pengangguran secara tepat sasaran di tingkat kabupaten/kota.

Pada tahun 2024, jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan bervariasi antar kabupaten/kota (Tabel 1.8). Kota Palembang tercatat sebagai wilayah dengan jumlah bukan angkatan kerja terbanyak, yaitu sebesar 479.229 jiwa. Dari jumlah tersebut, 95.848 jiwa merupakan penduduk yang masih bersekolah, 305.560 jiwa mengurus rumah tangga, dan 77.821 jiwa termasuk dalam kategori lainnya. Kabupaten Banyuasin menempati urutan kedua dengan jumlah bukan angkatan kerja sebanyak 229.156 jiwa, yang terdiri atas 42.436 jiwa bersekolah, 159.632 jiwa mengurus rumah tangga, dan 27.088 jiwa lainnya.

Kemudian jumlah bukan angkatan kerja paling sedikit terdapat di Kota Pagar Alam, yaitu sebanyak 24.376 jiwa, dengan rincian 8.000 jiwa masih bersekolah, 12.930 jiwa mengurus rumah tangga, dan 3.446 jiwa lainnya. Disusul oleh Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan total sebanyak 30.818 jiwa, yang terdiri dari 11.652 jiwa bersekolah, 15.695 jiwa mengurus rumah tangga, dan 3.471 jiwa lainnya. Data ini menunjukkan bahwa wilayah perkotaan seperti Kota Palembang memiliki jumlah penduduk bukan angkatan kerja yang tinggi, yang didominasi oleh aktivitas mengurus rumah tangga.

Tabel 1. 8 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Kategori Bukan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Bukan Angkatan Kerja			
		Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
1.	Ogan Komering Ulu	17.487	56.742	6.535	80.764
2.	Ogan Komering Ilir	37.435	124.677	21.098	183.210
3.	Muara Enim	30.909	80.360	18.126	129.395
4.	Lahat	22.798	52.087	16.281	91.166
5.	Musi Rawas	20.677	48.110	9.127	77.914
6.	Musi Banyuasin	34.915	92.901	14.481	142.297
7.	Banyuasin	42.436	159.632	27.088	229.156
8.	Ogan Komering Ulu Selatan	19.847	39.058	6.894	65.799
9.	Ogan Komering Ulu Timur	37.276	64.246	15.005	116.527
10.	Ogan Ilir	17.788	39.569	13.533	70.890
11.	Empat Lawang	19.523	27.632	12.580	59.735
12.	Penukal Abab Lematang Ilir	11.652	15.695	3.471	30.818
13.	Musi Rawas Utara	11.023	26.368	6.060	43.451
14.	Palembang	95.848	305.560	77.821	479.229
15.	Prabumulih	12.270	26.092	5.022	43.384
16.	Pagar Alam	8.000	12.930	3.446	24.376
17.	Lubuk Linggau	14.205	27.138	10.470	51.813
Sumatera Selatan		454.089	1.198.797	267.038	1.919.924

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. TPAK menjadi ukuran penting dalam menilai sejauh mana potensi tenaga kerja dimanfaatkan dalam suatu wilayah. Pada tahun 2024, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mencatatkan TPAK tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sebesar 79,93 persen (Tabel 1.8). Posisi berikutnya ditempati oleh Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan tingkat partisipasi sebesar 79,02 persen, disusul oleh Kota Pagar Alam dengan TPAK sebesar 78,14 persen. Tingginya angka TPAK di wilayah-wilayah

tersebut mencerminkan keterlibatan yang relatif tinggi dari penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi.

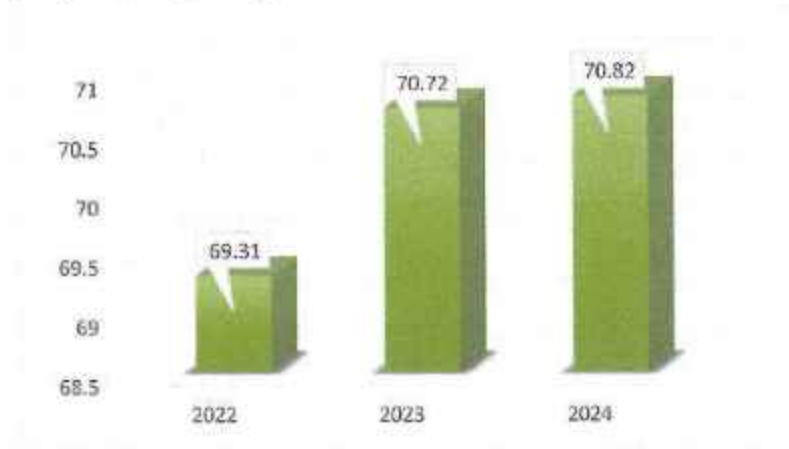
Tabel 1. 9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	TPAK (%)
1.	Ogan Komering Ulu	71,29
2.	Ogan Komering Ilir	71,29
3.	Muara Enim	72,57
4.	Lahat	72,96
5.	Musi Rawas	74,65
6.	Musi Banyuasin	69,85
7.	Banyuasin	65,41
8.	Ogan Komering Ulu Selatan	79,93
9.	Ogan Komering Ulu Timur	77,12
10.	Ogan Ilir	78,00
11.	Empat Lawang	77,98
12.	Penukal Abab Lematang Ilir	79,02
13.	Musi Rawas Utara	70,20
14.	Palembang	62,54
15.	Prabumulih	70,50
16.	Pagar Alam	78,14
17.	Lubuk Linggau	71,24
Sumatera Selatan		70,82

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Sebaliknya, Kota Palembang mencatatkan TPAK terendah di provinsi ini, yaitu sebesar 62,54 persen. Kabupaten Banyuasin menyusul di posisi kedua terendah dengan TPAK sebesar 65,41 persen. Rendahnya tingkat partisipasi ini mengindikasikan adanya potensi angkatan kerja yang belum sepenuhnya terserap atau berpartisipasi dalam pasar kerja secara optimal. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren peningkatan selama periode tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, TPAK tercatat sebesar 69,31 persen, kemudian mengalami kenaikan menjadi 70,72 persen pada tahun 2023. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024, dengan angka TPAK mencapai 70,82 persen. Kenaikan TPAK ini mengindikasikan bahwa proporsi

penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, semakin meningkat. Peningkatan ini dapat mencerminkan membaiknya kondisi pasar kerja, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam aktivitas ekonomi, serta membaiknya akses terhadap lapangan pekerjaan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Gambar 1. 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2024

1.6 Produk Unggulan Daerah (PUD) sebagai Potensi Ekonomi Utama

Produk Unggulan Daerah (PUD) merujuk pada komoditas atau jasa khas yang mencerminkan keunikan suatu wilayah, memiliki daya saing tinggi, serta mampu menciptakan peluang kerja bagi masyarakat setempat (Budiyanto, 2023). Produk ini dikembangkan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan dan orientasi pasar yang mencakup skala lokal, nasional, hingga regional. Dalam konteks otonomi daerah, upaya pengembangan dan pemberdayaan PUD sebagai bagian dari potensi ekonomi daerah tidaklah sederhana, karena keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan komitmen politik Pemerintah Daerah (Alfitri & Nawangsari, 2025). Secara umum, PUD bisa dihasilkan oleh koperasi

serta pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), dan dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Proses pengembangan tersebut menuntut pemanfaatan optimal terhadap sumber daya lokal, baik itu alam, manusia, maupun budaya. Produk unggulan yang berhasil dikembangkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah, tetapi juga diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal dengan keunggulan kompetitif, nilai jual yang tinggi, serta potensi untuk menembus pasar global. Berikut ini beberapa Produk Unggulan Daerah (PUD) Provinsi Sumatera Selatan:

1. Padi : Produk unggulan Provinsi Sumatera Selatan pada subsektor tanaman pangan yang memiliki kontribusi terbesar terhadap ketahanan pangan daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, pada tahun 2024 total produksi padi mencapai 2.909.411,67 ton. Kabupaten Banyuasin menjadi penyumbang produksi terbesar dengan 948.088,97 ton, disusul oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebanyak 731.587,52 ton, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 578.805,35 ton. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi besar sebagai salah satu lumbung padi di wilayah Sumatera.
2. Jagung : Produk unggulan Provinsi Sumatera Selatan pada subsektor tanaman pangan yang memiliki potensi strategis dalam mendukung ketahanan pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, total produksi jagung mencapai 826.836,19 ton, dengan kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 369.468,68 ton. Capaian ini menunjukkan peran penting jagung sebagai komoditas andalan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian.
3. Cabai : Produk unggulan Provinsi Sumatera Selatan pada subsektor hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan permintaan pasar yang stabil sepanjang tahun. Komoditas cabai menjadi salah satu penopang ketahanan pangan dan pengendali inflasi daerah. Sentra produksi cabai tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, dan Musi Banyuasin dengan masing-masing luas areal tanam mencapai sekitar 2 hektar. Produksi cabai di Sumatera Selatan menunjukkan dukungan pemerintah daerah

- dalam penguatan rantai pasok dan pemasaran hasil pertanian.
4. Bawang Merah : Produk unggulan Provinsi Sumatera Selatan pada subsektor hortikultura yang terus dikembangkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Total produksi bawang merah di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 8.965,03 kwintal, dengan Kota Pagar Alam sebagai penyumbang terbesar yaitu sebesar 5.776 kwintal. Pengembangan komoditas ini juga mendapat dukungan sarana dan prasarana produksi di Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, dan Musi Rawas Utara dengan masing-masing luas lahan sekitar 2 hektar.
 5. Kelapa Sawit : Komoditas strategis bagi perekonomian Sumatera Selatan dengan produksi mencapai 3.370.529 ton. Penyumbang produksi terbesar berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 945.004 ton dan Kabupaten Banyuasin sebesar 530.137 ton. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki dasar kebijakan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan melalui Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, sebagai upaya menjaga keseimbangan antara produktivitas, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
 6. Karet : Produk unggulan utama Provinsi Sumatera Selatan yang berperan penting dalam perekonomian daerah, khususnya di sektor perkebunan rakyat. Produksi karet di Sumatera Selatan mencapai 1.003.780 ton, dengan penyumbang terbesar berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 211.366 ton dan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 191.296 ton. Komoditas ini menjadi salah satu andalan ekspor daerah dan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan melalui peningkatan produktivitas dan kualitas hasil.
 7. Kopi : Produk unggulan perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dengan total produksi mencapai 207.320 ton. Kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 61.616 ton dan Kabupaten Empat Lawang sebesar 53.194 ton. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mendukung pengembangan komoditas ini melalui Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kopi Sumatera Selatan Berkelanjutan, yang berfokus pada peningkatan kualitas, daya saing, serta penguatan posisi kopi Sumatera Selatan di pasar nasional dan internasional.
 8. Kelapa : Produk unggulan Provinsi Sumatera Selatan di subsektor perkebunan yang berpotensi tinggi untuk pengembangan industri turunan. Produksi kelapa di

- Sumatera Selatan mencapai 61.564 ton, dengan kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Banyuasin sebesar 46.927 ton. Potensi pengembangan kelapa di daerah ini dapat diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah melalui diversifikasi produk olahan serta penguatan rantai pasok berbasis masyarakat.
9. Sapi : Produk unggulan Provinsi Sumatera Selatan pada subsektor peternakan yang berperan penting dalam penyediaan daging dan penguatan ketahanan pangan daerah. Populasi sapi di Sumatera Selatan mencapai 276.812 ekor, dengan penyumbang terbanyak berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebanyak 64.549 ekor dan Kabupaten Banyuasin sebanyak 46.352 ekor. Pengembangan komoditas ini didukung oleh kebijakan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2018
10. Aneka Ikan (Patin, Lele, Nila, Mas, Gurame, Gabus) : Aneka ikan air tawar merupakan salah satu produk unggulan Provinsi Sumatera Selatan pada subsektor perikanan budidaya yang berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan dan perekonomian daerah. Provinsi Sumatera Selatan menempati peringkat nasional yang membanggakan, dengan ikan patin peringkat 1 nasional dan produksi mencapai 91.935.179 kg, ikan lele peringkat 4 nasional dengan 100.917.788 kg, ikan nila peringkat 6 nasional dengan 68.936.768 kg, ikan mas peringkat 5 nasional dengan 23.992.625 kg, ikan gurame peringkat 7 nasional dengan 7.014.652 kg, serta ikan gabus peringkat 3 nasional dengan 6.171 ton. Capaian tersebut menunjukkan besarnya potensi Sumatera Selatan dalam pengembangan komoditas perikanan budidaya, yang dapat terus ditingkatkan melalui inovasi teknologi, penguatan kelembagaan pembudidaya, dan pengembangan pasar hasil perikanan.
11. Udang : Produk unggulan subsektor perikanan Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki potensi ekonomi tinggi, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Potensi besar ini menjadi peluang strategis bagi Sumatera Selatan untuk memperluas kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir
12. Wisata Alam : Wisata alam merupakan salah satu produk unggulan Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sektor andalan pariwisata daerah. Sumatera Selatan memiliki kekayaan alam yang beragam, seperti Danau Ranau di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan panorama pegunungan dan air jernihnya, Air Terjun Lematang Indah di Pagar Alam yang menjadi ikon wisata pegunungan. Pengembangan wisata alam ini terus diarahkan pada penguatan destinasi berbasis

- 13 Kerajinan dan Produk Kreatif : konservasi dan pemberdayaan masyarakat lokal guna mendukung pariwisata berkelanjutan dan peningkatan ekonomi daerah. produk unggulan Provinsi Sumatera Selatan yang mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat. Provinsi ini dikenal dengan berbagai hasil karya bernilai tinggi seperti songket Palembang yang telah mendunia, anyaman purun dari Ogan Komering Ilir, tenun jumputan, serta kerajinan kulit kayu dan rotan dari berbagai daerah. Selain itu, sektor ekonomi kreatif terus tumbuh melalui pengembangan kuliner khas, desain produk, dan seni rupa lokal yang menjadi daya tarik wisata budaya Sumatera Selatan.

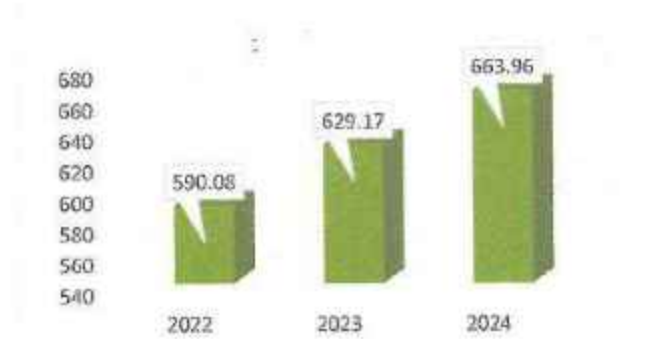
1.7 Gambaran Ekonomi Makro Daerah

A. Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu parameter penting dalam menilai tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Indikator ini menggambarkan kapasitas suatu daerah dalam meningkatkan output barang dan jasa, yang berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup penduduk. Umumnya, pertumbuhan ekonomi diukur melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu akumulasi nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh pelaku usaha di suatu wilayah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun.

PDRB memiliki peran yang penting sebagai indikator utama dalam mencerminkan kondisi perekonomian daerah (Marcal et al., 2024). PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengidentifikasi struktur dan dinamika ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dimanfaatkan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara riil, tanpa pengaruh inflasi. Selain itu, PDRB merupakan parameter yang digunakan untuk menilai perkembangan ekonomi suatu daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, PDRB Provinsi Sumatera Selatan atas dasar harga berlaku menunjukkan tren peningkatan yang konsisten (Gambar 1.4). Pada tahun 2020, nilai PDRB tercatat sebesar Rp454,61 triliun dan terus mengalami pertumbuhan hingga mencapai Rp663,96 triliun

pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan sekitar 46,05 persen selama periode tersebut.

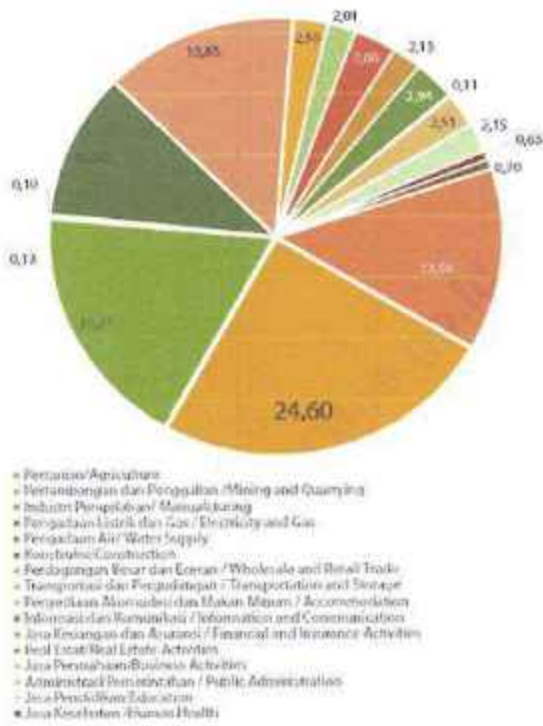


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Gambar 1. 4 Produk Domestik Regional Bruto Harga Berlaku di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2024 (Triliun Rupiah)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren pertumbuhan positif selama periode tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, nilai PDRB tercatat sebesar Rp590,08 triliun. Angka ini meningkat menjadi Rp629,17 triliun pada tahun 2023, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi Rp663,96 triliun. Pertumbuhan nilai PDRB ini mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, baik sektor primer, sekunder, maupun tersier.

Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 didominasi oleh lima lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Gambar 1.5). Pertambangan dan penggalian menjadi sektor dengan sumbangan tertinggi, yakni sebesar 24,60 persen, menegaskan peran penting sektor ekstraktif dalam aktivitas ekonomi daerah. Kemudian yang kedua industri pengolahan dengan kontribusi 18,27 persen, yang menunjukkan bahwa kegiatan manufaktur masih menjadi penggerak utama perekonomian regional.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025

Gambar 1. 5 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (%)

Sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, menyumbang 13,85 persen, diikuti oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,56 persen. Sementara itu, sektor konstruksi turut memberikan andil sebesar 10,80 persen, mencerminkan pertumbuhan pembangunan fisik dan infrastruktur yang cukup signifikan. Pola distribusi ini memperlihatkan ketergantungan ekonomi daerah pada sektor sumber daya alam, namun juga mulai menunjukkan dinamika dari sektor-sektor non-ekstraktif.

Pada tahun 2024, capaian PDRB atas dasar harga berlaku di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan ketimpangan yang cukup

signifikan antar wilayah (Gambar 1.6). Kota Palembang mencatatkan nilai PDRB tertinggi, yakni sebesar Rp208.196,68 miliar, mencerminkan posisinya sebagai pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan jasa di provinsi ini. Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Muara Enim dengan PDRB sebesar Rp116.724,42 miliar, yang didukung oleh sektor energi dan pertambangan yang kuat. Sementara itu, Kabupaten Musi Banyuasin berada di urutan ketiga dengan nilai PDRB sebesar Rp92.666,87 miliar, yang juga ditopang oleh kekayaan sumber daya alam, terutama di sektor migas dan perkebunan. Kemudian kontribusi ekonomi terkecil berasal dari Kota Pagar Alam, yang hanya mencatatkan PDRB sebesar Rp3.811,06 miliar, disusul oleh Kabupaten Empat Lawang dengan nilai Rp6.722,01 miliar. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam kapasitas ekonomi antar wilayah yang dapat menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pemerataan pembangunan daerah di Sumatera Selatan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Gambar 1. 6 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (Miliar Rupiah)

B. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur rata-rata nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh setiap individu di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. Nilai ini diperoleh dengan membagi total PDRB wilayah dengan jumlah penduduknya. PDRB per kapita memberikan gambaran umum mengenai tingkat kesejahteraan ekonomi dan produktivitas rata-rata penduduk.

Tabel 1. 10 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2024 (ribu rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Ogan Komering Ulu	46.956,97	50.033,94	53.428,43
2.	Ogan Komering Ilir	50.036,05	53.879,82	57.799,38
3.	Muara Enim	181.316,34	187.001,31	182.108,16
4.	Lahat	63.324,37	65.825,28	66.582,12
5.	Musi Rawas	55.375,46	57.706,40	61.856,86
6.	Musi Banyuasin	129.485,96	132.949,92	142.138,01
7.	Banyuasin	39.591,78	43.052,03	44.734,20
8.	Ogan Komering Ulu Selatan	24.664,95	26.144,88	27.723,86
9.	Ogan Komering Ulu Timur	26.951,67	29.137,58	31.504,38
10.	Ogan Ilir	31.101,86	33.033,38	34.944,85
11.	Empat Lawang	17.200,95	18.363,83	19.447,96
12.	Penukal Abab Lematang Ilir	40.987,66	43.018,71	45.701,35
13.	Musi Rawas Utara	44.188,87	46.269,54	48.869,47
14.	Palembang	105.749,96	114.025,38	121.154,47
15.	Prabumulih	46.471,27	49.005,76	51.808,22
16.	Pagar Alam	22.235,85	23.611,51	25.543,50
17.	Lubuk Linggau	32.052,19	33.886,94	35.431,82

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Semakin tinggi nilai PDRB per kapita, umumnya dikaitkan dengan peningkatan kualitas hidup, termasuk akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta standar hidup yang lebih tinggi. Namun demikian, indikator ini tidak mencerminkan sebaran pendapatan secara merata, karena tidak memperhitungkan tingkat ketimpangan antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu, analisis PDRB per kapita sebaiknya dilengkapi dengan indikator lain seperti tingkat kemiskinan dan indeks ketimpangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai kesejahteraan ekonomi suatu daerah.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2022 hingga 2024 memperlihatkan perbedaan yang cukup mencolok antar kabupaten/kota. Kabupaten Muara Enim secara konsisten mencatat nilai PDRB per kapita tertinggi, yakni

sebesar Rp181.316,34 pada tahun 2022, meningkat menjadi Rp187.001,31 pada 2023, dan mencapai Rp182.108,16 ribu pada 2024. Posisi ini mengindikasikan dominasi sektor energi dan pertambangan di wilayah tersebut. Pada posisi kedua, Kabupaten Musi Banyuasin mencatat PDRB per kapita sebesar Rp129.485,96 ribu pada 2022, naik menjadi Rp132.949,92 ribu pada 2023, dan kembali meningkat menjadi Rp142.138,01 ribu pada tahun 2024. Sementara itu, Kota Palembang menempati urutan ketiga dengan tren pertumbuhan yang stabil, dari Rp105.749,96 ribu pada 2022 menjadi Rp114.025,38 ribu pada 2023, dan Rp121.154,47 ribu pada 2024. Sementara itu Kabupaten Empat Lawang tercatat sebagai wilayah dengan nilai PDRB per kapita terendah, meskipun menunjukkan tren peningkatan, yakni dari Rp17.200,95 ribu pada tahun 2022 menjadi Rp18.363,83 ribu pada 2023, dan Rp19.447,96 ribu pada tahun 2024. Perbedaan ini mencerminkan kesenjangan produktivitas ekonomi per individu yang masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah provinsi.

Tabel 1.11 menunjukkan bahwa selama periode 2022 hingga 2024, pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan fluktuasi antar wilayah. Pada tahun 2022, Kabupaten Ogan Komering Ilir mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 18,26 persen, disusul oleh Kabupaten Muara Enim sebesar 7,42 persen, dan Kabupaten Lahat sebesar 5,65 persen. Lonjakan pertumbuhan di Ogan Komering Ilir mencerminkan peningkatan signifikan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Pada tahun 2023, posisi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Muara Enim dengan pertumbuhan 7,32 persen, sementara Kabupaten Lahat kembali menempati posisi kedua dengan 5,43 persen, dan Kota Palembang berada di urutan ketiga dengan 4,33 persen. Kinerja positif Kota Palembang mengindikasikan stabilnya ekspansi sektor jasa dan perdagangan di ibu kota provinsi. Kemudian pada tahun 2024, Kabupaten Muara Enim tetap mencatat pertumbuhan tertinggi

sebesar 4,70 persen, diikuti oleh Kota Palembang sebesar 4,39 persen, serta Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebesar 4,16 persen. Data ini mencerminkan dinamika pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah yang dipengaruhi oleh kondisi sektoral, investasi, serta kebijakan pembangunan daerah masing-masing.

Tabel 1. 11 Laju Pertumbuhan PRDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2024 (%)

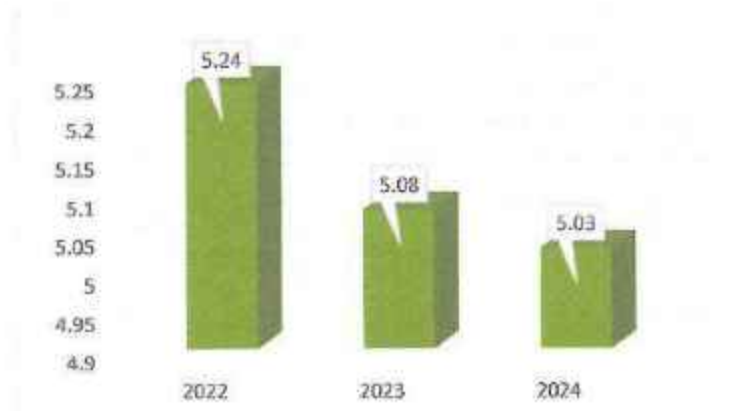
No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Ogan Komering Ulu	4,43	3,99	3,99
2.	Ogan Komering Ilir	18,26	3,98	3,88
3.	Muara Enim	7,42	7,32	4,70
4.	Lahat	5,65	5,43	3,87
5.	Musi Rawas	2,93	2,95	3,91
6.	Musi Banyuasin	2,96	3,25	3,73
7.	Banyuasin	3,85	3,64	3,76
8.	Ogan Komering Ulu Selatan	3,47	2,84	3,28
9.	Ogan Komering Ulu Timur	4,39	4,05	4,16
10.	Ogan Ilir	3,73	3,45	3,59
11.	Empat Lawang	3,83	3,18	3,40
12.	Penukal Abab Lematang Ilir	2,96	3,24	3,59
13.	Musi Rawas Utara	3,09	3,00	3,23
14.	Palembang	4,43	4,33	4,39
15.	Prabumulih	3,62	3,41	3,65
16.	Pagar Alam	3,82	3,35	4,09
17.	Lubuk Linggau	3,12	3,10	3,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

C. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 mengalami sedikit perlambatan dengan capaian sebesar 5,03 persen. Meskipun demikian, perekonomian daerah tetap menunjukkan dinamika yang cukup positif di tengah berbagai tantangan nasional dan global. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, terdapat tiga wilayah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap total PDRB provinsi. Ketiga wilayah tersebut adalah Kota Palembang dengan kontribusi

sebesar 30,75 persen, disusul oleh Kabupaten Muara Enim sebesar 17,24 persen, dan Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 13,69 persen. Sementara itu, dari sisi laju pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Muara Enim mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024 sebesar 4,70 persen, diikuti oleh Kota Palembang sebesar 4,39 persen, dan Kota Pagar Alam sebesar 4,09 persen. Data ini menunjukkan bahwa meskipun Kota Palembang menjadi pusat utama aktivitas ekonomi, wilayah lain seperti Muara Enim dan Pagar Alam juga memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Gambar 1. 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2022-2024 (%)

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren melambat, meskipun tetap berada pada tingkat yang stabil. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,24 persen, kemudian menurun menjadi 5,08 persen pada tahun 2023, dan kembali sedikit melambat menjadi 5,03 persen pada tahun 2024. Penurunan laju pertumbuhan ini mencerminkan tantangan struktural dan eksternal yang dihadapi oleh perekonomian daerah, termasuk fluktuasi harga komoditas unggulan,

dinamika ekonomi global, serta proses pemulihan pasca-pandemi. Kendati demikian, capaian tersebut masih tergolong positif karena mampu mempertahankan momentum pertumbuhan di atas angka lima persen secara konsisten. Stabilitas pertumbuhan ini menunjukkan adanya resiliensi dalam struktur ekonomi Sumatera Selatan. Ke depan, diperlukan strategi penguatan sektor produktif, diversifikasi ekonomi, dan peningkatan daya saing daerah agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

D. Pendapatan dan Belanja Daerah

Selama periode lima tahun terakhir (2020–2024), Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp9.278.520.060.062 dan meningkat menjadi Rp9.871.340.904.349 pada tahun 2023. Secara rata-rata, pertumbuhan pendapatan daerah mencapai 2,09 persen per tahun. Namun, peningkatan ini berlangsung relatif lambat dan belum cukup untuk menutup defisit anggaran yang terjadi pada tahun 2022–2023, yang sebagian besar ditutupi melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari tahun-tahun sebelumnya.

Lambatnya pertumbuhan pendapatan daerah dipengaruhi oleh sejumlah faktor ekonomi dan non-ekonomi. Dari sisi ekonomi, terdapat ketergantungan yang tinggi terhadap beberapa komoditas unggulan seperti batubara, karet, kelapa sawit, dan kopi, yang harganya sangat fluktuatif dan berdampak langsung terhadap pendapatan daerah. Selain itu, pelemahan ekonomi global akibat pandemi COVID-19 dan ketidakstabilan geopolitik turut menekan permintaan ekspor dari Sumatera Selatan. Gangguan rantai pasok dan kenaikan biaya logistik selama masa pandemi juga memperburuk kondisi sektor perdagangan dan industri. Faktor-faktor ini secara keseluruhan berkontribusi pada penurunan kinerja pendapatan,

sehingga menuntut upaya intensif dari pemerintah daerah untuk mencari dan mengembangkan alternatif sumber pembiayaan yang lebih berkelanjutan.

Pendapatan Daerah terbagi ke dalam tiga sumber utama, yakni: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Pendapatan Transfer; dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Komposisi ini mencerminkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri. Berdasarkan data pada Gambar 1.8 terlihat bahwa kontribusi terbesar terhadap total pendapatan daerah selama periode tersebut berasal dari Pendapatan Transfer, dengan rata-rata sebesar 53,73 persen. Posisi kedua ditempati oleh Pendapatan Asli Daerah yang menyumbang rata-rata 46,10 persen terhadap total pendapatan. Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan kontribusi yang relatif kecil, yaitu rata-rata sebesar 0,17 persen. Pola ini menunjukkan ketergantungan fiskal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang masih cukup tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat, meskipun kontribusi PAD menunjukkan tren yang cukup signifikan dalam mendukung pembiayaan daerah.

Tabel 1. 12 Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Uraian	Tahun					Pertumbuhan 2020-2023
	2020	2021	2022	2023	2024 Tm.II	
I. PENDAPATAN DAERAH	9.276.528.080.082	9.581.281.244.987	10.038.889.891.133	9.871.240.804.348	4.897.703.888.389	2.89
1. Pendapatan Asli Daerah	3.375.180.984.842	3.885.483.023.005	4.500.954.855.678	5.899.841.748.896	2.443.888.823.018	16.80
11. Pendapatan Pajak Daerah	2.589.000.584.700	2.503.785.543.246	4.481.187.455.808	4.849.348.674.255	2.072.482.405.207	14.58
12. Pendapatan Retribusi Daerah	8.224.557.900	9.063.748.908	12.485.165.718	12.182.254.858	3.784.570.177	16.95
13. Hasil Kelolaan Daerah Swadukhtan	87.805.002.370	10.714.883.898	153.031.867.987	223.888.947.895	157.787.289.487	38.00
14. Lain-lain PAD yang Sah	202.219.04.880	288.645.751.874	334.584.382.379	310.423.879.918	189.819.925.725	15.75
2. Pendapatan Transfer	5.876.888.342.638	5.712.683.072.712	5.088.093.688.928	4.697.618.488.087	2.244.228.778.382	-7.39
21. Transfer Pemerintah Pusat	5.833.674.893.308	5.712.883.812.712	5.029.733.447.388	4.697.618.488.087	2.244.228.778.382	-7.17
a. DBH-Pajak dan Subsidi Pajak	1.833.268.059.108	1.891.734.449.330	2.442.737.156.898	1.854.987.547.879	938.678.696.878	-4.87
b. DAK	1.568.807.605.000	1.563.304.287.000	1.563.304.287.000	1.563.785.688.000	1.092.189.484.600	1.06
c. BAK	200.785.883.552	220.594.259.567	188.888.569.077	18.644.244.658	241.787.544.935	8.36
d. SAM Non Pajak	2.000.888.948.888	2.007.882.978.884	854.588.888.888	887.578.247.000	0.00	-25.00
22. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	48.221.548.000	0.00	80.876.587.000	0.00	0.00	0.00
a. Dana Pembiayaan	48.221.548.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Dana Investasi Daerah	0.00	0.00	80.876.587.000	0.00	0.00	0.00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	22.522.732.882	33.146.138.870	15.997.059.928	3.582.688.678	0.00	-42.94
31. Pendapatan Hibah	28.887.400.882	33.146.138.870	15.997.059.928	3.582.688.678	0.00	-42.99
32. Pendapatan Lainnya	555.332.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. BELANJA	9.517.783.483.888	10.080.730.388.978	9.863.875.728.781	9.893.373.230.697	4.432.938.635.086	-0.47
1. Belanja Operasional	5.030.870.388.778	5.365.031.503.748	4.488.276.793.774	4.913.125.638.886	4.432.938.635.086	-0.84
11. Belanja Pegawai	1.171.524.387.208	1.813.283.548.742	2.082.571.888.939	2.188.888.753.483	2.473.838.814.511	8.39
12. Belanja Barang dan Jasa	1.042.780.532.982	1.811.856.739.487	2.043.735.882.382	2.587.730.032.086	1.173.580.425.788	48.18
13. Belanja Bunga	0.00	382.356.888	15.127.888.924	8.887.133.283	452.488.955.000	0.00
14. Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	2.148.781.933	0.00
15. Belanja Hibah	1.823.445.838.533	1.678.472.847.674	381.002.162.885	447.887.815.955	0.00	-27.93
16. Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00	285.684.424.784	0.00
17. Belanja Biaya Perjalanan	822.738.598	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Belanja Modal	1.884.708.767.364	1.838.834.14.822	1.638.270.414.095	1.238.943.154.689	427.163.992.967	-8.25
21. Belanja Tanah	14.587.488.000	70.851.405.827	8.728.743.995	174.783.908	219.589.988.478	-58.75
22. Belanja Peralatan/Mesin	181.882.978.287	286.874.883.888	242.844.382.542	383.575.584.880	235.877.433	28.15
23. Belanja Bangunan/Struktur	281.584.588.885	282.388.833.787	381.585.165.948	282.887.780.288	90.788.999.533	9.78
24. Belanja Jalan, Jembatan, Jalinan	824.300.071.588	1.027.388.888.888	742.807.388.888	541.778.478.884	24.081.25.784	-45.73
25. Belanja Aset Tetap Lainnya	53.785.783.885	82.888.888.888	15.483.945.780	85.948.483.883	157.251.70.888	7.04
26. Belanja Modal Aset Lainnya	215.887.588.487	0.00	0.00	958.888.888	144.883.238	-83.25
27. Belanja Modal RI/SD	12.388.483.848	0.00	0.00	0.00	582.288.972	0.00
28. Belanja Modal SD/SL	18.888.833.735	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Belanja Tidak Terdaftar	187.044.888.888	14.055.888.182	18.583.884.881	0.00	108.888.888.888	0.00
31. Belanja Tak Terdaftar	187.044.888.888	14.055.888.182	18.583.884.881	0.00	108.888.888.888	0.00
4. Belanja Transfer Bantuan Keuangan	2.607.288.350.222	2.044.888.548.846	2.608.374.74.680	3.588.384.838.852	1.421.122.847.383	10.18
41. Belanja Sub-Pajak ke Pem. Kabupaten/Lesa	1.455.835.833.833	1.578.375.832.884	1.814.584.334.445	2.778.182.758.571	882.578.884.008	14.45
42. Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Lesa	1.151.551.48.885	1.285.433.832.882	1.693.540.480.754	1.271.885.777.481	588.648.183.773	4.20
III. PENDAPATAN	998.083.782.388	701.888.888.423	254.251.758.030	708.780.874.843	774.888.184.887	8.38
1. Pendapatan Pembiayaan	474.877.888.888	615.188.881.423	161.894.023.885	322.795.034.885	154.888.887.480	-12.08
11. Pendapatan DIPA	345.284.370.470	171.583.374.583	78.783.848.488	322.795.034.885	0.00	-1.58
12. Pendapatan Penerimaan Daerah	129.593.518.418	483.595.188.183	10.880.034.070	0.00	0.00	0.00
2. Pengeluaran Pembiayaan	14.114.881.552	88.000.000.000	202.287.228.474	385.954.848.488	18.710.487.477	50.11
21. Pengeluaran Modal Daerah	14.114.881.552	88.000.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00
22. Pembiayaan Diklat Perekonomian	0.00	0.00	202.287.228.474	385.954.848.488	0.00	0.00
PENDAPATAN NETTO	368.882.879.234	620.189.888.423	-80.483.181.888	-80.189.888.423	136.000.178.833	-168.94
SISA LEBIH/KURANG PENDAPATAN	121.619.545.361	78.720.835.11	322.977.842.473	154.888.887.480	0.00	0.38

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Prov. Sumatera Selatan

2020-2024



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Prov. Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Gambar 1. 8 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan Provinsi Sumatera Selatan masih tergolong rendah dibandingkan dengan komponen Pendapatan Transfer. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti (a) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, (b) Dana Alokasi Umum (DAU), (c) Dana Alokasi Khusus (DAK), serta (d) Dana Insentif Daerah (DID). Ketergantungan ini menjadi tantangan bagi kepala daerah maupun pemerintahan untuk meningkatkan PAD melalui eksplorasi potensi sumber pendapatan baru guna mendorong pembangunan daerah yang lebih optimal.

Gambar 1.9 menunjukkan distribusi proporsi realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2020 hingga Triwulan II tahun 2024, yang mencakup empat kategori belanja: (i) Belanja Operasi, (ii) Belanja Modal, (iii) Belanja Tak Terduga, dan (iv) Belanja Transfer dalam bentuk Bantuan Keuangan. Dari data yang tersedia, Belanja Operasi tercatat sebagai komponen terbesar dalam total belanja daerah, dengan rata-rata kontribusi sebesar 54,90 persen. Selanjutnya, Belanja Transfer Bantuan

Keuangan menyumbang rata-rata 30,35 persen, diikuti oleh Belanja Modal dengan rata-rata 14,26 persen, dan terakhir Belanja Tak Terduga sebesar 0,48 persen selama periode tersebut.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Prov, Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

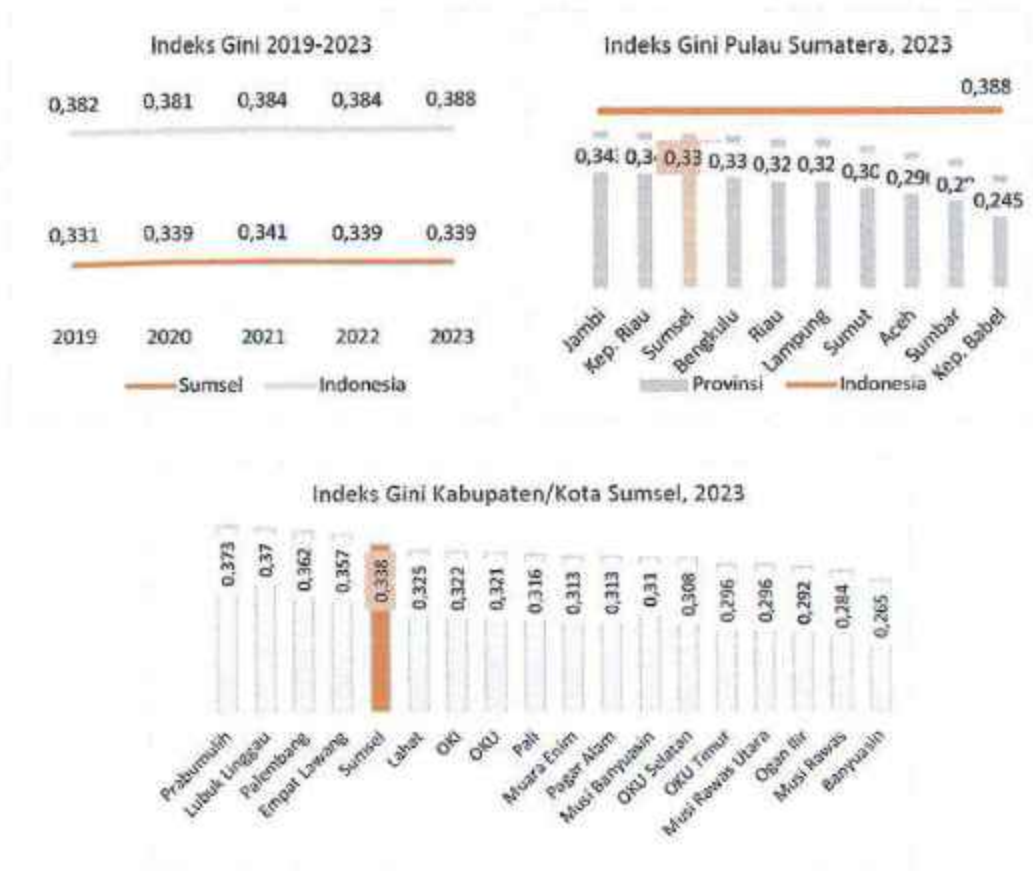
Gambar 1. 9 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera

E. Indeks Gini

Indeks Gini Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2019–2023 konsisten berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2019, Indeks Gini Sumatera Selatan tercatat sebesar 0,331 dan mengalami kenaikan menjadi 0,339 pada tahun 2023. Sementara itu, Indeks Gini nasional naik dari 0,382 pada tahun 2019 menjadi 0,388 pada tahun 2023. Peningkatan ketimpangan nasional tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan Indeks Gini di wilayah perkotaan yang meningkat dari 0,402 menjadi 0,409, sedangkan di perdesaan relatif stagnan pada angka 0,313. Secara umum, tren ketimpangan pendapatan baik di Sumatera Selatan maupun di tingkat nasional menunjukkan pola yang berfluktuasi sepanjang periode tersebut.

Jika dibandingkan antar kabupaten/kota pada tahun 2023, terdapat empat daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki

nilai Indeks Gini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, yaitu Kota Prabumulih (0,373), Kota Lubuklinggau (0,370), Kota Palembang (0,362), dan Kabupaten Empat Lawang (0,357). Sementara itu, nilai Indeks Gini Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar 0,338. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di keempat daerah tersebut masih relatif tinggi, atau dengan kata lain, tingkat pemerataan pendapatan belum tercapai secara optimal.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Gambar 1. 10 Indeks Gini Provinsi Sumatera Selatan

Sebaliknya, terdapat tiga belas kabupaten/kota lain yang memiliki nilai Indeks Gini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Nilai terendah tercatat di Kabupaten Banyuasin sebesar 0,265, yang mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di wilayah

tersebut lebih merata dibandingkan daerah lainnya. Keadaan ini didukung oleh struktur ekonomi yang lebih inklusif serta peran sektor pertanian yang dominan dalam melibatkan masyarakat secara luas pada kegiatan ekonomi. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Selatan menempati peringkat ketiga dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Pulau Sumatera, setelah Provinsi Jambi (0,343) dan Provinsi Kepulauan Riau (0,340). Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan semakin besar tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah.

F. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketika individu atau kelompok tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar guna mempertahankan kehidupan yang layak. Kebutuhan tersebut mencakup aspek pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap layanan sosial dan ekonomi. Dampak dari kemiskinan tidak hanya dirasakan pada tingkat individu, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial serta menghambat proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan lintas sektor agar penanganannya lebih efektif dan berkelanjutan.

Tabel 1. 13 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		Persentase (%)	
		2023	2024	2023	2024
1.	Ogan Komering Ulu	44,11	41,54	11,46	10,68
2.	Ogan Komering Ilir	114,48	106,37	13,15	12,08
3.	Muara Enim	73,24	66,42	10,93	9,79
4.	Lahat	63,36	60,19	15,00	14,14
5.	Musi Rawas	59,75	57,44	14,13	13,44
6.	Musi Banyuasin	101,63	88,94	14,90	12,88
7.	Banyuasin	85,88	84,36	9,58	9,31

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		Persentase (%)	
		2023	2024	2023	2024
8.	Ogan Komering Ulu Selatan	39,30	37,81	10,36	9,86
9.	Ogan Komering Ulu Timur	69,91	68,74	9,99	9,75
10.	Ogan Ilir	59,33	55,49	13,28	12,3
11.	Empat Lawang	30,78	28,42	11,80	10,78
12.	Penukal Abab Lematang Ilir	21,72	19,79	10,91	9,82
13.	Musi Rawas Utara	36,67	35,29	18,26	17,38
14.	Palembang	179,45	173,59	10,22	9,77
15.	Prabumulih	22,33	20,41	11,23	10,13
16.	Pagar Alam	12,73	11,82	8,88	8,18
17.	Lubuk Linggau	31,02	27,65	12,65	11,14
Sumatera Selatan		1.045,68	984,24	11,78	10,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan penurunan selama periode 2023–2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 tercatat sebesar 1.045,68 ribu jiwa atau 11,78 persen dari total populasi, dan menurun menjadi 984,24 ribu jiwa atau 10,97 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum. Dari sisi sebaran wilayah, jumlah penduduk miskin tertinggi pada tahun 2024 masih tercatat di Kota Palembang dengan 173,59 ribu jiwa (9,77 persen), diikuti oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 106,37 ribu jiwa (12,08 persen), dan Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 88,94 ribu jiwa (12,88 persen).

Kota Palembang mencatat angka absolut tertinggi, namun persentase penduduk miskin justru lebih tinggi di beberapa wilayah kabupaten. Secara umum, capaian penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Sumatera Selatan mengindikasikan arah kebijakan pengentasan kemiskinan yang cukup efektif, namun masih diperlukan perhatian khusus pada daerah dengan tingkat kerentanan

sosial ekonomi yang relatif tinggi, terutama di wilayah dengan persentase kemiskinan di atas rata-rata provinsi.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Gambar 1. 11 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Selama periode 2017 hingga 2024, Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan perbaikan signifikan dalam aspek kedalaman dan keparahan kemiskinan. Hal ini tercermin dari penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan yang menggambarkan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada tahun 2017, indeks ini berada di angka 2,40, kemudian mengalami penurunan bertahap hingga mencapai 1,45 pada tahun 2024. Demikian pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan yang mencerminkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini menurun dari 0,63 pada tahun 2017 menjadi 0,32 pada tahun 2024.

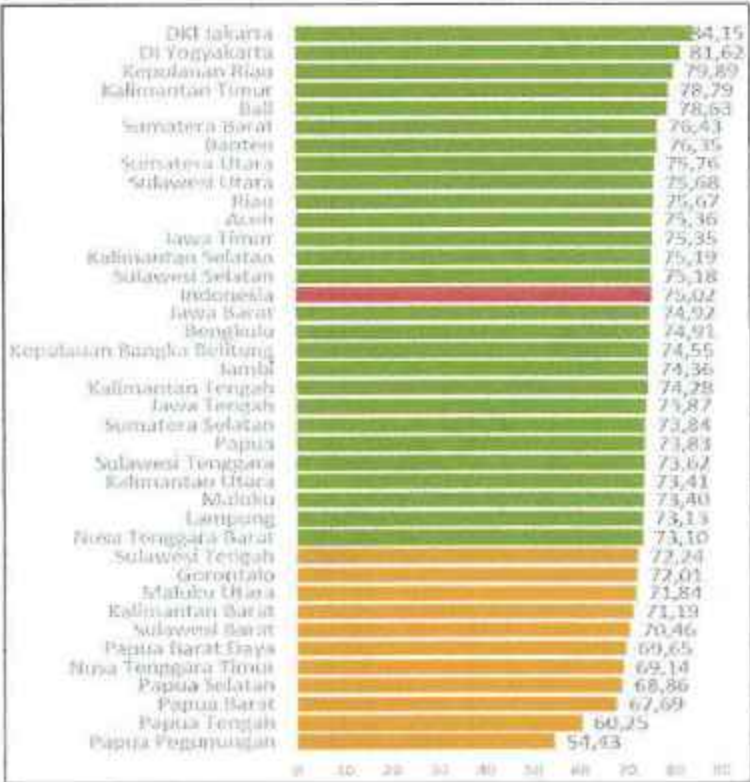
Penurunan kedua indikator ini menunjukkan bahwa tidak hanya jumlah penduduk miskin yang berkurang, tetapi juga kondisi kemiskinan itu sendiri semakin tidak ekstrem, baik dari sisi jarak terhadap garis kemiskinan maupun tingkat ketimpangan antarpenduduk miskin. Perbaikan indikator ini merupakan sinyal

positif bagi efektivitas program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah. Namun demikian, keberlanjutan dan perluasan cakupan program, khususnya bagi kelompok rentan, tetap menjadi kunci untuk mendorong pencapaian target pengurangan kemiskinan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

G. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran komposit yang digunakan untuk menilai kemampuan penduduk suatu wilayah dalam mengakses manfaat pembangunan di berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Indeks ini pertama kali diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan hingga kini secara rutin diterbitkan dalam Human Development Report setiap tahunnya.

IPM bertujuan menyajikan potret pembangunan manusia yang lebih menyeluruh dibandingkan pengukuran ekonomi semata, seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Terdapat tiga dimensi utama yang membentuk IPM dan saling berkaitan. Pertama, dimensi umur panjang dan hidup sehat, yang diukur melalui indikator harapan hidup saat lahir dan mencerminkan kondisi kesehatan serta akses terhadap layanan medis. Kedua, dimensi pendidikan, diukur dari rata-rata lama sekolah penduduk dewasa dan harapan lama sekolah anak-anak usia sekolah, yang menggambarkan kualitas dan keterjangkauan pendidikan. Ketiga, dimensi standar hidup yang layak, direpresentasikan oleh Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli, sebagai cerminan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses berbagai fasilitas penunjang kesejahteraan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Gambar 1. 12 Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2024

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan mencatat skor sebesar 73,84, menempatkannya pada peringkat ke-21 dari seluruh provinsi di Indonesia. Angka ini berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 75,02, namun masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Papua yang mencatat IPM sebesar 73,83, dan sedikit lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah yang memiliki IPM sebesar 73,87. Pencapaian ini mencerminkan kemajuan pembangunan manusia di Sumatera Selatan yang relatif stabil, namun masih menyisakan ruang untuk peningkatan, khususnya dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Dengan posisi yang cukup kompetitif di tingkat nasional, penguatan kebijakan pembangunan sumber daya manusia

menjadi kunci untuk mendorong kenaikan IPM secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah provinsi

Tabel 1. 14 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2024

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Ogan Komering Ulu	71,79	72,41	73,17	73,70
2.	Ogan Komering Ilir	69,33	70,17	70,80	71,48
3.	Muara Enim	70,95	71,52	72,33	73,10
4.	Lahat	70,62	71,45	72,15	72,83
5.	Musi Rawas	69,26	70,04	70,52	71,21
6.	Musi Banyuasin	70,25	70,73	71,30	72,27
7.	Banyuasin	69,15	69,95	70,67	71,55
8.	Ogan Komering Ulu Selatan	67,85	68,33	69,05	70,00
9.	Ogan Komering Ulu Timur	71,68	72,33	73,05	73,64
10.	Ogan Ilir	70,40	71,20	72,01	72,67
11.	Empat Lawang	67,77	68,39	69,07	69,63
12.	Penukal Abab Lematang Ilir	67,03	67,89	68,78	69,63
13.	Musi Rawas Utara	67,94	68,76	69,63	70,45
14.	Palembang	80,46	81,19	81,72	82,29
15.	Prabumulih	76,30	77,14	78,07	78,68
16.	Pagar Alam	71,47	72,40	73,25	74,00
17.	Lubuk Linggau	77,09	77,71	78,36	78,98
	Sumatera Selatan	71,83	72,48	73,18	73,84

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren peningkatan dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, IPM tercatat sebesar 71,83, meningkat menjadi 72,48 pada tahun 2022, 73,18 pada tahun 2023, dan mencapai 73,84 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Pada tahun 2024, Kota Palembang mencatat IPM tertinggi di provinsi ini, yaitu sebesar 82,29, diikuti oleh Kota Lubuk Linggau dengan 78,98, dan Kota Prabumulih sebesar 78,68. Sebaliknya, IPM terendah tercatat di Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yang keduanya memiliki skor IPM sebesar 69,63. Ketimpangan antarwilayah ini menandakan

perlunya intervensi kebijakan yang lebih terfokus pada wilayah-wilayah dengan capaian IPM rendah, agar pembangunan manusia dapat berlangsung secara lebih merata dan inklusif di seluruh Sumatera Selatan.

Potensi sumber daya alam dan ekonomi yang melimpah yang telah diuraikan pada Bab I ini, seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata, belum sepenuhnya diimbangi dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang optimal. Provinsi Sumatera Selatan memiliki kekayaan alam dan demografi yang besar, namun produktivitas dan nilai tambah dari potensi tersebut masih dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, untuk dapat mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, diperlukan suatu ekosistem riset dan inovasi yang kuat dan terarah. Bab II berikut ini akan menguraikan secara rinci kondisi aktual dari ekosistem riset dan inovasi di Provinsi Sumatera Selatan saat ini, yang menjadi fondasi bagi upaya pemajuan IPTEK daerah.

BAB II

GAMBARAN/KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

2.1 Kemampuan Daerah dalam Menghasilkan Kebijakan Berbasis Bukti

Pada bagian ini disajikan gambaran mengenai kapasitas aktual Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada data, informasi, dan analisis ilmiah. Bagian ini mengevaluasi sejauh mana proses perumusan kebijakan telah ditopang oleh aktivitas riset, ketersediaan data yang valid dan andal, serta kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam analisis kebijakan. Evaluasi tersebut turut mencakup fungsi kelembagaan, mekanisme koordinasi, serta pemanfaatan instrumen kajian yang menjadi prasyarat bagi penerapan kebijakan berbasis bukti secara konsisten.

Sub bab ini juga memetakan faktor-faktor pendukung yang memengaruhi kemampuan daerah dalam menghasilkan Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence Based Policy/EBP*), sekaligus mengidentifikasi dua output utama yang perlu dipersiapkan. Pemahaman terhadap kondisi awal ini menjadi landasan strategis dalam upaya penguatan kapasitas riset dan inovasi daerah terkait penerapan EBP. Selain itu, bagian ini juga menyajikan kondisi aktual mengenai kapasitas daerah dalam menghasilkan rekomendasi EBP serta kinerja inovasi selama lima tahun terakhir. Kondisi tersebut diukur melalui jumlah rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan dan dimanfaatkan, capaian inovasi pada aspek tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta berbagai bentuk inovasi yang berkembang di masyarakat, termasuk nilai Indeks Inovasi Daerah (IID). Pemaparan indikator-indikator tersebut memberikan gambaran empiris mengenai tingkat kemampuan riset dan inovasi Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya menjadi dasar bagi

perumusan kebutuhan penguatan pada periode perencanaan berikutnya.

Tabel 2. 1 Kondisi Saat ini Kemampuan Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (*evidence based policy*)

No	Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi Saat Ini	Keterangan
A. Faktor Pendukung dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (EBP)			
1.	Sumber daya manusia Iptek daerah	Masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas SDM di bidang Iptek, terlihat dari adanya program pengembangan talenta digital.	Upaya peningkatan SDM Iptek melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan program pelatihan terus dilakukan.
2.	Fasilitas pendukung dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan dan inovasi daerah	Fasilitas riset dan inovasi daerah didukung oleh kelembagaan Iptek yang sudah melembaga.	Pemerintah daerah terus mendorong fasilitas pendukung ini melalui berbagai inisiatif.
3.	Anggaran riset dan inovasi daerah	Anggaran riset dan inovasi daerah dibebankan pada APBD dan sumber dana lain yang sah. Rincian spesifik jumlah anggaran bervariasi setiap tahunnya.	Pendanaan penyelenggaraan inovasi daerah bersumber dari APBD dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
4.	Program-program riset dan inovasi daerah yang pernah dilaksanakan	Pada tahun 2025, terdapat program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang telah dilaksanakan setiap tahunnya dan tahun 2026 terdapat penambahan program baru yaitu Program Riset dan Inovasi	Implementasi kebijakan inovasi daerah di Sumatera Selatan pada tahun 2022 Meraih skor IID 79,47 sebagai Peringkat 1 Tingkat Nasional sebagai Provinsi Sangat Inovatif, tahun 2023 terjadi peningkatan skor IID menjadi 84,79 dan kembali diakui sebagai Peringkat 1 Tingkat Nasional sebagai Provinsi Sangat Inovatif, tahun 2024 masuk dalam 5 besar tingkat Nasional dan mempertahankan predikat Provinsi Sangat Inovatif dengan skor IID 75,79.

No	Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi Saat Ini	Keterangan
5.	Kelembagaan Iptek di daerah	Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan Penghargaan Innovative Government Award (IGA) tahun 2020-2025 sebagai Provinsi Terinovatif Tingkat Nasional	Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) berperan penting dalam pelaksanaan inovasi daerah.
6.	Jejaring Riset dan Inovasi Daerah (kerjasama dengan mitra)	Inovasi daerah di Sumatera Selatan didorong melalui kolaborasi model Pentahelix yang melibatkan akademisi, pebisnis, pemerintah, komunitas, dan media (ABGCM).	Kerjasama dengan mitra, termasuk perguruan tinggi, dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan pengembangan Iptek.
B. Kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (EBP)			
1.	Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dihasilkan 5 tahun terakhir	Dalam lima tahun terakhir, kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti masih tergolong rendah, dengan total 2 rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun 2024 dan 2025. Kedua rekomendasi tersebut berbentuk naskah akademik rancangan peraturan daerah, yaitu terkait perubahan susunan perangkat daerah dan kebijakan riset dan inovasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik <i>evidence based policy</i> belum berjalan secara konsisten dan masih terbatas pada isu-isu tertentu, sehingga pemanfaatan kajian berbasis data sebagai dasar perumusan kebijakan daerah belum optimal dan belum berkelanjutan	- Tahun 2024: Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan - Tahun 2025: Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi
2.	Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dimanfaatkan 5 tahun terakhir	Dalam lima tahun terakhir, pemanfaatan rekomendasi kebijakan berbasis bukti masih terbatas, dengan 2 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti menjadi produk hukum daerah pada tahun 2024 dan 2025. Rekomendasi tersebut telah dimanfaatkan secara formal melalui penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan	Tahun 2024: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No	Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi Saat Ini	Keterangan
		susunan perangkat daerah serta Peraturan Daerah tentang riset dan inovasi. Meskipun menunjukkan adanya keterhubungan antara kajian berbasis bukti dan keputusan kebijakan, tingkat pemanfaatannya masih belum konsisten dan belum mencerminkan praktik <i>evidence based policy</i> yang kuat dan berkelanjutan dalam proses perumusan kebijakan daerah.	▪ Tahun 2025: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Riset dan Inovasi
3.	Jumlah inovasi tata kelola pemerintahan daerah 5 tahun terakhir	Dalam lima tahun terakhir, jumlah inovasi tata kelola pemerintahan daerah yang dihasilkan mencapai 152 inovasi, sebagaimana tercatat dalam Aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID), Innovative Government Award (IGA) Kementerian Dalam Negeri, serta paparan Gubernur. Capaian ini menunjukkan tingkat aktivitas inovasi yang cukup tinggi, namun masih berfluktuasi antar tahun, dengan penurunan pada 2023 dan lonjakan signifikan pada 2024. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengembangan inovasi tata kelola belum sepenuhnya berjalan stabil dan berkelanjutan, serta masih dipengaruhi oleh dinamika program dan dorongan administratif tahunan.	• Tahun 2021: 28 • Tahun 2022: 28 • Tahun 2023: 18 • Tahun 2024: 48 • Tahun 2025: 30 Jumlah Total: 152
4.	Jumlah inovasi pelayanan publik; 5 tahun terakhir	Dalam lima tahun terakhir, jumlah inovasi pelayanan publik yang dihasilkan mencapai 514 inovasi, berdasarkan pelaporan pada Aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID), Innovative Government Award (IGA) Kementerian Dalam Negeri, serta paparan Gubernur. Meskipun secara kumulatif menunjukkan tingkat aktivitas inovasi yang tinggi, jumlah inovasi cenderung	• Tahun 2021: 123 • Tahun 2022: 123 • Tahun 2023: 104 • Tahun 2024: 91 • Tahun 2025: 73 Jumlah Total: 514

No	Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi Saat Ini	Keterangan
		menurun dari tahun ke tahun, terutama sejak 2023 hingga 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan dan konsistensi pengembangan inovasi pelayanan publik masih menjadi tantangan, serta memerlukan penguatan strategi agar inovasi tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak nyata.	
5.	Jumlah inovasi daerah lainnya (termasuk inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat), 5 tahun terakhir	Dalam lima tahun terakhir, jumlah inovasi daerah lainnya termasuk inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat mencapai 514 inovasi, sebagaimana tercatat dalam Aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID), Innovative Government Award (IGA), serta paparan Gubernur. Capaian ini menunjukkan partisipasi dan aktivitas inovasi yang cukup tinggi, namun trennya cenderung menurun sejak 2024 setelah relatif stabil pada periode 2021-2023. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberlanjutan inovasi non-pemerintah dan inovasi berbasis masyarakat masih menghadapi tantangan, serta memerlukan penguatan ekosistem dan dukungan agar inovasi dapat berkembang secara konsisten dan berkelanjutan.	• Tahun 2021: 116 • Tahun 2022: 116 • Tahun 2023: 118 • Tahun 2024: 81 • Tahun 2025: 83 Jumlah Total: 514
6.	Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) 5 tahun terakhir (termasuk predikat)	Dalam lima tahun terakhir, Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) secara konsisten berada pada predikat Sangat Inovatif, dengan rentang nilai antara 75,79 hingga 83,28. Capaian ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan inovasi daerah. Namun, fluktuasi nilai antar tahun terutama penurunan pada 2024 sebelum kembali	• Nilai 2021: 79,51 (Sangat Inovatif) • Nilai 2022: 79,47 (Sangat Inovatif) • Nilai 2023: 83,28 (Sangat Inovatif) • Nilai 2024: 75,79 (Sangat Inovatif) • Nilai 2025: 81,23 (Sangat Inovatif)

No	Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi Saat Ini	Keterangan
		meningkat pada 2025 mengindikasikan bahwa kualitas dan kinerja inovasi belum sepenuhnya stabil. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan konsistensi dan keberlanjutan inovasi agar capaian "Sangat Inovatif" dapat dipertahankan secara berkelanjutan dan merata.	

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di wilayah selatan Pulau Sumatera yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional, khususnya di kawasan barat Indonesia. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Palembang, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan. Secara geografis, Provinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan beberapa provinsi yang meliputi Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 17 daerah otonom, yang meliputi 13 kabupaten dan 4 kota.

Pembentukan Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan, yang diundangkan pada tanggal 4 Mei 2023. Undang-undang ini mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950" serta Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Di Sumatera.

2.2 Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Saat Ini pada Tema Prioritas (100.000 Sultan Muda Sumsel)

Kondisi saat ini ekosistem riset dan inovasi berdasarkan tema prioritas Provinsi Sumatera Selatan yang dianalisis dengan menggunakan 6 elemen berikut ini:

1.) Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah

Kebijakan di bidang riset dan inovasi perlu diarahkan pada desentralisasi, sehingga daerah memiliki keleluasaan dalam merancang strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Upaya ini harus didukung melalui sinergi antara dunia akademik, sektor swasta, dan pemerintah, dengan dukungan regulasi yang kondusif serta insentif yang mendorong kontribusi para peneliti dan inovator daerah. Selain itu, penting untuk menjamin ketersediaan sumber daya yang mencakup pendanaan riset dan tenaga ahli yang kompeten demi memperkuat penelitian yang relevan dengan isu-isu lokal. Infrastruktur riset yang memadai menjadi elemen kunci dalam mempercepat perkembangan inovasi. Pendirian pusat riset di daerah, laboratorium inovasi, serta inkubator bisnis akan menjadi wadah untuk menciptakan solusi praktis dari hasil riset. Di sisi lain, infrastruktur digital yang mumpuni juga diperlukan guna mendukung kolaborasi serta keterhubungan dengan informasi global. Dengan tersedianya fasilitas riset yang modern dan selaras dengan kebutuhan daerah, produktivitas penelitian akan meningkat dan mendorong inovasi berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan daerah.

2.) Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

Kapasitas kelembagaan serta dukungan terhadap riset dan inovasi dalam Peta Jalan Pemajuan Riset daerah mencakup penguatan peran lembaga penelitian lokal, perguruan tinggi, dan instansi pemerintah daerah sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini mencakup peningkatan

kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi bagi peneliti dan tenaga profesional. Dukungan terhadap riset juga ditunjang oleh penyediaan anggaran yang memadai, penguatan jejaring kerja sama antara lembaga riset, pelaku industri, dan pemerintah, serta kemudahan akses terhadap sarana teknologi dan infrastruktur modern. Lembaga-lembaga tersebut dituntut memiliki kapasitas dalam mengelola, mengarahkan, dan mengembangkan kegiatan riset yang inovatif serta mampu membawa hasil riset ke tahap komersialisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di daerah.

3.) Kemitraan Riset dan Inovasi

Kemitraan dalam riset dan inovasi merupakan bagian penting dari Peta Jalan Pemajuan Riset daerah untuk meningkatkan daya saing melalui sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, sektor industri, dan masyarakat. Kolaborasi ini dapat diwujudkan dengan mendorong kerja sama antara universitas, lembaga penelitian, dan pelaku usaha guna menghasilkan riset terapan yang relevan dengan kebutuhan lokal. Pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai penghubung antar pihak, termasuk dalam menyediakan insentif bagi kegiatan riset bersama serta mengajak masyarakat untuk terlibat dalam inovasi berbasis komunitas. Selain itu, pembentukan konsorsium riset yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat mempercepat proses alih teknologi, penciptaan produk baru yang inovatif, dan mendorong pemanfaatan hasil riset secara luas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah.

4.) Budaya Riset dan Inovasi

Penguatan budaya riset dan inovasi di daerah perlu dilakukan secara sistematis melalui berbagai tahapan, mulai dari dunia pendidikan hingga keterlibatan masyarakat luas. Pemerintah daerah bersama lembaga pendidikan memiliki peran penting

dalam menumbuhkan kesadaran akan riset dan inovasi sebagai solusi atas permasalahan lokal. Hal ini dapat diwujudkan melalui integrasi riset ke dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi, pemberian apresiasi bagi inovator lokal, serta penciptaan ekosistem yang mendukung kreativitas dan pemecahan masalah. Budaya riset ini juga membutuhkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan, mampu mendorong kolaborasi lintas sektor, dan memberi ruang bagi tumbuhnya ide-ide baru. Dengan cara ini, masyarakat akan lebih siap menghadapi perubahan dan terlibat aktif dalam riset yang berdampak pada pembangunan daerah yang berkelanjutan.

5.) Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah

Keselarasan riset dan inovasi di tingkat daerah merupakan upaya membangun sinergi antara dunia pendidikan, pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem riset yang saling terhubung dan berkelanjutan. Tujuannya adalah memastikan agenda riset sejalan dengan kebutuhan lokal melalui koordinasi yang kuat antar universitas, lembaga penelitian, dan pemerintah daerah. Penyusunan prioritas riset yang sesuai dengan tantangan dan potensi wilayah menjadi langkah penting agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan secara nyata di berbagai sektor. Selain itu, penyelarasan antara riset dan kebutuhan dunia usaha maupun masyarakat akan mendorong lahirnya inovasi yang aplikatif dan solutif. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam menyediakan arah kebijakan yang mendukung kolaborasi, sekaligus memperkuat kemitraan lintas sektor guna mendorong riset yang relevan dan berdampak langsung bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan daerah.

6.) Penyelarasan Dengan Perkembangan Global

Menyesuaikan arah pemajuan riset daerah dengan perkembangan global menjadi krusial agar daerah tidak tertinggal

dalam hal inovasi dan teknologi. Daerah perlu secara aktif mengikuti tren riset dunia dengan mengadaptasi prioritas lokal pada isu-isu penting seperti perubahan iklim, digitalisasi, kesehatan, dan energi terbarukan. Pemerintah daerah sebaiknya membuka kesempatan bekerja sama dengan lembaga riset luar negeri, memfasilitasi akses ke jaringan global, serta mendorong penerapan teknologi dan metode riset terbaru. Selain itu, penguatan kapasitas peneliti lokal melalui pelatihan dan program pertukaran juga penting.

Tabel 2. 2 Kondisi Saat ini Kerangka Ekosistem Riset dan Inovasi Berdasarkan Tema Prioritas 100.000 Sultan Muda Sumsel

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
1.	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Kebijakan dapat berupa Perda, Perkada/Perbup, dan sebagainya.	(a) Berikan gambaran, apakah (saat ini) ada kebijakan yang menghambat dan atau mendukung Pengembangan kewirausahaan di Sumsel ? (b) Apakah sampai 5 tahun ke depan diperlukan kebijakan baru (berupa Perda atau Pergub atau peraturan jenis lain) untuk Pengembangan kewirausahaan di Sumsel?	Dinas Koperasi dan UKM	(a) Sudah terdapat beberapa kebijakan daerah yang mendukung pengembangan kewirausahaan, Namun, implementasinya masih menghadapi kendala pada aspek koordinasi lintas sektor dan keterbatasan anggaran pembinaan. (b) Belum ada regulasi khusus yang mengatur ekosistem kewirausahaan secara menyeluruh di tingkat provinsi.	Fasilitas halal dan legalitas lainnya
			Dinas Perdagangan	(a) Belum ada kebijakan yang mengatur pengembangan kewirausahaan (b) Belum ada Perda atau Pergub tentang pengembangan kewirausahaan	
			Dinas Perindustrian	(a) Belum ada kebijakan yang mendukung pengembangan kewirausahaan (b) Ya, perlunya Perda atau Pergub atau peraturan jenis lain untuk pengembangan kewirausahaan di Sumsel	
			Dinas Penanaman Modal dan	(a) Terdapat kebijakan yang mendukung riset dalam aspek	Program pengembangan iklim penanaman modal

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel					
(1)	(2)	(3)	Responden/OPD (4)	Kondisi Saat Ini (2025) (5)	Keterangan (6)
			Pelayanan Terpadu Satu Pintu	komoditas unggul setiap daerah untuk dibuat dalam bentuk kajian sampai pada peluang investasi yang siap dijual (b) Perlunya peraturan mengenai komoditas unggulan / potensi unggulan setiap kabupaten/kota.	
			BRIDA	(a) Sudah ada kebijakan yang mendukung pengembangan kewirausahaan, namun implementasinya belum optimal (b) Iya, diperlukan kebijakan baru baik pergub maupun perda yang secara eksplisit mendukung pengembangan kewirausahaan khususnya terkait program 100.000 Sultan Muda	
			Bappeda	(a) Sudah ada kebijakan yang mendukung Pengembangan kewirausahaan di Sumsel (b) Perlu	1. Peraturan Daerah Prov Sumsel Nomor 2 Tahun 2025 Tanggal 29 Agustus 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Prov Sumsel Tahun 2025-2029 2. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 275/KPTS/DISKOP/UKM/2025 Tanggal 16 Mei 2025 tentang

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel					
(1)	(2)	(3)	Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Keterangan
			(4)	(5)	(6)
					Pembentukan Tim Pelaksana Program Kerja Gubernur Sumatera Selatan Mencetak Sultan Wirausaha Muda Sumatera Selatan
		Apakah ada kebijakan (misalnya perda, pergub, keputusan OPD, dsb) yang mendukung Bantuan Operasional Desa/Kelurahan di Sumsel?	Bappeda	Sudah ada kebijakan yang mendukung untuk mengatasi permasalahan terbatasnya kemampuan keuangan kabupaten/kota /desa saat ini yaitu melalui kebijakan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 3 Tahun 2022 tanggal 3 Maret 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa
			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sudah ada Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Bantuan Operasional Desa/Kelurahan di Sumsel	Belum ada revisi terhadap Pergub tersebut.
2.	Penataan basis data Riset dan Inovasi	(a) Apakah tersedia basis data yang mendukung Pengembangan kewirausahaan di Propinsi Sumsel (b) Kalau tersedia, dalam bentuk apa basis data tsb (manual/form, tercatat dalam Excel, dsb). (c) Apakah data tsb sudah dalam bentuk digital dan terhubung dengan Satu Data Indonesia?	Dinas Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian Bappeda	(a) Ada (b) Excel (c) Belum (a) Belum tersedia (b) Data yang dimiliki adalah data industri kecil menengah yang menggambarkan jumlah unit usaha, tenaga kerja, dan investasi. (manual, form excel) (c) Masih data manual belum terhubung dengan SDI (a) Tidak ada data khusus terkait list kewirausahaan yang dikeluarkan oleh Bappeda, namun pada RPJMD Prov Sumsel Tahun 2025-2029	SIDT dan pendataan Sultan Muda melalui link di website sultan muda

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel					
(1)	(2)	(3)	Responden/OPD (4)	Kondisi Saat Ini (2025) (5)	Keterangan (6)
				sudah diakomodir terkait target rasio kewirausahaan yang harus dicapai oleh Prov Sumsel. (b) Tidak tersedia (c) Belum	
			BRIDA	(a) Sudah ada basis data namun pemanfaatannya masih kurang maksimal (b) Iya, tersedia dalam bentuk excel (c) Data belum terhubung atau terintegrasi dengan Satu Data Indonesia	
		(a) Apakah tersedia basis data yang mendukung kebijakan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan? (b) Kalau tersedia, dalam bentuk apa basis data tsb (manual/form, tercatat dalam Excel, dsb).	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bappeda	(a) Tersedia, tetapi aplikasi masih dalam proses (b) Form Excel (a) Tidak ada (b) Tidak ada	Sudah ada dalam bentuk form manual
3.	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	(a) Apakah di setiap kabupaten/kota di Propinsi Sumsel tersedia infrastruktur berikut: pusat inovasi, inkubator, creative center, kawasan sains dan teknologi (KST),	BRIDA	(a) Sudah tersedia infrastruktur berupa pusat inovasi, inkubator dan lainnya, namun belum merata di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (b) Sebagian berfungsi dengan optimal, namun sebagian lagi pemanfaatannya belum efektif	

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel					
(1)	(2)	(3)	Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Keterangan
		ruang publik kreatif (RPK), PLUT, dsb ? (b) Bagaimana keberfungsian dari infrastruktur (di atas) yang tersedia di setiap Kabupaten/kota? (c) Bagaimana kondisi RTH (ruang terbuka hijau) di setiap kabupaten/kota: jumlah, lokasi, keberfungsian, dan apakah mungkin dikembangkan menjadi RPK (RTH yang dilengkapi WiFi, sarana pertemuan, dan kelengkapan pengelola)?	Dinas Koperasi dan UKM	(c) Kondisi RTH sebagian terawat, namun sebagian lagi cenderung kurang terawat atau terjaga (a) Sudah terbentuk Inkubator bisnis di setiap kabupaten.kota melalui Dinas Koperasi & UKM. (b) Tetapi karena keterbatasan SDM maka lembaga tsb sebagian besar tidak berjalan. (c) -	Si Bice di Dinas Koperasi & UKM Sumsel
			Dinas Perindustrian	(a) Belum tersedia (b) - (c) -	
			Bappeda	(a) Tidak tersedia (b) Tidak tersedia (c) Tidak tersedia	
4.	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	(a) Apakah tersedia skema anggaran khusus untuk penumbuh kembangan kewirausahaan ? (b) Apakah ada upaya mencari sumber-sumber pendanaan non APBD provinsi Sumsel (dana CSR, APBD provinsi, APBN, sumber lain) untuk mendukung	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bappeda Dinas Koperasi dan UKM	(a) Tidak ada (b) Tidak ada (a) Tidak tersedia (b) Tidak ada (a) Ada tapi belum maksimal (b) Ada dengan pihak terkait seperti lembaga keuangan non perbankan dan lembaga pelatihan kerja	(a) Entrepreneur Goes To Campus atau go to school (b) Entrepreneur Goes To Campus di Universitas PGRI tanpa anggaran tetapi bisa terlaksana kolaborasi dengan beberapa stakeholder seperti Pegadaian, Palembang

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel					
(1)	(2)	(3)	Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Keterangan
		Pengembangan kewirausahaan ?		(5)	(6)
			Dinas Perindustrian	(a) Tersedia (b) APEN	Training Center dan Perusahaan Produk
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(a) Lebih kepada kerjasama/pembinaan UMKM melalui sistem OSS REA (b) Sebagian kecil melalui sub kegiatan kewirausahaan	
			BRIDA	(a) Belum tersedia anggaran khusus untuk pengembangan kewirausahaan (b) Ada, melalui program CSR baik dari perusahaan BUMN, BUMD, maupun swasta	
			Biro Perekonomian	(a) Tidak tersedia anggaran khusus untuk bidang kewirausahaan (b) Melakukan pembinaan terhadap BUMD untuk menyalurkan sebagian dana CSR kepada UMKM	
5.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Apakah saat ini ada kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan pengembangan kewirausahaan di Propinsi Sumsel ?	Dinas Koperasi dan UKM	Ada tapi belum maksimal. Beberapa kegiatan inventarisasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (merk, hak cipta, paten, Kekayaan Intelektual Komunal/ KIK, indikasi geografis, dsb.) sedang dan rutin dilakukan di Sumatera Selatan, khususnya oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan bersama	SIDT (Sistem Informasi Data Tungga)

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel					
(1)	(2)	(3)	Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Keterangan
			(4)	(5)	(6)
				perangkat daerah dan mitra (Dekranasda, Dinas Koperasi/UKM, perguruan tinggi, dsb.)	
			Dinas Perindustrian	Sudah pernah dilakukan fasilitasi terkait pendaftaran merk dagang tahun 2019. Untuk saat ini hanya pendampingan untuk NIB, PIRT.	
			BRIDA	Sudah ada kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual	
			Bappeda	Tidak ada	
			Dinas Perdagangan	Sudah terdapat Program/Kegiatan/Sub Kegiatan terkait dengan Pengembangan Kewirausahaan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
II Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi					
6.	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	(a) Bagaimana kondisi/ kesiapan BRIDA atau OPD lain di Sumsel dalam mendukung Pengembangan kewirausahaan (anggaran, SDM, kemampuan melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait dengan riset dan inovasi)? (b) Apakah BRIDA atau OPD lain melakukan kerjasama dengan	BRIDA	(a) BRIDA siap mendukung penuh pengembangan kewirausahaan melalui kebijakan yang berlaku atau berdasarkan kajian perencanaan (b) BRIDA bekerjasama dengan pihak akademisi perguruan tinggi dan BRIN dalam rangka pengembangan kewirausahaan	1. RPJPD Prov Sumsel 2025-2045; 2. RPJMD Prov Sumsel 2025-2029
			Bappeda	(a) Bappeda mendukung pengembangan kewirausahaan melalui perencanaan yang tertuang	

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		BRIN / swasta / perguruan tinggi, khususnya dalam rangka pengembangan kewirausahaan untuk menghasilkan 100.000 pengusaha muda ?		didalam dokumen perencanaan daerah (b) Bappeda bekerjasama dengan akademisi melalui FGD, penyusunan kajian, buku Saku Investasi, Perdagangan, Industri dan Pariwisata	
			Dinas Koperasi dan UKM	(a) Dinas Koperasi & UKM mendukung pengembangan kewirausahaan terkait dengan riset dan inovasi (b) Literasi dan edukasi untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur muda	(a) Mitra riset dengan komunitas Kopi dan Polsri (b) Entrepreneur Goes to Campus
			Dinas Perindustrian	(a) - (b) Ya	
			Dinas Pendidikan	(a) Dinas Pendidikan melalui Pendidikan Vokasi melaksanakan kegiatan kewirausahaan bagi siswa SMK (b) Dinas Pendidikan melalui pendidikan vokasi memiliki bursa kerja khusus (BKK) di 17 Kabupaten / Kota (c) Dinas Pendidikan melalui pendidikan vokasi memiliki kerjasama dengan industri	(a) Kegiatan Vokasi baru 1 kegiatan saja dalam 1 tahun (b) Sudah memiliki 291 SMK yang memiliki BKK (c) Ada 24 SMK yang menjalin kerjasama dengan industri
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(a) Disnakertrans memiliki UPTD BLKPPKT yang melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi	Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel					
(1)	(2)	(3)	Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Keterangan
			(4)	(5)	(6)
7.	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Apakah di Propinsi Sumsel saat ini tersedia sarana pendukung (misalnya website, media koordinasi, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pencapaian 100.000 Sultan Muda ?	BRIDA	(b) Disnakertrans belum melakukan kerjasama dengan BRIN/Swasta /PT untuk pengembangan kewirausahaan	
			Bappeda	Belum ada	
			Dinas Koperasi dan UKM	Belum ada	
			Dinas Perindustrian	Belum	
		Apakah di Propinsi Sumsel saat ini tersedia sarana pendukung (misalnya website, media koordinasi, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka Bantuan Operasional Desa/Kelurahan?	BRIDA	Sudah ada sarana pendukung (misalnya website, media koordinasi, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka Bantuan Operasional Desa/Kelurahan, namun pelaksanaannya belum optimal	
			Bappeda	Belum ada	
			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tersedia, tetapi Aplikasi masih dalam on proses	Sudah ada dalam bentuk form manual
III	Kemitraan Riset dan Inovasi				
8.	Peningkatan difusi inovasi	Apakah Propinsi Sumsel melakukan transfer teknologi khususnya dalam Pengembangan/	BRIDA	Sudah ada, namun transfer teknologi khusus dalam pengembangan kewirausahaan masih terbatas	

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel				
(1)	(2)	(3)	Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)
		penumbuhan kewirausahaan di kabupaten/kota?	Bappeda	Sudah dilakukan oleh OPD terkait
			Dinas Koperasi dan UKM	Iya
			Dinas Perindustrian	Belum
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Disakertrans belum melakukan transfer teknologi khususnya dalam Pengembangan/penumbuhan kewirausahaan di Kab/Kota
9.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Risetdan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Apakah Propinsi Sumsel memiliki kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/ inovasi bagi pelaku usaha di setiap kabupaten/kota?	BRIDA	Sudah pernah dilakukan kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/ inovasi bagi pelaku usaha di setiap kabupaten/kota, namun dampaknya belum signifikan
			Bappeda	Tidak ada
			Dinas Koperasi dan UKM	Belum ada
			Dinas Perindustrian	Belum
		Apakah Propinsi Sumsel memiliki kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset tentang Bantuan Operasional Desa/Kelurahan di setiap kabupaten/kota?	BRIDA	Sudah pernah dilakukan kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset tentang Bantuan Operasional, namun masih terbatas dan belum merata
			Bappeda	Tidak ada
			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tidak ada
IV	Budaya Riset dan Inovasi			
				Mitra riset dengan Komunitas Kopi dan Polsri

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel					
(1)	(2)	(3)	Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Keterangan
			(4)	(5)	(6)
10.	Promosi dan kampanye inovasi	Apakah di Propinsi Sumsel pernah diselenggarakan promosi dan kampanye tentang program 100.000 Sultan Muda ?	BRIDA	Sudah pernah diselenggarakannya promosi dan kampanye melalui sosialisasi 12 program strategis kepala daerah, namun belum ada promosi secara khusus tentang 100.000 sultan muda sumsel	
		Apakah di Propinsi Sumsel pernah diselenggarakan promosi dan kampanye tentang Promosi Usaha Kecil dan Menengah Para Wirausaha Muda Sumatera Selatan?	Dinas Koperasi dan UKM Dinas Pemuda dan Olahraga	Sudah ada Melaksanakan pelatihan kewirausahaan pemuda di Kabupaten/Kota	Entrepreneur Goes to Campus dan Website serta lg Sultan Muda Program Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
			BRIDA	Sudah pernah diselenggarakan promosi dan kampanye tentang Promosi Usaha Kecil dan Menengah Para Wirausaha Muda Sumatera Selatan	
		Apakah di Propinsi Sumsel pernah	BRIDA	Belum pernah diselenggarakannya promosi dan	

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel					
(1)	(2)	(3)	Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Keterangan
			(4)	(5)	(6)
		diselenggarakan promosi dan kampanye tentang Bantuan Operasional Desa/Kelurahan ?		kampanye tentang Bantuan Operasional Desa/Kelurahan	
11.	Apresiasi prestasi inovasi	Apakah di Propinsi Sumsel pernah diselenggarakan lomba inovasi? Apakah lomba inovasi tersebut dapat diarahkan untuk mendukung Pengembangan 100.000 Sultan Muda ?	BRIDA Dinas Koperasi dan UKM	Belum pernah menyelenggarakan secara khusus terkait lomba inovasi dalam mendukung 100.000 sultan muda sumsel Ada	UMKM Award, 24-25 November 2025
		Apakah ada penyelenggaraan innovation award tentang inovasi pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan?	BRIDA	Belum pernah diselenggarakannya innovation award tentang inovasi pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan	
12.	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Apakah ada program menumbuhkan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha baru di setiap kabupaten/kota untuk mendukung pencapaian 100.000 Sultan Muda ?	BRIDA Dinas Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian	Sudah ada, namun hanya sebatas penumbuhan wirausaha baru Belum ada Ada kegiatan terkait penumbuhan wirausaha baru	
13.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan	Apakah di Propinsi Sumsel ada kodefikasi teknologi masyarakat dan/atau kearifan lokal terkait dengan	BRIDA	Belum dilakukannya kodefikasi teknologi masyarakat dan/atau kearifan lokal terkait dengan pengembangan kewirausahaan pemuda	

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel					
(1)	(2)	(3)	Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Keterangan
			(4)	(5)	(6)
	dan/atau teknologi masyarakat.	pengembangan kewirausahaan pemuda ?	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Koperasi dan UKM	Tidak ada Belum ada	
		Inventarisasi dan kodifikasi teknologi masyarakat lokal yang terkait dengan pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan ?	BRIDA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Belum ada Inventarisasi dan kodifikasi teknologi masyarakat atau kearifan lokal yang terkait dengan pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan Tidak ada	
V Keterpaduan atan koherensi Riset dan Inovasi di daerah					
14.	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi didaerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Apakah di Propinsi Sumsel ada prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pencapaian 100.000 Sultan Muda?	BRIDA Dinas Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian	Belum ada prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pencapaian 100.000 Sultan Muda Belum ada belum mulai	
		Apakah ada prakarsa riset dan inovasi untuk pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan ?	BRIDA Bappeda BRIDA	Belum ada prakarsa riset dan inovasi untuk pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan Belum ada Belum ada pembentukan dan pengembangan klaster inovasi atau sentra UKM berbasis kelompok usaha yang secara khusus untuk mendukung program 100.000 Sultan Muda	
15.	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Apakah setiap kabupaten/kota di Propinsi Sumsel dilakukan pembentukan dan pengembangan klaster inovasi atau			

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel					
(1)	(2)	(3)	Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Keterangan
			(4)	(5)	(6)
		sentra UKM berbasis kelompok usaha untuk mendukung program 100.000 Sultan Muda ?	Dinas Koperasi dan UKM	Belum ada	
16.	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Apakah program Pengembangan 100.000 Sultan Muda telah dikaitkan dengan kebijakan di masing-masing kabupaten/kota (koherensi kebijakan)?	BRIDA	Iya, program pengembangan 100.000 Sultan muda merupakan salah satu dari 12 program strategis Gubernur Sumatera Selatan	
			Bappeda	12 Program Strategis Gubernur Sumatera Selatan termasuk program 100.000 Sultan Muda sudah disosialisasikan ke 17 Kabupaten Kota	
			Dinas Koperasi dan UKM	Belum ada	
		Apakah ada kohensi/sinkronisasi kebijakan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan?	Bappeda	Belum ada	
VI Penyelarasan dengan perkembangan global					
17.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Apakah di Propinsi Sumsel ada program/ kegiatan fasilitasi kepada pelaku usaha muda dalam memenuhi Standarisasi produk masing-masing (seperti: perijinan (BPOM, PIRT, dsb), Kemasan, Label	Dinas Perdagangan	Terdapat Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan terkait Pengawasan Perijinan, Kemasan, Label, dsb	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
			Dinas Koperasi dan UKM	Sudah ada	Pendampingan Legalitas UMKM melalui Pojok Kito
			Dinas Perindustrian	Iya, Sudah ada	
			Dinas Penanaman Modal dan	Terdapat program pelayanan penanaman modal untuk	Kegiatan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem

Gambaran kondisi ekosistem riset dan inovasi pada Bab II ini menunjukkan bahwa meskipun Provinsi Sumatera Selatan telah meraih predikat sebagai daerah sangat inovatif, masih terdapat berbagai keterbatasan dalam kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan pemanfaatan riset untuk kebijakan. Kondisi ini tentu saja berdampak pada kemampuan daerah dalam menjawab berbagai permasalahan pembangunan yang mendesak. Bab III selanjutnya akan mengidentifikasi secara spesifik permasalahan utama pembangunan daerah dan bagaimana riset serta inovasi berpotensi menjadi instrumen kunci dalam pemecahannya.

BAB III

PERMASALAHAN UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH DAN POTENSI PEMECAHANNYA

3.1 Identifikasi Isu dan Permasalahan Strategis Pembangunan Daerah

Isu-isu strategis daerah merupakan permasalahan prioritas yang memerlukan penanganan segera guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, tantangan-tantangan krusial muncul sebagai akibat dari berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks dan saling berkaitan. Permasalahan tersebut tidak hanya merefleksikan kondisi faktual di lapangan, tetapi juga menjadi landasan utama bagi Pemerintah Daerah dalam merancang kebijakan dan menyusun program kerja yang tepat guna dan berbasis kebutuhan riil.

Identifikasi dan analisis isu-isu strategis daerah menjadi langkah penting dalam memastikan arah pembangunan yang selaras dengan potensi, permasalahan, serta peluang yang dimiliki oleh daerah. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada pemecahan masalah jangka pendek, tetapi juga pada upaya memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi perubahan global, meningkatkan daya saing ekonomi lokal, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu mengedepankan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai kunci utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan mampu

menciptakan kebijakan yang adaptif, inovatif, serta responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan tantangan masa depan

Proses penentuan isu utama dilakukan secara sistematis melalui analisis data empiris, dialog partisipatif bersama masyarakat, serta konsultasi dengan para pemangku kepentingan lintas sektor. Melalui pendekatan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengidentifikasi dan memfokuskan perhatian pada permasalahan-permasalahan yang paling mendesak dan relevan untuk ditangani dalam kerangka pembangunan daerah. Permasalahan ini meliputi kemiskinan dan stunting yang masih tinggi, produktivitas pertanian dan hilirisasi komoditi unggulan belum optimal, layanan pendidikan dan kesehatan belum optimal, pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas belum optimal, mitigasi bencana kebakaran hutan lahan, banjir, dan tanah longsor belum optimal, peningkatan daya saing dan realisasi investasi belum optimal, rendahnya kapasitas fiskal dalam mendorong pengembangan wilayah, transformasi ekonomi dan transisi energi berkeadilan, serta reformasi birokrasi.

Setiap isu strategis yang teridentifikasi memiliki keterkaitan erat satu sama lain dan menuntut pendekatan penyelesaian yang bersifat menyeluruh serta terintegrasi lintas sektor. Dengan menetapkan sebagai prioritas pembangunan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan komitmen kuat untuk mengatasi berbagai hambatan struktural yang menghambat kemajuan daerah. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan wilayah dan mendorong terciptanya kualitas hidup yang lebih baik dan merata bagi seluruh masyarakat. Berikut ini masalah utama daerah Provinsi Sumatera Selatan antara lain:

1.) Kemiskinan dan stunting yang masih tinggi

Kemiskinan dan stunting masih menjadi masalah prioritas di Provinsi Sumatera Selatan. Tingkat kemiskinan provinsi ini mencapai 11,9%, lebih tinggi dari rata-rata nasional dan tertinggi kedua di wilayah Sumatera bagian Selatan. Fenomena kemiskinan

juga menunjukkan ketimpangan, di mana daerah dengan sumber daya alam melimpah justru memiliki tingkat kemiskinan tinggi, serta masih terdapat wilayah tertinggal dengan kedalaman dan keparahan kemiskinan yang signifikan. Sementara itu, prevalensi stunting juga masih cukup tinggi, dengan kasus tertinggi di Kabupaten Musi Rawas dan terendah di Kota Pagar Alam. Permasalahan stunting berkaitan erat dengan gizi buruk, kecukupan gizi ibu hamil dan anak, serta dukungan bagi pekerja dan pengusaha perempuan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting di Sumatera Selatan perlu difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan.

2.) Produktivitas pertanian dan hilirisasi komoditi unggulan belum optimal

Produktivitas sektor pertanian dan hilirisasi komoditi unggulan di Provinsi Sumatera Selatan masih belum optimal sehingga berpotensi mengancam ketahanan pangan dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun ketersediaan pangan cukup melimpah, keterjangkauan dan pemanfaatannya masih rendah. Tantangan utama meliputi alih fungsi lahan, menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian, rendahnya pendidikan petani, serta tingginya kehilangan pangan akibat minimnya teknologi pascapanen dan keterbatasan infrastruktur agrolistik. Selain itu, perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, serta menurunnya produktivitas tanaman perkebunan seperti karet, kelapa sawit, dan kakao turut memperparah kondisi ini. Hilirisasi komoditas unggulan juga belum berkembang optimal karena kegiatan ekonomi masih berfokus pada sektor primer dan kurangnya transformasi menuju industrialisasi pertanian. Nilai tambah produk perkebunan masih rendah akibat pengelolaan yang belum efisien dan terbatasnya inovasi di tingkat on-farm.

Kondisi serupa terjadi pada sektor perikanan budidaya yang mengalami penurunan produksi di berbagai wilayah akibat faktor cuaca, kualitas bibit, teknologi, dan pengetahuan budidaya yang belum memadai. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas dan penguatan hilirisasi menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta memperkuat ketahanan pangan di Sumatera Selatan.

3.) Layanan pendidikan dan kesehatan belum optimal.

Layanan pendidikan dan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan masih belum optimal, ditandai dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan pemerataan akses pendidikan. Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMA masih sekitar 60 persen pada periode 2017-2022, menunjukkan banyak penduduk belum menyelesaikan pendidikan menengah, sementara mayoritas lapangan kerja mensyaratkan minimal pendidikan SMA. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Selatan juga masih rendah, yaitu 70,90 pada tahun 2022, menempati posisi kedua terbawah di wilayah Sumbagsel. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan mutu pendidikan, penguatan kompetensi tenaga kerja, serta kemitraan antara dunia usaha dan dunia pendidikan (DUDI) agar bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal. Di sisi lain, layanan kesehatan perlu diperkuat untuk menghadapi tantangan perubahan struktur demografi dan meningkatnya populasi lanjut usia. Masih lemahnya hubungan industrial antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha turut berpengaruh terhadap daya saing tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi layanan pendidikan dan kesehatan di Sumatera Selatan harus diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, perluasan akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta penguatan sistem perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

4.) Pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas belum optimal.

Kesenjangan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah di Provinsi Sumatera Selatan masih menjadi tantangan utama. Meskipun kondisi jalan mantap telah mencapai 83,62%, sejumlah wilayah masih memiliki tingkat aksesibilitas rendah, sulit dijangkau transportasi, serta belum sepenuhnya terlayani oleh jaringan listrik, sinyal telepon, dan internet. Ketimpangan ini tercermin dari nilai indeks Entropi Theil sebesar 1,345, yang menunjukkan masih terpusatnya sumber daya ekonomi, tenaga kerja terampil, investasi, dan sarana prasarana di wilayah tertentu. Kondisi topografi yang sulit, seperti daerah pegunungan Bukit Barisan dan kawasan perairan di Pantai Timur, memperburuk keterbatasan konektivitas serta menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar. Upaya pemerataan infrastruktur perlu difokuskan pada peningkatan konektivitas antarwilayah, penguatan transportasi darat dan digital, serta perluasan akses listrik dan jaringan komunikasi guna mendorong efisiensi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

5.) Mitigasi bencana kebakaran hutan lahan, banjir, dan tanah longsor belum optimal.

Ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta tanah longsor di Provinsi Sumatera Selatan masih tinggi akibat menurunnya kualitas lingkungan dan dampak perubahan iklim. Peningkatan luas lahan kritis, laju deforestasi yang melonjak dari sekitar 2.800 hektar menjadi lebih dari 17.000 hektar per tahun, serta pemanfaatan area gambut yang rentan terhadap kebakaran menunjukkan lemahnya upaya mitigasi dan pengelolaan lingkungan. Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya polusi udara dan penurunan kualitas udara di berbagai wilayah. Selain itu, aktivitas pertambangan yang tidak direklamasi dengan baik turut memperburuk kerusakan lingkungan. Terdapat 359

tambang dengan izin putus yang menimbulkan risiko banjir, pencemaran, dan longsor, sekaligus berdampak sosial berupa pengangguran, kemiskinan, konflik, hingga gangguan kesehatan masyarakat. Untuk itu, diperlukan penguatan kebijakan mitigasi bencana berbasis ekosistem, rehabilitasi lahan kritis, pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut, serta penegakan regulasi pengelolaan tambang guna melindungi lingkungan dan menjamin keselamatan masyarakat Sumatera Selatan.

6.) Peningkatan daya saing dan realisasi investasi belum optimal.

Peningkatan daya saing ekonomi dan realisasi investasi di Provinsi Sumatera Selatan masih menghadapi berbagai kendala struktural. Perekonomian daerah ini masih didominasi oleh sektor primer seperti pertambangan dan penggalian dengan kontribusi 22,80 persen, diikuti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, dan konstruksi. Ketergantungan pada sektor primer menunjukkan belum terjadinya transformasi ekonomi yang kuat menuju sektor bernilai tambah tinggi dan berorientasi industri. Hal ini tercermin dari posisi Provinsi Sumatera Selatan yang masih berada di peringkat kelima di Pulau Sumatera dengan skor Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) 5,97 dan skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 3,36 pada tahun 2023, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Daya saing daerah masih dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur, produktivitas tenaga kerja, keterampilan SDM, serta iklim investasi dan inovasi yang belum optimal. Upaya peningkatan daya saing dan investasi perlu diarahkan pada penguatan iklim usaha yang kondusif, percepatan transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor industri dan jasa, peningkatan kualitas infrastruktur pendukung, serta pengembangan SDM yang kompeten dan inovatif.

7.) Rendahnya kapasitas fiskal dalam mendorong pengembangan wilayah.

Kapasitas fiskal daerah di Provinsi Sumatera Selatan masih tergolong rendah, ditandai dengan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai hampir 90% dari total pendapatan daerah. Hanya Kota Palembang yang termasuk kategori menuju mandiri, sementara 16 kabupaten/kota lainnya masih belum mandiri secara fiskal. Tingginya proporsi belanja operasional sekitar 60% dari total pengeluaran membatasi ruang fiskal untuk belanja modal yang produktif dalam mendorong pembangunan wilayah. Keterbatasan pembagian pendapatan dari dana bagi hasil juga mempersempit peluang peningkatan pendapatan daerah. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kreativitas dalam menggali sumber pendapatan baru serta memperkuat efisiensi dan kualitas belanja publik. Pemanfaatan pendanaan inovatif seperti skema pembayaran jasa lingkungan, pasar karbon, dan sertifikasi komoditas unggulan menjadi alternatif potensial untuk memperkuat kemandirian fiskal.

8.) Transformasi ekonomi dan transisi energi berkeadilan.

Transformasi ekonomi dan transisi energi berkeadilan di Provinsi Sumatera Selatan menghadapi tantangan besar akibat ketergantungan tinggi pada sumber daya alam, khususnya sektor pertanian dan pertambangan batubara. Pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sekunder berjalan lambat, dengan kontribusi sektor manufaktur yang stagnan selama dua dekade terakhir. Kondisi ini menimbulkan kerentanan terhadap gejolak global, perubahan iklim, dan penurunan permintaan batubara di masa depan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Transformasi menuju ekonomi hijau menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya ini mencakup pengelolaan sumber daya alam yang cerdas iklim dan rendah emisi, sekaligus

memperkuat ketahanan ekonomi lokal melalui pengembangan energi terbarukan. Sumatera Selatan memiliki potensi besar untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor berbasis lahan melalui penerapan praktik agroforestri, pertanian berkelanjutan, serta perlindungan ekosistem gambut. Keberhasilan transformasi ekonomi dan transisi energi membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi forum konsultasi multipihak sebagai ruang koordinasi dalam merumuskan kebijakan ekonomi hijau yang adil, adaptif, dan berpihak pada masyarakat, terutama petani dan pelaku ekonomi lokal.

9.) Reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi di Provinsi Sumatera Selatan masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berintegritas. Indeks keterbukaan informasi dan integritas daerah masih berada di bawah rata-rata nasional, sementara hasil penilaian SPBE menunjukkan sebagian besar kabupaten/kota masih berkategori rendah (C atau CC), dengan hanya Kabupaten Muara Enim yang mencapai kategori B. Kondisi ini menandakan perlunya percepatan transformasi digital dan penguatan sistem birokrasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Reformasi birokrasi perlu diarahkan pada penguatan regulasi tata kelola pemerintahan berbasis meritokrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penerapan sistem pelayanan publik yang terintegrasi dan berorientasi pada kemudahan akses bagi masyarakat. Selain itu, perlu ditingkatkan komitmen terhadap prinsip integritas dan akuntabilitas untuk mencegah praktik korupsi serta memperkuat kepercayaan publik.

Identifikasi permasalahan utama yang menjadi fokus pembangunan diperoleh melalui proses *Focus Group Discussion (FGD)*

dengan pemangku kepentingan, serta didukung oleh temuan riset terdahulu dirangkum dalam Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Prioritas Pembangunan

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
Kerentanan dan risiko kondisi geografi	Penguatan ketahanan wilayah melalui pembangunan infrastruktur mitigasi bencana, sistem peringatan dini, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi kerentanan dan risiko akibat kondisi geografi.
Pengelolaan sumber daya air belum berkelanjutan	Optimalisasi pengelolaan sumber daya air melalui konservasi, rehabilitasi daerah aliran sungai, dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk mendukung ketersediaan air yang berkelanjutan bagi masyarakat dan sektor ekonomi.
Tingginya alih fungsi lahan dan gambut	Pengendalian alih fungsi lahan dan perlindungan ekosistem gambut melalui penegakan regulasi, penerapan tata ruang berkelanjutan, serta penguatan program restorasi dan rehabilitasi lahan.
Pengembangan potensi ekonomi daerah belum optimal	Peningkatan pengembangan potensi ekonomi daerah melalui hilirisasi produk unggulan, pemberdayaan UMKM, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk mendorong daya saing daerah.
Kerentanan ketahanan pangan	Penguatan ketahanan pangan melalui diversifikasi produksi, peningkatan infrastruktur pertanian, serta dukungan teknologi dan akses pasar guna memastikan ketersediaan pangan yang stabil dan berkelanjutan.
Kesenjangan infrastruktur antar wilayah masih tinggi	Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah untuk memperkuat integrasi ekonomi, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan publik.
Kualitas sumber daya manusia masih rendah	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan yang merata, pengembangan keterampilan vokasi, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
Transformasi ekonomi belum optimal	Percepatan transformasi ekonomi melalui penguatan sektor unggulan, digitalisasi, dan inovasi berbasis teknologi untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Ancaman stabilitas daerah masih tinggi	Penguatan stabilitas daerah melalui peningkatan kualitas keamanan, harmonisasi sosial, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif dan inklusif.
Inovasi daerah masih belum optimal	Peningkatan inovasi daerah melalui penguatan ekosistem riset dan teknologi, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha, serta dukungan terhadap pengembangan inovasi berbasis potensi lokal.
Reformasi birokrasi yang belum optimal	Percepatan reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik, peningkatan kapasitas aparatur, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.

3.2 Potensi Riset dan Inovasi dalam Pemecahan Permasalahan Daerah

Pemanfaatan riset dan inovasi ke depan menjadi peluang strategis dalam mendukung pencapaian visi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029, yaitu "*Sumsel Maju Terus untuk Semua*." Visi ini menekankan pentingnya kemajuan yang inklusif dan merata, yang dapat dicapai melalui penguatan ekosistem riset dan inovasi yang responsif terhadap kebutuhan daerah. Perkembangan teknologi, digitalisasi, serta meningkatnya perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan memberikan ruang bagi riset untuk berperan lebih besar dalam merumuskan solusi atas berbagai tantangan lokal. Dengan optimalisasi sumber daya lokal serta peningkatan kapasitas SDM kelitbangan, riset dan inovasi dapat menjadi pendorong utama dalam mewujudkan Sumsel yang maju, adaptif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Berikut ini beberapa peluang yang dapat dilakukan dalam pemanfaatan riset dan inovasi di masa yang akan datang antara lain:

- 1.) Arah kebijakan nasional untuk memperkuat riset dan inovasi di daerah

Arah kebijakan nasional yang menekankan penguatan riset dan inovasi memberikan peluang besar bagi Sumatera Selatan untuk mengoptimalkan potensi daerahnya. Pemerintah pusat telah mendorong transformasi pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk melalui kebijakan riset nasional serta integrasi dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Peluang ini dapat dimanfaatkan dengan menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan prioritas nasional. Dengan demikian, riset dan inovasi yang dilakukan tidak hanya relevan dengan kebutuhan lokal, tetapi juga mendapat dukungan lebih luas dari pemerintah pusat. Keselarasan ini akan mempercepat lahirnya kebijakan yang berbasis bukti, meningkatkan daya saing daerah, serta memperkuat peran

Sumsel dalam mendukung visi Indonesia sebagai negara berbasis riset dan inovasi.

2.) Potensi kerja sama lintas Lembaga dalam riset dan inovasi

Potensi kerja sama lintas lembaga dalam riset dan inovasi menjadi peluang strategis untuk memperkuat ekosistem pembangunan berbasis pengetahuan. Perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, hingga komunitas dapat membentuk jejaring kolaborasi yang saling melengkapi. Melalui kerja sama ini, keterbatasan sumber daya, baik pendanaan, SDM, maupun infrastruktur, dapat diatasi dengan memanfaatkan keunggulan dan kapasitas masing-masing pihak. Kolaborasi lintas lembaga juga membuka ruang bagi riset yang lebih aplikatif dan sesuai kebutuhan nyata, seperti ketahanan pangan, energi terbarukan, pengelolaan lingkungan, maupun inovasi pelayanan publik. Dengan sinergi yang terjalin, hasil riset tidak berhenti pada publikasi semata, melainkan dapat diimplementasikan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kerja sama ini sekaligus menjadi wahana pertukaran pengetahuan, transfer teknologi, serta penguatan kapasitas SDM, sehingga mendorong terciptanya ekosistem riset dan inovasi yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing.

3.) Dukungan sumber daya manusia dan infrastruktur bagi riset dan inovasi

Dukungan sumber daya manusia dan infrastruktur merupakan peluang penting dalam memperkuat pemanfaatan riset dan inovasi di masa mendatang. Ketersediaan peneliti, tenaga ahli, serta praktisi yang kompeten dapat menjadi motor penggerak lahirnya ide-ide kreatif dan solusi ilmiah yang relevan dengan tantangan pembangunan. Sinergi antara penguatan kapasitas SDM dengan ketersediaan infrastruktur akan menciptakan ekosistem riset yang lebih dinamis dan berkelanjutan. Dengan dukungan ini, riset tidak hanya menghasilkan pengetahuan baru, tetapi juga mendorong

inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta mendukung pencapaian visi pembangunan lima tahun ke depan.

3.3 Pemetaan Hubungan Isu dengan Potensi Daerah

Pemetaan hubungan antara isu strategis dengan potensi daerah dilakukan untuk menunjukkan secara sistematis bagaimana potensi SDA dan ekonomi yang dimiliki dapat menjadi solusi bagi permasalahan pembangunan yang dihadapi. Matriks di bawah ini mengilustrasikan keterkaitan tersebut.

Tabel 3. 2 Hubungan Isu Strategis, Potensi Daerah dan Peran Riset dan Inovasi

Isu Strategis Daerah	Potensi Daerah yang Relevan	Peran Riset dan Inovasi sebagai Solusi
Kemiskinan dan Stunting	• Sumber daya manusia (bonus demografi) • Produk pertanian & perikanan (sumber pangan bergizi)	• Riset pengembangan pangan fungsional untuk balita dan ibu hamil. • Inovasi sistem pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. • Kajian efektivitas program perlindungan sosial dan intervensi stunting.
Produktivitas Pertanian & Hilirisasi Belum Optimal	• Komoditas PUD: Padi, Jagung, Sawit, Karet, Kopi, Ikan, Udang, dll.	• Riset dan pengembangan teknologi pascapanen dan alat mesin pertanian (alsintan). • Inovasi sistem pertanian presisi dan berbasis digital (smart farming). • Riset pengembangan produk hilir berbasis komoditas unggulan (misal: biofuel dari sawit, produk olahan karet, kopi specialty).
Layanan Pendidikan & Kesehatan Belum Optimal	• Populasi usia produktif yang besar. • Keberadaan perguruan tinggi dan lembaga riset.	• Riset pengembangan kurikulum vokasi dan keterampilan berbasis kebutuhan industri (link and match). • Inovasi layanan kesehatan berbasis telemedicine dan aplikasi mobile. • Riset tentang model pembelajaran efektif di daerah tertinggal.

Pemerataan Infrastruktur & Konektivitas	• Letak geografis yang strategis di jalur Sumatera. • Sumber daya alam untuk pembangunan infrastruktur.	• Riset dan inovasi material konstruksi ramah lingkungan. • Kajian sistem transportasi terpadu yang efisien. • Inovasi teknologi untuk akses internet di daerah terpencil (misal: penggunaan drone atau TV white space).
Mitigasi Bencana	• Ekosistem gambut dan hutan. • Sumber daya air.	• Riset dan pengembangan sistem peringatan dini bencana berbasis IoT. • Inovasi teknologi restorasi lahan gambut dan rehabilitasi hutan. • Riset tentang praktik pertanian ramah lingkungan yang tidak merusak ekosistem.
Daya Saing & Investasi Rendah	• Posisi strategis dan sumber daya alam. • Produk unggulan daerah.	• Riset pemetaan potensi investasi di sektor prioritas. • Inovasi sistem perizinan berbasis digital (OSS) yang terintegrasi. • Kajian pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru.
Kapasitas Fiskal Rendah	• Potensi PAD dari sektor pajak dan retribusi. • Potensi sumber daya alam yang belum tergali optimal.	• Riset pengembangan skema pendanaan inovatif (CSR, pasar karbon, dll.). • Inovasi sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. • Kajian optimalisasi pajak daerah dan retribusi.
Transformasi Ekonomi & Transisi Energi	• Potensi energi terbarukan (surya, air, panas bumi). • Sektor pertanian dan perkebunan.	• Riset pengembangan sumber energi alternatif dan terbarukan. • Inovasi teknologi pertanian rendah emisi. • Kajian kebijakan transisi energi yang berkeadilan bagi masyarakat.
Reformasi Birokrasi	• Sumber daya manusia aparatur. • Perkembangan teknologi digital.	• Riset perancangan sistem pelayanan publik yang terintegrasi (SPBE). • Inovasi aplikasi untuk peningkatan transparansi dan partisipasi publik. • Kajian budaya kerja dan reformasi kelembagaan.

Dari identifikasi permasalahan utama dan potensi pemecahannya di Bab III, terlihat bahwa salah satu akar persoalan yang dihadapi Sumatera Selatan adalah rendahnya daya saing ekonomi dan tingginya angka pengangguran, yang salah satu

solusinya adalah melalui penciptaan wirausaha baru yang inovatif. Untuk itu, diperlukan fokus dan arah yang jelas dalam pemanfaatan riset dan inovasi. Bab IV akan menetapkan dan menjabarkan tema prioritas riset dan inovasi yang menjadi payung bagi seluruh upaya pemajuan IPTEK di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2025-2029.

BAB IV

TEMA PRIORITAS RISET DAN INOVASI DI DAERAH

4.1 Proses Penetapan dan Rasionalisasi Tema Prioritas

Penentuan tema prioritas dalam Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJ PID) Provinsi Sumatera Selatan dilakukan melalui proses penyelarasan dengan arah pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyelarasan ini penting dilakukan agar kebijakan dan program inovasi daerah tidak hanya berdiri sebagai inisiatif sektoral, melainkan memberikan kontribusi langsung terhadap capaian pembangunan jangka menengah. Dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis daerah serta fokus pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, tema prioritas dalam dokumen RIPJ PID diarahkan pada program strategis "100.000 Sultan Muda Sumsel."

Program "100.000 Sultan Muda Sumsel" dipilih sebagai tema prioritas karena memiliki relevansi yang tinggi dengan agenda penguatan ekonomi daerah melalui penciptaan wirausaha muda yang kompetitif. Program ini merupakan upaya pemerintah provinsi untuk mendorong lahirnya seratus ribu pelaku usaha muda yang bergerak pada berbagai sektor, termasuk ekonomi kreatif, pertanian, perdagangan, dan sektor usaha lainnya. Pemilihan tema ini tidak hanya mencerminkan orientasi pembangunan ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi, tetapi juga menggambarkan kebutuhan daerah untuk memperluas basis pelaku ekonomi produktif melalui pengembangan kapasitas generasi muda.

Penetapan tema prioritas ini didasari oleh sejumlah pertimbangan strategis. Pertama, dinamika ketenagakerjaan dan transformasi ekonomi daerah menunjukkan perlunya akselerasi pertumbuhan pelaku usaha baru. Melalui fokus pada wirausaha

muda, pemerintah provinsi berupaya meningkatkan produktivitas ekonomi, memperluas peluang kerja, serta memperkuat struktur ekonomi lokal yang sebelumnya masih didominasi oleh sektor-sektor tradisional. Dengan demikian, kewirausahaan dipandang sebagai instrumen yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kedua, program "100.000 Sultan Muda Sumsel" memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan ekosistem inovasi daerah. Program ini menempatkan dukungan pembiayaan sebagai salah satu instrumen utama melalui fasilitasi permodalan yang melibatkan perbankan, BUMN, dan BUMD. Pendekatan ini penting karena meningkatkan akses pelaku usaha pemula terhadap sumber pendanaan yang sebelumnya sulit dijangkau. Ketersediaan akses pembiayaan yang lebih inklusif dipandang krusial untuk mendorong lahirnya inovasi, mengurangi tingkat kegagalan usaha pada tahap awal, serta memperkuat keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Ketiga, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi pilar lain dalam penetapan tema prioritas ini. Melalui program peningkatan keterampilan yang bersifat teknis maupun non-teknis, pemerintah provinsi berupaya mencetak wirausaha muda yang tidak hanya mampu memulai usaha, tetapi juga memiliki kompetensi untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Penguatan kapasitas melalui berbagai pelatihan tersebut diorientasikan pada kebutuhan dunia usaha dan industri serta perkembangan teknologi yang menuntut adaptasi cepat dari para wirausaha muda.

Keempat, tema ini turut menekankan pentingnya promosi dan pemasaran produk sebagai bagian dari strategi komprehensif dalam menciptakan ekosistem usaha yang kompetitif. Melalui upaya meningkatkan eksposur UMKM dan startup, baik melalui media digital, pameran produk, maupun kemitraan multipihak, pemerintah provinsi berupaya memperluas akses pasar bagi para wirausaha muda. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan visibilitas

produk unggulan lokal serta mendorong penetrasi pasar yang lebih luas, termasuk ke tingkat nasional dan internasional.

Secara keseluruhan, pemilihan tema "100.000 Sultan Muda Sumsel" dalam RIPJ PID mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis inovasi, pemberdayaan generasi muda, serta penguatan ekosistem kewirausahaan. Dengan orientasi tersebut, dokumen RIPJ PID berperan sebagai instrumen strategis yang mengarahkan pembangunan inovasi daerah yang selaras dengan RPJMD dan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan daya saing serta kemandirian ekonomi Provinsi Sumatera Selatan. Tema ini juga diharapkan menjadi fondasi bagi munculnya generasi wirausaha muda yang inovatif, adaptif, dan mampu menjadi lokomotif pembangunan daerah dalam jangka panjang.

Program ini merupakan agenda prioritas Gubernur terpilih yang diarahkan untuk mendorong tumbuhnya wirausaha muda, memperluas kesempatan kerja, memperkuat sektor ekonomi kreatif dan UMKM, serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Riset dan inovasi memiliki peran fundamental dalam mendukung pencapaian program tersebut melalui penyediaan basis data kewirausahaan yang komprehensif, pengembangan model bisnis inovatif, pemetaan potensi sektor unggulan, serta peningkatan kapasitas 100.000 Sultan Muda melalui pemanfaatan teknologi informasi, layanan inkubasi, maupun pengembangan inovasi produk daerah. Dengan demikian, penyusunan RIPJ PID bukan hanya merupakan pemenuhan amanat regulasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses pembangunan daerah berjalan secara terarah, berbasis bukti, dan selaras dengan agenda prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

4.2 Keterkaitan Tema Prioritas dengan Permasalahan Daerah

Tema prioritas "100.000 Sultan Muda Sumsel" memiliki keterkaitan yang sangat erat dan strategis dengan upaya menjawab permasalahan utama pembangunan daerah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tema ini bukanlah program yang berdiri sendiri, melainkan sebuah solusi integratif yang secara langsung menyasar beberapa isu krusial sekaligus. Pertama, terkait dengan permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi, program 100.000 Sultan Muda secara langsung berupaya menciptakan lapangan kerja baru melalui penumbuhan wirausaha muda. Dengan menciptakan 100.000 pengusaha baru, program ini akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.

Kedua, program ini menjadi jawaban atas permasalahan transformasi ekonomi dan rendahnya daya saing. Dengan mendorong generasi muda untuk terjun ke sektor-sektor kreatif, inovatif, dan berbasis teknologi, program ini akan mempercepat pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer yang konvensional menuju ekonomi yang lebih modern dan bernilai tambah tinggi. Para Sultan Muda diharapkan menjadi pelaku utama dalam hilirisasi produk unggulan daerah, digitalisasi UMKM, dan pengembangan ekonomi kreatif. Ketiga, program ini selaras dengan upaya peningkatan kualitas SDM. Melalui pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap teknologi, program 100.000 Sultan Muda akan meningkatkan kompetensi dan keterampilan generasi muda, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah. Program ini menciptakan SDM yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap menciptakan lapangan kerja.

Keempat, dari aspek reformasi birokrasi dan kapasitas fiskal, keberhasilan program ini akan meningkatkan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya akan memperluas basis pajak dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, implementasi program ini

juga mendorong birokrasi untuk lebih responsif, inovatif, dan kolaboratif dalam memberikan layanan, khususnya dalam hal perizinan usaha, akses pembiayaan, dan kemudahan berusaha. Dengan demikian, tema prioritas "100.000 Sultan Muda Sumsel" merupakan sebuah pendekatan terpadu yang secara fundamental menjawab permasalahan struktural daerah. Program ini mengubah tantangan (pengangguran, kemiskinan) menjadi peluang (wirausaha baru, pertumbuhan ekonomi) dan menjadi lokomotif utama dalam mewujudkan visi "Sumsel Maju Terus untuk Semua."

4.3 Ruang Lingkup Tema Prioritas

Untuk memastikan implementasi program "100.000 Sultan Muda Sumsel" berjalan terarah dan terukur, penting untuk mendefinisikan ruang lingkupnya secara jelas. Ruang lingkup ini mencakup aspek sasaran program, sektor-sektor yang menjadi fokus, dan jenis dukungan yang akan diberikan.

1. Sasaran Program

Program ini menyasar generasi muda Provinsi Sumatera Selatan, dengan kriteria sebagai berikut:

- Usia 17-35 tahun;
- Memiliki ide usaha atau sedang menjalankan usaha mikro/kecil;
- Berdomisili dan memiliki usaha atau akan mendirikan usaha di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- Memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan usaha;
- Prioritas diberikan kepada pemuda putus sekolah, lulusan SMK/ perguruan tinggi, serta kelompok rentan (perempuan, disabilitas) yang memiliki semangat kewirausahaan.

2. Sektor Usaha Prioritas

Untuk memaksimalkan dampak ekonomi dan selaras dengan potensi unggulan daerah, program ini akan difokuskan pada beberapa sektor prioritas, yaitu:

- **Ekonomi Kreatif:** Kuliner, kriya (songket, anyaman), fesyen, seni pertunjukan, dan desain.
- **Pertanian dan Perikanan Modern:** Budidaya tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, serta perikanan dengan penerapan teknologi tepat guna.
- **Pengolahan dan Hilirisasi:** Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah (misal: keripik, kopi bubuk, abon ikan, produk olahan sawit).
- **Perdagangan dan Jasa:** Bisnis retail, logistik, jasa pemasaran digital, dan pariwisata (biro perjalanan, homestay, atraksi wisata).
- **Teknologi dan Digitalisasi:** Pengembangan aplikasi, platform digital, dan startup teknologi yang mendukung solusi di berbagai sektor.

3. Jenis Intervensi dan Dukungan

Program ini akan memberikan dukungan komprehensif yang meliputi tiga pilar utama:

- **Peningkatan Kapasitas:** Pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, pemasaran digital, dan pengembangan produk.
- **Akses Permodalan:** Fasilitasi akses pembiayaan lunak, bantuan modal usaha, dan pendampingan dalam pengajuan pinjaman ke perbankan dan lembaga keuangan non-bank.
- **Pendampingan dan Inkubasi:** Pendampingan bisnis secara intensif melalui inkubator usaha, bimbingan teknis dari mentor, dan fasilitasi akses pasar serta jaringan usaha.

Penetapan tema prioritas "100.000 Sultan Muda Sumsel" sebagai fokus utama dalam Bab IV membawa konsekuensi perlunya pemahaman mendalam mengenai berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Keberhasilan implementasi tema ini sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal. Oleh karena itu, sebelum merumuskan langkah-langkah strategis, Bab V akan menguraikan secara komprehensif berbagai tantangan yang harus dihadapi sekaligus peluang yang dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan ekosistem riset dan inovasi daerah untuk mencapai target 100.000 Sultan Muda.

BAB V

TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH

5.1 Tantangan Utama dalam Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi

Pengembangan daerah yang didorong oleh riset dan inovasi menjadi kunci percepatan dalam mewujudkan visi dan misi Sumatera Selatan untuk lima tahun ke depan. Meski demikian, dalam praktiknya, pemanfaatan riset dan inovasi masih menemui berbagai tantangan, yang tercermin dalam sejumlah isu penting berikut ini:

1) Mutu kebijakan yang mendorong pengembangan riset dan inovasi

Mutu kebijakan yang mendorong pengembangan riset dan inovasi menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan Sumatera Selatan yang maju untuk semua. Kebijakan yang ada sering kali belum sepenuhnya berbasis bukti ilmiah dan kurang memperhatikan hasil riset yang relevan dengan kebutuhan daerah. Akibatnya, arah pengembangan inovasi tidak selalu sejalan dengan prioritas pembangunan, sehingga potensi riset yang ada di perguruan tinggi maupun lembaga penelitian belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, dinamika perubahan global dan tantangan lokal, seperti ketahanan pangan, energi, dan lingkungan, menuntut adanya kebijakan yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan. Tanpa kebijakan yang bermutu, riset dan inovasi sulit menjadi pendorong utama peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen pemerintah untuk merancang kebijakan berbasis data, memperkuat sinergi lintas sektor, serta memastikan hasil riset dan inovasi menjadi bagian integral dalam proses perumusan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

2) Penerapan kebijakan serta pembangunan yang berbasis bukti

Penerapan kebijakan serta pembangunan yang berbasis bukti masih menghadapi tantangan besar di Sumatera Selatan. Selama ini, proses perumusan kebijakan kerap didominasi oleh pendekatan administratif dan politis, sementara hasil riset atau data ilmiah belum sepenuhnya menjadi landasan utama. Kondisi ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan kurang tepat sasaran dan berpotensi tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Di sisi lain, keterbatasan akses dan integrasi data lintas sektor juga memperlemah praktik pembangunan berbasis bukti. Padahal, dengan pemanfaatan riset, data, dan inovasi, kebijakan dapat lebih akurat dalam merumuskan solusi untuk persoalan daerah seperti kemiskinan, ketahanan pangan, atau pembangunan infrastruktur. Ke depan, diperlukan komitmen untuk menguatkan budaya *evidence-based policy*, melalui penyediaan data yang terbuka, pemanfaatan hasil kajian akademik, serta kolaborasi erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga riset agar pembangunan benar-benar sesuai dengan visi "*Sumsel Maju Terus untuk Semua*."

3) Penguatan budaya riset dan inovasi

Penguatan budaya riset dan inovasi menjadi tantangan yang tidak kalah penting dalam mendukung pembangunan Sumatera Selatan. Saat ini, riset dan inovasi masih sering dipandang sebatas aktivitas akademik, belum sepenuhnya melekat sebagai budaya kerja maupun pola pikir dalam masyarakat dan birokrasi. Rendahnya minat riset, keterbatasan dukungan fasilitas, serta belum kuatnya penghargaan terhadap karya inovatif membuat potensi besar daerah belum tergali secara optimal. Budaya riset dan inovasi perlu ditumbuhkan sejak dini melalui pendidikan, penguatan ekosistem riset di perguruan tinggi, serta dukungan nyata pemerintah terhadap para peneliti dan inovator. Budaya ini harus melekat dalam berbagai sektor pembangunan, sehingga setiap kebijakan, program, maupun kegiatan daerah selalu

berlandaskan pada ide-ide baru yang kreatif dan solutif. Dengan demikian, riset dan inovasi tidak hanya menjadi sarana peningkatan daya saing, tetapi juga motor utama dalam membangun masyarakat yang cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi.

4) Sinergi *pentahelix* dalam mendukung riset dan inovasi

Sinergi *pentahelix* yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media menjadi faktor krusial dalam pengembangan riset dan inovasi. Namun, tantangan yang muncul adalah koordinasi antar unsur ini belum berjalan optimal. Pemerintah sering bergerak sendiri dengan kebijakan, sementara dunia usaha mencari keuntungan tanpa selalu melibatkan hasil riset lokal. Akademisi menghasilkan banyak kajian, tetapi belum terhubung kuat dengan kebutuhan masyarakat atau pasar. Akibatnya, potensi kolaborasi yang seharusnya saling menguatkan masih belum maksimal. Dalam mewujudkan visi "*Sumsel Maju Terus untuk Semua*", diperlukan pola sinergi yang lebih terarah dan berkelanjutan. Pemerintah perlu berperan sebagai fasilitator, akademisi sebagai penyedia solusi ilmiah, dunia usaha sebagai penggerak implementasi, komunitas sebagai penerima manfaat sekaligus pengembang inovasi sosial, serta media sebagai penguat penyebaran informasi. Dengan keterhubungan yang kuat antar unsur *pentahelix*, riset dan inovasi dapat lebih cepat diimplementasikan, relevan dengan kebutuhan daerah, serta mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.

5) Perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada riset dan inovasi

Perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada riset dan inovasi masih menjadi tantangan serius di Sumatera Selatan. Selama ini, alokasi anggaran untuk mendukung riset sering kali terbatas dan belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan

daerah. Akibatnya, banyak hasil penelitian yang berpotensi memberikan solusi nyata bagi masalah daerah tidak dapat dikembangkan lebih lanjut karena minim dukungan pendanaan. Selain itu, perencanaan pembangunan juga masih cenderung fokus pada proyek fisik, sementara penguatan pengetahuan dan inovasi belum sepenuhnya ditempatkan sebagai investasi strategis jangka panjang. Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih visioner dengan memberikan ruang besar bagi riset dan inovasi sebagai motor pembangunan. Dukungan anggaran yang memadai tidak hanya memperkuat kapasitas peneliti dan lembaga riset, tetapi juga mendorong kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat. Dengan menempatkan riset dan inovasi sebagai bagian integral dari siklus perencanaan daerah, Sumatera Selatan akan memiliki fondasi yang kuat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan sesuai misi 2025–2029.

6) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang riset dan inovasi

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang riset dan inovasi merupakan tantangan yang perlu segera diatasi. Saat ini, kualitas dan jumlah peneliti maupun tenaga ahli di Sumatera Selatan masih terbatas, sehingga kemampuan menghasilkan riset yang relevan dengan kebutuhan daerah juga belum optimal. Keterbatasan akses terhadap pelatihan, teknologi, serta jejaring kerja sama global turut memperlambat penguatan kompetensi SDM dalam menghadapi dinamika perubahan yang cepat di era digital dan industri berbasis pengetahuan. Dalam menjawab tantangan tersebut, diperlukan strategi pengembangan SDM yang komprehensif melalui peningkatan keterampilan teknis, penguasaan metodologi riset, serta pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah daerah bersama perguruan tinggi dan lembaga riset perlu menciptakan program peningkatan kapasitas yang

berkelanjutan, termasuk dukungan beasiswa, pelatihan, dan kolaborasi dengan lembaga riset nasional maupun internasional. Dengan SDM yang unggul, riset dan inovasi di Sumatera Selatan akan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung ketahanan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, serta pencapaian visi *"Sumsel Maju Terus untuk Semua."*

7) Ketersediaan dan penguatan infrastruktur riset dan inovasi

Ketersediaan dan penguatan infrastruktur riset dan inovasi menjadi tantangan mendasar yang harus dihadapi Sumatera Selatan. Saat ini, banyak lembaga penelitian maupun perguruan tinggi yang masih terbatas dalam fasilitas laboratorium, peralatan modern, hingga akses terhadap basis data riset yang memadai. Kondisi ini membuat kualitas penelitian tidak berkembang secara optimal, bahkan sering kali bergantung pada dukungan eksternal. Padahal, infrastruktur yang kuat merupakan fondasi penting untuk menghasilkan riset yang berkualitas, inovasi yang aplikatif, serta kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan daerah ke depan perlu memberi prioritas pada penguatan sarana dan prasarana riset, baik melalui investasi langsung pemerintah maupun kemitraan dengan dunia usaha. Penyediaan laboratorium modern, pusat data riset terpadu, hingga inkubator inovasi berbasis teknologi akan mendorong ekosistem riset yang lebih produktif. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, hasil riset dan inovasi tidak hanya lahir dari gagasan, tetapi juga mampu diimplementasikan secara nyata untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pencapaian misi pembangunan Sumatera Selatan 2025-2029.

5.2 Peluang dan Potensi Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi

Pemanfaatan riset dan inovasi ke depan menjadi peluang strategis dalam mendukung pencapaian visi Provinsi Sumatera

Selatan tahun 2025–2029, yaitu *"Sumsel Maju Terus untuk Semua."* Visi ini menekankan pentingnya kemajuan yang inklusif dan merata, yang dapat dicapai melalui penguatan ekosistem riset dan inovasi yang responsif terhadap kebutuhan daerah. Perkembangan teknologi, digitalisasi, serta meningkatnya perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan memberikan ruang bagi riset untuk berperan lebih besar dalam merumuskan solusi atas berbagai tantangan lokal. Dengan optimalisasi sumber daya lokal serta peningkatan kapasitas SDM kelitbangan, riset dan inovasi dapat menjadi pendorong utama dalam mewujudkan Sumsel yang maju, adaptif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Berikut ini beberapa peluang yang dapat dilakukan dalam pemanfaatan riset dan inovasi di masa yang akan datang antara lain:

- 1) Arah kebijakan nasional untuk memperkuat riset dan inovasi di daerah

Arah kebijakan nasional yang menekankan penguatan riset dan inovasi memberikan peluang besar bagi Sumatera Selatan untuk mengoptimalkan potensi daerahnya. Pemerintah pusat telah mendorong transformasi pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk melalui kebijakan riset nasional serta integrasi dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Peluang ini dapat dimanfaatkan dengan menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan prioritas nasional. Dengan demikian, riset dan inovasi yang dilakukan tidak hanya relevan dengan kebutuhan lokal, tetapi juga mendapat dukungan lebih luas dari pemerintah pusat. Keselarasan ini akan mempercepat lahirnya kebijakan yang berbasis bukti, meningkatkan daya saing daerah, serta memperkuat peran Sumsel dalam mendukung visi Indonesia sebagai negara berbasis riset dan inovasi.

- 2) Potensi kerja sama lintas Lembaga dalam riset dan inovasi

Potensi kerja sama lintas lembaga dalam riset dan inovasi menjadi peluang strategis untuk memperkuat ekosistem pembangunan berbasis pengetahuan. Perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, hingga komunitas dapat membentuk jejaring kolaborasi yang saling melengkapi. Melalui kerja sama ini, keterbatasan sumber daya, baik pendanaan, SDM, maupun infrastruktur, dapat diatasi dengan memanfaatkan keunggulan dan kapasitas masing-masing pihak. Kolaborasi lintas lembaga juga membuka ruang bagi riset yang lebih aplikatif dan sesuai kebutuhan nyata, seperti ketahanan pangan, energi terbarukan, pengelolaan lingkungan, maupun inovasi pelayanan publik. Dengan sinergi yang terjalin, hasil riset tidak berhenti pada publikasi semata, melainkan dapat diimplementasikan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kerja sama ini sekaligus menjadi wahana pertukaran pengetahuan, transfer teknologi, serta penguatan kapasitas SDM, sehingga mendorong terciptanya ekosistem riset dan inovasi yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing.

3) Dukungan sumber daya manusia dan infrastruktur bagi riset dan inovasi

Dukungan sumber daya manusia dan infrastruktur merupakan peluang penting dalam memperkuat pemanfaatan riset dan inovasi di masa mendatang. Ketersediaan peneliti, tenaga ahli, serta praktisi yang kompeten dapat menjadi motor penggerak lahirnya ide-ide kreatif dan solusi ilmiah yang relevan dengan tantangan pembangunan. Sinergi antara penguatan kapasitas SDM dengan ketersediaan infrastruktur akan menciptakan ekosistem riset yang lebih dinamis dan berkelanjutan. Dengan dukungan ini, riset tidak hanya menghasilkan pengetahuan baru, tetapi juga mendorong inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta mendukung pencapaian visi pembangunan lima tahun ke depan.

5.3 Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan

Keberhasilan implementasi tema prioritas "100.000 Sultan Muda Sumsel" dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi secara keseluruhan sangat bergantung pada beberapa faktor kunci yang harus dikelola dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan. Faktor-faktor ini adalah sebagai berikut:

1) **Komitmen dan Kepemimpinan Politik yang Kuat**

Keberlanjutan program ini membutuhkan komitmen yang kuat dari Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah provinsi. Hal ini mencakup pengalokasian anggaran yang memadai, pengawasan implementasi, dan kebijakan yang konsisten serta berpihak pada pengembangan wirausaha muda.

2) **Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektor**

Program ini bersifat lintas sektor dan melibatkan banyak OPD. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang efektif dan terstruktur, seperti pembentukan tim percepatan dan forum koordinasi rutin, untuk memastikan sinergi dan menghindari tumpang tindih program.

3) **Kemitraan dengan Dunia Usaha, Akademisi, dan Masyarakat**

Sinergi Pentahelix menjadi kunci sukses. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk pengembangan kurikulum dan riset, dengan sektor swasta dan BUMN/BUMD untuk pendanaan CSR dan pembinaan, serta dengan komunitas dan media untuk promosi dan edukasi, akan mempercepat pencapaian target.

4) **Akses terhadap Pembiayaan**

Kurangnya akses modal sering menjadi batu sandungan utama bagi wirausaha pemula. Keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh ketersediaan skema pembiayaan yang mudah diakses, bunga rendah, dan disertai pendampingan, baik dari APBD, dana CSR, perbankan, maupun lembaga keuangan mikro.

5) Penguatan Kapasitas SDM Pendamping dan Mentor

Kualitas pendampingan sangat menentukan keberhasilan usaha para Sultan Muda. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para fasilitator, mentor, dan tenaga pendamping di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus menjadi prioritas.

6) Ketersediaan Data dan Sistem Monitoring yang Baik

Untuk mengukur kemajuan dan efektivitas program, diperlukan sistem data dan monitoring yang terintegrasi dan real-time. Hal ini penting untuk melakukan evaluasi berkala, perbaikan program, dan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.

Memahami tantangan dan peluang di Bab V memberikan landasan bagi kita untuk mengevaluasi posisi kita saat ini. Untuk dapat merumuskan strategi yang efektif, terlebih dahulu kita harus mengetahui seberapa besar jarak antara kondisi aktual dengan kondisi yang kita cita-citakan. Analisis kesenjangan atau gap analysis pada Bab VI akan menjawab pertanyaan tersebut, dengan membandingkan kondisi ekosistem riset dan inovasi saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan pada akhir periode perencanaan.

BAB VI

ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH

6.1 Analisis Kesenjangan Kemampuan Menghasilkan Kebijakan Berbasis Bukti

Sub bab ini menyajikan analisis kesenjangan (*gap analysis*) mengenai kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyusun kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy/EBP*) serta mendukung penguatan inovasi daerah. Analisis ini digunakan untuk membandingkan kondisi aktual dengan standar ideal yang diharapkan, sehingga Pemerintah Daerah dapat mengidentifikasi aspek-aspek krusial yang memerlukan peningkatan demi terciptanya proses perumusan kebijakan yang lebih presisi, adaptif, dan berbasis data.

Fokus analisis mencakup sejumlah faktor pendukung penyusunan rekomendasi kebijakan meliputi ketersediaan sumber daya manusia IPTEK, fasilitas pendukung penyusunan kajian, alokasi anggaran riset dan inovasi, program riset yang telah dilaksanakan, kelembagaan IPTEK, serta jejaring riset dan inovasi termasuk kerja sama dengan mitra strategis. Faktor-faktor ini menjadi fondasi utama bagi terselenggaranya proses kajian kebijakan yang terstruktur dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Melalui identifikasi kesenjangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat memperoleh pemetaan yang lebih jelas mengenai kekuatan yang sudah dimiliki, tantangan yang masih dihadapi, serta ruang perbaikan yang perlu diprioritaskan dalam pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah. Temuan ini sekaligus menjadi pijakan bagi perumusan strategi penguatan kapasitas dan pembangunan ekosistem pendukung agar praktik EBP dapat diterapkan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan

demikian, proses kebijakan ke depan dapat lebih terarah, responsif, dan memberi kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan daerah.

Analisis kesenjangan terhadap faktor pendukung ekosistem riset dan inovasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan evaluasi kemampuan Pemerintah Daerah dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Evaluasi ini membandingkan capaian lima tahun terakhir dengan kondisi ideal yang diharapkan, sehingga diperoleh gambaran mengenai efektivitas penerapan EBP serta perkembangan inovasi di Provinsi Sumatera Selatan. Indikator yang dianalisis mencakup jumlah rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang telah dihasilkan dan dimanfaatkan, jumlah inovasi bidang tata kelola, inovasi layanan publik, inovasi lain termasuk inovasi masyarakat, serta nilai dan predikat Indeks Inovasi Daerah (IID). Penilaian atas indikator tersebut memberikan dasar empiris bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan arah penguatan kapasitas kebijakan dan inovasi secara lebih strategis, konsisten, dan berkelanjutan.

Tabel 6. 1 Analisis Kesenjangan Kemampuan Dalam Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (*evidence based policy*)

No	Area Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
A. Faktor Pendukung dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (EBP)				
1.	Sumber daya manusia IPTEK daerah	Masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas SDM di bidang Iptek, terlihat dari adanya program pengembangan talenta digital.	Tersedianya SDM Iptek daerah yang memadai baik dari sisi jumlah maupun kompetensi untuk mendukung perumusan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan pengembangan inovasi digital. Pengembangan talenta digital, kerja sama dengan perguruan tinggi, serta program pelatihan dan peningkatan kapasitas dilaksanakan secara berkelanjutan dan terarah sehingga kualitas SDM Iptek meningkat dan mampu menjawab kebutuhan kebijakan daerah.	Kesenjangan terjadi karena kualitas dan kuantitas SDM IPTEK saat ini masih terbatas dan baru didukung oleh program pengembangan talenta digital, sehingga belum sepenuhnya mampu menopang kebutuhan perumusan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Kondisi ini belum sejalan dengan kebutuhan ideal yang menuntut ketersediaan SDM IPTEK yang memadai, terlatih, dan dikembangkan secara berkelanjutan melalui kerja sama perguruan tinggi serta program peningkatan kapasitas yang terarah.
2.	Fasilitas pendukung dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan dan inovasi daerah	Fasilitas riset dan inovasi daerah didukung oleh kelembagaan Iptek yang sudah melembaga.	Tersedianya fasilitas riset dan inovasi daerah yang lengkap, berfungsi optimal, dan terintegrasi dengan kelembagaan Iptek yang telah melembaga. Fasilitas pendukung ini secara konsisten diperkuat dan dimanfaatkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti serta	Kesenjangan terletak pada fungsi dan pemanfaatan fasilitas riset dan inovasi yang meskipun telah didukung kelembagaan IPTEK, namun belum sepenuhnya lengkap, optimal, dan terintegrasi. Kondisi ini belum memenuhi kebutuhan ideal yang mengharuskan fasilitas pendukung dimanfaatkan secara

No	Area Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
3.	Anggaran riset dan inovasi daerah	Anggaran riset dan inovasi daerah dibebankan pada APBD dan sumber dana lain yang sah. Rincian spesifik jumlah anggaran bervariasi setiap tahunnya.	mendorong lahirnya inovasi daerah yang aplikatif.	konsisten untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan inovasi daerah yang aplikatif.
4.	Program-program riset dan inovasi daerah yang pernah dilaksanakan	Pada tahun 2025, terdapat program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang telah dilaksanakan setiap tahunnya dan tahun 2026 terdapat penambahan program baru yaitu Program Riset dan Inovasi	Tersedianya anggaran riset dan inovasi daerah yang memadai, berkelanjutan, dan terencana dengan baik, yang bersumber dari APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Dukungan pendanaan ini mampu menjamin keberlangsungan kegiatan riset, pengembangan inovasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti secara efektif.	Kesenjangan muncul akibat belum terjaminnya kecukupan, keberlanjutan, dan perencanaan anggaran riset dan inovasi daerah, meskipun telah bersumber dari APBD dan dana lain yang sah. Kondisi ini belum sejalan dengan kebutuhan ideal yang menuntut dukungan pendanaan yang memadai dan terencana untuk menjamin keberlangsungan riset, inovasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti secara efektif.
			Terselenggaranya program riset dan inovasi daerah yang berkelanjutan, terstruktur, dan terus berkembang dari tahun ke tahun, dengan perluasan jenis program sesuai kebutuhan daerah. Program penelitian dan pengembangan serta riset dan inovasi mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan inovasi yang berdampak nyata, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan capaian Indeks	Kesenjangan terletak pada keberlanjutan dan pengembangan program riset dan inovasi yang masih terbatas pada pelaksanaan rutin dan penambahan program tertentu. Kondisi ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan ideal berupa program yang terstruktur, terintegrasi, dan berkembang secara konsisten untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti serta

No	Area Faktor Penting dalam menghasilkan EEP	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
5.	Kelembagaan IPTEK di daerah	Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan Penghargaan Innovative Government Award (IGA) tahun 2020-2025 sebagai Provinsi Terinovatif Tingkat Nasional	Inovasi Daerah pada level sangat inovatif secara nasional. Terwujudnya kelembagaan Iptek daerah yang kuat, berfungsi optimal, dan berperan strategis dalam mengkoordinasikan serta mengimplementasikan riset dan inovasi daerah. Peran lembaga seperti BRIDA semakin diperkuat sebagai motor penggerak inovasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, sehingga prestasi daerah sebagai provinsi sangat inovatif dapat dipertahankan secara berkelanjutan.	inovasi yang berdampak nyata dan berkelanjutan. Kesenjangan muncul antara capaian penghargaan sebagai provinsi terinovatif dan penguatan fungsi kelembagaan IPTEK secara internal. Meskipun telah memperoleh pengakuan nasional, peran kelembagaan IPTEK masih perlu diperkuat agar berfungsi optimal dan strategis dalam mengkoordinasikan riset, inovasi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti secara berkelanjutan.
6.	Jejaring Riset dan Inovasi Daerah (kerjasama dengan mitra)	Inovasi daerah di Sumatera Selatan didorong melalui kolaborasi model Pentahelix yang melibatkan akademisi, pebisnis, pemerintah, komunitas, dan media (ABGCM).	Terbangunnya jejaring riset dan inovasi daerah yang kuat, aktif, dan berkelanjutan melalui kolaborasi Pentahelix (akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, dan media). Kerja sama dengan berbagai mitra, khususnya perguruan tinggi, dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM Iptek, memperkuat riset, serta menghasilkan inovasi dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang relevan dengan kebutuhan daerah.	Kesenjangan terletak pada tingkat efektivitas dan keberlanjutan kolaborasi Pentahelix yang meskipun telah berjalan, belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini belum sejalan dengan kebutuhan ideal yang menuntut jejaring riset dan inovasi yang lebih kuat, aktif, dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas SDM IPTEK, memperkuat riset, serta menghasilkan inovasi dan rekomendasi kebijakan berbasis

No	Area Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
B. Kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (EBP)				
1.	Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dihasilkan 5 tahun terakhir	Dalam lima tahun terakhir, kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti masih tergolong rendah, dengan total 2 rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun 2024 dan 2025. Kedua rekomendasi tersebut berbentuk naskah akademik rancangan peraturan daerah, yaitu terkait perubahan susunan perangkat daerah dan kebijakan riset dan inovasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik <i>evidence based policy</i> belum berjalan secara konsisten dan masih terbatas pada isu-isu tertentu, sehingga pemanfaatan kajian berbasis data sebagai dasar perumusan kebijakan daerah belum optimal dan belum berkelanjutan	Meningkatnya jumlah rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dihasilkan secara konsisten dan berkelanjutan setiap tahun, tidak terbatas pada isu tertentu. Rekomendasi disusun berdasarkan kajian data dan analisis yang kuat serta mencakup berbagai sektor strategis daerah, sehingga praktik <i>evidence based policy</i> menjadi bagian integral dalam proses perumusan kebijakan daerah.	Kesenjangan terletak pada rendahnya jumlah rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dihasilkan, yang masih terbatas pada dua rekomendasi dan isu tertentu. Kondisi ini belum sejalan dengan kebutuhan ideal yang menuntut produksi rekomendasi berbasis data secara rutin, lintas sektor, dan berkelanjutan agar <i>evidence based policy</i> terintegrasi dalam proses perumusan kebijakan daerah.
2.	Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dimanfaatkan 5 tahun terakhir	Dalam lima tahun terakhir, pemanfaatan rekomendasi kebijakan berbasis bukti masih terbatas, dengan 2 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti menjadi produk hukum daerah pada tahun 2024 dan 2025. Rekomendasi	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dalam pengambilan keputusan daerah, yang tercermin dari konsistensi tindak lanjut rekomendasi menjadi kebijakan atau produk hukum daerah. Proses	Kesenjangan muncul akibat pemanfaatan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang masih terbatas dan belum konsisten, meskipun sebagian telah ditindaklanjuti menjadi produk hukum. Kondisi ini belum

No	Area Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		tersebut telah dimanfaatkan secara formal melalui penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan susunan perangkat daerah serta Peraturan Daerah tentang riset dan inovasi. Meskipun menunjukkan adanya keterhubungan antara kajian berbasis bukti dan keputusan kebijakan, tingkat pemanfaatannya masih belum konsisten dan belum mencerminkan praktik <i>evidence based policy</i> yang kuat dan berkelanjutan dalam proses perumusan kebijakan daerah.	perumusan kebijakan secara sistematis menjadikan hasil kajian berbasis bukti sebagai rujukan utama, sehingga penerapan <i>evidence based policy</i> berjalan kuat dan berkelanjutan.	memenuhi kebutuhan ideal yang mengharuskan setiap rekomendasi berbasis bukti menjadi rujukan utama dan digunakan secara sistematis dalam pengambilan keputusan kebijakan daerah.
3.	Jumlah inovasi tata kelola pemerintahan daerah 5 tahun terakhir	Dalam lima tahun terakhir, jumlah inovasi tata kelola pemerintahan daerah yang dihasilkan mencapai 152 inovasi, sebagaimana tercatat dalam Aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID), Innovative Government Award (IGA) Kementerian Dalam Negeri, serta paparan Gubernur. Capaian ini menunjukkan tingkat aktivitas inovasi yang cukup tinggi, namun masih berfluktuasi antar tahun, dengan penurunan pada 2023 dan lonjakan signifikan pada 2024. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengembangan inovasi tata kelola belum sepenuhnya berjalan	Tervujudnya pengembangan inovasi tata kelola pemerintahan daerah yang stabil dan berkelanjutan dari tahun ke tahun, dengan jumlah inovasi yang terjaga dan tidak berfluktuasi tajam. Inovasi yang dihasilkan bersifat strategis, berkualitas, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan serta kualitas pelayanan publik daerah.	Kesenjangan terlihat pada belum stabilnya pengembangan inovasi tata kelola pemerintahan daerah yang masih berfluktuasi antar tahun. Kondisi ini belum sesuai dengan kebutuhan ideal yang menuntut inovasi yang terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada kualitas serta dampak nyata terhadap kinerja pemerintahan dan pelayanan publik daerah.

No	Area Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		stabil dan berkelanjutan, serta masih dipengaruhi oleh dinamika program dan dorongan administratif tahunan.		
4.	Jumlah inovasi pelayanan publik; 5 tahun terakhir	Dalam lima tahun terakhir, jumlah inovasi pelayanan publik yang dihasilkan mencapai 514 inovasi, berdasarkan pelaporan pada Aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID), Innovative Government Award (IGA) Kementerian Dalam Negeri, serta paparan Gubernur. Meskipun secara kumulatif menunjukkan tingkat aktivitas inovasi yang tinggi, jumlah inovasi cenderung menurun dari tahun ke tahun, terutama sejak 2023 hingga 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan dan konsistensi pengembangan inovasi pelayanan publik masih menjadi tantangan, serta memerlukan penguatan strategi agar inovasi tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak nyata.	Terwujudnya pengembangan inovasi pelayanan publik yang konsisten dan berkelanjutan dari tahun ke tahun, dengan jumlah inovasi yang stabil serta kualitas dan dampak yang meningkat. Inovasi pelayanan publik tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi mampu memberikan perbaikan nyata terhadap kualitas layanan, efisiensi birokrasi, dan kepuasan masyarakat.	Kesenjangan terletak pada menurunnya konsistensi dan keberlanjutan inovasi pelayanan publik meskipun jumlah kumulatifnya tinggi. Kondisi ini belum sejalan dengan kebutuhan ideal yang menuntut pengembangan inovasi yang stabil, berorientasi pada kualitas dan dampak, serta mampu meningkatkan kinerja layanan dan kepuasan masyarakat secara berkelanjutan.
5.	Jumlah inovasi daerah lainnya (termasuk inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat), 5 tahun terakhir	Dalam lima tahun terakhir, jumlah inovasi daerah lainnya termasuk inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat mencapai 514 inovasi, sebagaimana tercatat dalam Aplikasi Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya inovasi daerah non-pemerintah dan inovasi berbasis masyarakat secara berkelanjutan, didukung oleh ekosistem inovasi yang inklusif dan kondusif. Partisipasi masyarakat dalam	Kesenjangan muncul pada keberlanjutan inovasi non-pemerintah dan inovasi berbasis masyarakat yang cenderung menurun meskipun partisipasi relatif tinggi. Kondisi ini belum

No	Area Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Kesenjangan
		(IID), Innovative Government Award (IGA), serta paparan Gubernur. Capaian ini menunjukkan partisipasi dan aktivitas inovasi yang cukup tinggi, namun trennya cenderung menurun sejak 2024 setelah relatif stabil pada periode 2021-2023. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberlanjutan inovasi non-pemerintah dan inovasi berbasis masyarakat masih menghadapi tantangan, serta memerlukan penguatan ekosistem dan dukungan agar inovasi dapat berkembang secara konsisten dan berkelanjutan.	menghasilkan inovasi terus diperkuat sehingga inovasi berkembang secara konsisten, berdampak, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.	memenuhi kebutuhan ideal berupa ekosistem inovasi yang inklusif dan konsisten dalam mendukung partisipasi masyarakat serta memastikan inovasi berkembang secara berkelanjutan dan berdampak nyata.
6.	Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) 5 tahun terakhir (termasuk predikat)	Dalam lima tahun terakhir, Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) secara konsisten berada pada predikat Sangat Inovatif, dengan rentang nilai antara 75,79 hingga 83,28. Capaian ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan inovasi daerah. Namun, fluktuasi nilai antar tahun terutama penurunan pada 2024 sebelum kembali meningkat pada 2025 mengindikasikan bahwa kualitas dan kinerja inovasi belum sepenuhnya stabil. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan	Terjaganya capaian Nilai Indeks Inovasi Daerah pada predikat Sangat Inovatif secara stabil dan berkelanjutan dengan peningkatan kualitas dari tahun ke tahun. Kinerja inovasi daerah menjadi lebih merata, konsisten, dan berdampak, sehingga fluktuasi nilai dapat diminimalkan dan posisi daerah sebagai provinsi sangat inovatif dapat dipertahankan secara berkelanjutan.	Kesenjangan terlihat pada fluktuasi nilai IID yang menunjukkan belum stabilnya kualitas dan kinerja inovasi daerah, meskipun predikat Sangat Inovatif tetap terjaga. Kondisi ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan ideal yang menuntut konsistensi, pemerataan kinerja inovasi, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan untuk mempertahankan capaian tersebut secara stabil.

No	Area Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		konsistensi dan keberlanjutan inovasi agar capaian "Sangat Inovatif" dapat dipertahankan secara berkelanjutan dan merata.		

6.2 Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi pada Tema 100.000 Sultan Muda

Sub bab ini menyajikan analisis kesenjangan yang berfokus pada tema prioritas "100.000 Sultan Muda Sumsel" sebagai program strategis penguatan kapasitas sosial-ekonomi melalui ekosistem riset dan inovasi daerah. Analisis ini disusun untuk membandingkan kondisi aktual pelaksanaan program dengan kondisi ideal yang ingin dituju. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan kepada perangkat daerah terkait, sehingga diperoleh informasi empiris mengenai persepsi, tingkat kesiapan, dan kapasitas institusional dalam mendukung implementasi program tersebut. Melalui pendekatan ini, berbagai hambatan, peluang, serta kebutuhan intervensi strategis dapat diidentifikasi secara lebih terarah. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh gambaran yang lebih sistematis mengenai sejauh mana dukungan riset dan inovasi telah berjalan serta aspek yang masih memerlukan penguatan untuk mempercepat keberhasilan program 100.000 Sultan Muda Sumsel.

Hasil analisis kuesioner menunjukkan sejumlah dimensi penting terkait tema prioritas, seperti kesiapan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan program pendukung, serta tingkat kolaborasi antar-perangkat daerah. Temuan tersebut menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi penguatan ekosistem riset dan inovasi yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti. Identifikasi kesenjangan secara sistematis ini memungkinkan pemerintah daerah merancang langkah-langkah penguatan yang selaras dengan arah pembangunan daerah, sekaligus memastikan bahwa implementasi program 100.000 Sultan Muda Sumsel dapat berjalan secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Tabel 6. 2 Analisis Kesenjangan Kondisi Saat ini dan Kondisi yang diharapkan Berdasarkan Tema Prioritas 100.000 Sultan Muda Sumse

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel					Responden/O PD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
I. Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah								
1.	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Kebijakan dapat berupa Perda, Perkada/Perbup, dan sebagainya.	(a) Berikan gambaran, apakah (saat ini) ada kebijakan yang menghambat dan atau mendukung Pengembangan kewirausahaan di Sumsel ? (b) Apakah sampai 5 tahun ke depan diperlukan kebijakan baru (berupa Perda atau Pergub atau peraturan jenis lain) untuk Pengembangan kewirausahaan di Sumsel?	Dinas Koperasi dan UKM	(a) Sudah terdapat beberapa kebijakan daerah yang mendukung pengembangan kewirausahaan, Namun, implementasinya masih menghadapi kendala pada aspek koordinasi lintas sektor dan keterbatasan anggaran pembinaan. (b) Belum ada regulasi khusus yang mengatur ekosistem kewirausahaan secara menyeluruh di tingkat provinsi.	(a) Lebih terintegrasi dan kolaborasi (b) Terbitnya Peraturan Gubernur atau Perda yang menjadi payung hukum pengembangan 100.000 wirausaha muda di Sumsel.	(a) Sudah memiliki kebijakan pengembangan kewirausahaan, namun masih terkendala pada aspek kordinasi lintas sektor dan keterbatasan anggaran sehingga diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi dan dapat menunjang sinergitas dan kolaborasi (b) Diperlukan adanya kebijakan yang berupa Pergub atau Perda yang dapat menjadi payung hukum pengembangan 100.000 wirausaha muda di Sumsel	(a) Diperlukan kebijakan terpadu lintas sektor yang dapat mengatur pengembangan kewirausahaan (b) Diharapkan adanya kebijakan berupa Pergub atau Perda yang	

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel					Kondisi Saat Ini (2025)		Kondisi Yang Diharapkan (2029)		Kesenjangan	
(1)	(2)	(3)	Responden/O PD	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Dinas Perindustrian			Negeri dan Produk Luar Negeri. (b) Terbitnya Perda atau Pergub tentang Pengembangan Kewirausahaan	mendukung pengembangan kewirausahaan			
				(a) Belum ada kebijakan yang mendukung pengembangan kewirausahaan (b) Ya, perlunya Perda atau Pergub atau peraturan jenis lain untuk pengembangan kewirausahaan di Sumsel	(a) Adanya kebijakan yang mendukung pengembangan kewirausahaan (b) Perda yang mengatur pengembangan kewirausahaan	(a) Diperlukan kebijakan yang dapat mendukung pengembangan kewirausahaan (b) Diharapkan adanya kebijakan berupa Perda yang dapat mengatur pengembangan kewirausahaan				
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(a) Terdapat kebijakan yang mendukung riset dalam aspek komoditas unggul setiap daerah untuk dibuat dalam bentuk kajian sampai pada peluang investasi yang siap dijual (b) Perlunya peraturan mengenai komoditas unggulan / potensi unggulan setiap kabupaten/kota.	(a) Tersedianya kajian potensi dan peluang investasi kabupaten/kota (b) Terbitnya peraturan tentang potensi unggulan daerah	(a) Sudah terdapat kebijakan yang mendukung riset dalam aspek komoditas, namun masih diperlukan adanya kajian potensi dan peluang investasi (b) Diperlukan terbitnya peraturan yang mengatur tentang potensi unggulan daerah				
			BRIDA	(a) Sudah ada kebijakan yang mendukung pengembangan	(a) Memaksimalkan implementasi kebijakan	(a) Kebijakan pengembangan kewirausahaan sudah				

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel						
(1)	(2)	(3)	Responden/O PD (4)	Kondisi Saat Ini (2025) (5)	Kondisi Yang Diharapkan (2029) (6)	Kesenjangan (7)
				kewirausahaan, namun implementasinya belum optimal (b) Iya, diperlukan kebijakan baru baik pergub maupun perda yang secara eksplisit mendukung pengembangan kewirausahaan khususnya terkait program 100.000 Sultan Muda	pengembangan kewirausahaan yang ada saat ini sehingga dapat berdampak secara optimal (b) Diterbitkannya kebijakan baru berupa pergub atau perda yang secara eksplisit mendukung pengembangan kewirausahaan	tersedia, namun implementasinya belum optimal, sehingga diperlukan penguatan pelaksanaan kebijakan agar berdampak secara maksimal (b) Kebijakan baru yang secara eksplisit mendukung pengembangan kewirausahaan, khususnya program 100.000 Sultan Muda, belum tersedia, sehingga diperlukan penerbitan pergub atau perda yang secara khusus menguatkan pengembangan kewirausahaan di Provinsi Sumatera Selatan.
			Bappeda	(a) Sudah ada kebijakan yang mendukung Pengembangan kewirausahaan di Sumsel (b) Perlu	Perlu adanya kebijakan baru (Perda/Pergub) yang mendukung untuk keberlanjutan Pengembangan kewirausahaan di Sumsel	Sudah ada kbijakan, namun belum secara khusus mendukung pengembangan kewirausahaan sehingga diperlukan adanya kebijakan baru berupa Perda atau Pergub yang

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel						
(1)	(2)	(3)	Responden/O PD (4)	Kondisi Saat Ini (2025) (5)	Kondisi Yang Diharapkan (2029) (6)	Kesenjangan (7)
		Apakah ada kebijakan (misalnya perda, pergub, keputusan OPD, dsb) yang mendukung Bantuan Operasional Desa/Kelurahan di Sumsel?	Bappeda	Sudah ada kebijakan yang mendukung untuk mengatasi permasalahan keuangan kabupaten/kota /desa saat ini yaitu melalui kebijakan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus	Tersedianya Pergub yang lebih terstruktur terhadap Perencanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK)	dapat mendukung kewirausahaan secara berkelanjutan Sudah ada kebijakan Pergub yang mendukung keterbatasan kemampuan keuangan, namun masih diperlukan kebijakan Pergub yang lebih terstruktur terhadap perencanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK)
			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sudah ada Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Bantuan Operasional Desa/Kelurahan di Sumsel	Tersedia Pergub yang lebih terstruktur terhadap Perencanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK)	Sudah ada Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Bantuan Operasional, namun masih perlu direvisi agar lebih terstruktur terhadap Perencanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK)
2.	Penataan basis data Riset dan Inovasi	(a) Apakah tersedia basis data yang mendukung pengembangan kewirausahaan di Propinsi Sumsel (b) Kalau tersedia, dalam bentuk apa basis data	Dinas Koperasi dan UKM	(a) Ada (b) Excel (c) Belum	(a) Adanya aplikasi khusus yang terintegrasi (b) - (c) -	(a) Sudah ada basis data yang mendukung pengembangan kewirausahaan melalui SIDT dan website, namun masih diperlukan dukungan aplikasi khusus yang dapat terintegrasi (b) -

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel						
(1)	(2)	(3)	Responden/O PD (4)	Kondisi Saat Ini (2025) (5)	Kondisi Yang Diharapkan (2029) (6)	Kesenjangan (7)
		tsb (manual/form, tercatat dalam Excel, dsb). (c) Apakah data tsb sudah dalam bentuk digital dan terhubung dengan Satu Data Indonesia?	Dinas Perindustrian	(a) Belum tersedia (b) Data yang dimiliki adalah data industri kecil menengah yang menggambarkan jumlah unit usaha, tenaga kerja, dan investasi. (manual, form excel) (c) Masih data manual belum terhubung dengan SDI	(a) Tersedianya basis data pengembangan kewirausahaan (b) Tersedianya basis data (manual, form excel) (c) Tersedia data digital	(c) - (a) Diperlukan adanya basis data yang dapat mendukung pengembangan kewirausahaan (b) Sudah ada basis data berupa data manual dan form excel, namun masih perlu dimaksimalkan (c) Data yang tersedia masih terkategori manual dan belum terhubung dengan SDI sehingga diperlukan adanya basis data digital yang dapat diakses secara <i>real time</i>
			Bappeda	(a) Tidak ada data khusus terkait list kewirausahaan yang dikehutarkan oleh Bappeda, namun pada RPJMD Prov Sumsel Tahun 2025-2029 sudah diakomodir terkait target rasio kewirausahaan yang harus dicapai oleh Prov Sumsel. (b) Tidak tersedia	(a) Tersedianya basis data yang mendukung Pengembangan kewirausahaan di Propinsi Sumsel (b) Tersedianya data dalam bentuk manual/form excel (c) Data yang sudah berbentuk digital dan terhubung	(a) Diperlukan basis data yang mendukung Pengembangan kewirausahaan di Provinsi Sumsel (b) Diperlukan basis data yang dapat berupa manual dan form excel (c) Diperlukan basis data yang sudah berbentuk digital dan dapat terhubung dengan Satu Data Indonesia

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel						
(1)	(2)	(3)	Responden/O PD (4)	Kondisi Saat Ini (2025) (5)	Kondisi Yang Diharapkan (2029) (6)	Kesenjangan (7)
			BRIDA	(c) Belum (a) Sudah ada basis data namun pemanfaatannya masih kurang maksimal (b) Iya, tersedia dalam bentuk excel (c) Data belum terhubung atau terintegrasi dengan Satu Data Indonesia	dengan Satu Data Indonesia (a) Dimaksimalkannya pemanfaatan basis data untuk mendukung pengembangan kewirausahaan (b) Data tidak hanya excel, namun terdapat juga data digital yang terintegrasi dengan sebuah platform (c) Data digital dapat terhubung dengan Satu Data Indonesia	(a) Basis data sudah tersedia, namun pemanfaatannya belum maksimal, sehingga diperlukan optimalisasi penggunaan basis data untuk mendukung pengembangan kewirausahaan. (b) Data masih terbatas dalam bentuk Excel, sehingga diperlukan pengembangan data digital yang terintegrasi dalam sebuah platform untuk mendukung pengelolaan data kewirausahaan. (c) Data kewirausahaan belum terhubung dengan Satu Data Indonesia, sehingga diperlukan integrasi data digital agar selaras dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
		(a) Apakah tersedia basis data yang mendukung kebijakan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(a) Tersedia, tetapi aplikasi masih dalam proses (b) Form Excel	(a) Tersedianya aplikasi BKBK dengan database online	(a) Sudah tersedia basis data yang mendukung kebijakan Bantuan Operasional, namun

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/O PD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Bantuan Operasional Desa/Kelurahan ? (b) Kalau tersedia, dalam bentuk apa basis data tsb (manual/form, tercatat dalam Excel, dsb).			(b) Aplikasi BKKB yang terealisasi	diperlukan peningkatan berupa ketersediaan aplikasi BKKB yang dapat terintegrasi dengan database online (b) Basis data masih dalam bentuk form excel sehingga diperlukan ketersediaan aplikasi BKKB untuk mendukung kebijakan bantuan operasional
			Bappeda	(a) Tidak ada (b) Tidak ada	(a) Tersedianya aplikasi BKKB dengan database secara online	Diperlukan ketersediaan aplikasi BKKB yang terintegrasi dengan database online untuk mendukung kebijakan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan
3.	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	(a) Apakah di setiap kabupaten/kota di Propinsi Sumsel tersedia infrastruktur berikut: pusat inovasi, inkubator, creative center, kawasan sains dan teknologi	BRIDA	(a) Sudah tersedia infrastruktur berupa pusat inovasi, inkubator dan lainnya, namun belum merata di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (b) Sebagian berfungsi dengan optimal,	(a) Tersedianya infrastruktur pendukung inovasi (pusat inovasi, inkubator, creative center, KST, RPK, PLUT, dan sejenisnya) yang merata di seluruh kabupaten/kota di	(a) Infrastruktur paten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. (b) Sebagian infrastruktur sudah berfungsi optimal, namun sebagian lainnya belum dimanfaatkan secara efektif dan belum dikelola secara maksimal.

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel		Responden/O PD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
		(KST), ruang publik kreatif (RPK), PLUT, dsb ? (b) Bagaimana keberfungsian dari infrastruktur (di atas) yang tersedia di setiap Kabupaten/kota ? (c) Bagaimana kondisi RTH (ruang terbuka hijau) di setiap kabupaten/kota: jumlah, lokasi, keberfungsian, dan apakah mungkin dikembangkan menjadi RPK (RTH yang dilengkapi WiFi, sarana pertemuan, dan kelembagaan pengelola)?	Dinas Koperasi dan UKM	namun sebagian lagi pemanfaatannya belum efektif (c) Kondisi RTH sebagian terawat, namun sebagian lagi cenderung kurang terawat atau terjaga	(c) Sebagian RTH belum terawat dan dikelola dengan baik, sehingga belum optimal dimanfaatkan atau dikembangkan sebagai RPK yang mendukung aktivitas kreatif dan kolaboratif.
		</			

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/O PD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				(c) -	(b) - (c) -	ruang publik kreatif (RPK), dan PLUT, (b) - (c) -
			Dinas Perindustrian	(a) Belum tersedia (b) - (c) -	(a) Adanya pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi (b) Berfungsinya infrastruktur pengembangan kewirausahaan (c) Adanya kondisi RTH menjadi RPK (RTH yang dilengkapi WiFi, sarana pertemuan, dan kelembagaan pengelola.	(a) Diperlukan adanya pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi (b) Diperlukan infrastruktur yang dapat berfungsi menunjang pengembangan kewirausahaan (c) Diperlukan adanya ruang terbuka publik yang berupa RTH, dilengkapi Wifi, sarana pertemuan dan kelembagaan pengelola
			Bappeda	(a) Tidak tersedia (b) Tidak tersedia (c) Tidak tersedia	(a) Tersedianya infrastruktur pendukung inovasi (pusat inovasi, inkubator, creative center, KST, RPK, PLUT, dan sejenisnya) di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.	(a) Saat ini belum tersedia infrastruktur pendukung inovasi di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. (b) Infrastruktur pendukung inovasi belum tersedia, sehingga belum terdapat fungsi dan pemanfaatan yang

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/O PD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					(b) Infrastruktur pendukung inovasi di setiap kabupaten/kota berfungsi dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung aktivitas riset, inovasi, dan kewirausahaan. (c) Tersedianya RTH yang memadai, terkelola dengan baik, dan dikembangkan menjadi RPK yang dilengkapi fasilitas digital, ruang pertemuan, serta kelembagaan pengelola di setiap kabupaten/kota.	mendukung riset dan inovasi daerah. (c) Belum tersedia RTH yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan menjadi RPK, sehingga belum mendukung penyediaan ruang publik kreatif di kabupaten/kota.
4.	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	(a) Apakah tersedia skema anggaran khusus untuk penumbuhan kewirausahaan ? (b) Apakah ada upaya mencari sumber-sumber	Badan Pengelola Keuangan dan Asst Daerah Bappeda Dinas Koperasi dan UKM	(a) Tidak ada (b) Tidak ada (a) Tidak tersedia (b) Tidak ada (a) Ada tapi belum maksimal	(a) Tidak ada (b) Tidak ada (a) Adanya anggaran edupreneur bagi masyarakat, anak	(a) Diperlukan anggaran edupreneur bagi masyarakat, anak

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/O PD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		pendanaan non APBD propinsi Sumsel (dana CSR, APBD provinsi, APBN, sumber lain) untuk mendukung Pengembangan kewirausahaan ?		(b) Ada dengan pihak terkait seperti lembaga keuangan non perbankan dan perbantuan, kampus dan lembaga pelatihan kerja	sekolah, mahasiswa, dan calon entrepreneur melalui program sultan muda (b) Adanya kerjasama atau MOU jangka panjang dengan program yang jelas	sekolah, mahasiswa, dan calon entrepreneur melalui program sultan muda (b) Sudah ada sumber pendanaan lain dari lembaga keuangan non perbankan dan perbantuan, namun masih perlu ditingkatkan melalui kolaborasi dengan beberapa stakeholder dan adanya kerjasama MoU jangka panjang dengan program yang jelas
	Dinas Perindustrian		(a) Tersedia (b) APBN	(a) Tersedia skema anggaran khusus untuk penumbuhan kembangan kewirausahaan (b) Adanya upaya untuk mencari sumber pendanaan non APBD	(a) Sudah ada skema anggaran namun masih diperlukan skema anggaran khusus yang dapat dimaksimalkan untuk pengembangan kewirausahaan (b) Diperlukan upaya untuk mencari sumber pendanaan non APBN karena saat ini hanya bergantung pada APBN	
	Dinas Penanaman		(a) Lebih kepada kerjasama/ pembinaan	(a) Peraturan yang mengatur atau SOP		(a) Diperlukan adanya peraturan khusus atau

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel					Responden/O PD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
			Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	UMKM melalui sistem OSS RBA (b) Sebagian kecil melalui sub kegiatan kewirausahaan	skema pendanaan kewirausahaan (b) Jumlah UMKM yang bermitra dengan BUMN/BUMD	SOP yang mengatur skema pendanaan kewirausahaan (b) Sudah ada sumber pendanaan non APBN, namun hanya sebatas melalui sub kegiatan kewirausahaan sehingga diperlukan mitra UMKM yang berasal dari BUMN/BUMD		
			BRIDA	(a) Belum tersedia anggaran khusus untuk pengembangan kewirausahaan (b) Ada, melalui program CSR baik dari perusahaan BUMN, BUMD, maupun swasta	(a) Tersedianya skema anggaran khusus yang terencana dan berkelanjutan untuk mendukung penumbuhan kewirausahaan di Provinsi Sumatera Selatan. (b) Terbangunnya mekanisme pendanaan non-APBD yang terkoordinasi dan berkelanjutan (CSR, APBN, dan sumber lain) untuk mendukung pengembangan kewirausahaan.	(a) Saat ini belum tersedia anggaran khusus untuk pengembangan kewirausahaan, sehingga dukungan pembiayaan masih belum terencana secara optimal. (b) Upaya pendanaan non-APBD sudah ada melalui program CSR, namun belum terintegrasi dalam skema pendanaan yang terencana dan berkelanjutan.		

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/O PD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Biro Perekonomian	(a) Tidak tersedia anggaran khusus untuk bidang kewirausahaan (b) Melakukan pembinaan terhadap BUMD untuk menyalurkan sebagian dana CSR kepada UMKM	(a) Tersedianya skema anggaran khusus yang terencana dan berkelanjutan untuk mendukung penumbuhkembang an kewirausahaan di Provinsi Sumatera Selatan. (b) Terbangunnya mekanisme pendanaan non- APBD yang terkoordinasi dan beragam (CSR, APBN, dan sumber lain) untuk mendukung pengembangan kewirausahaan.	(a) Saat ini tidak tersedia anggaran khusus untuk bidang kewirausahaan, sehingga dukungan pembayaan masih bersifat terbatas dan belum terencana secara khusus. (b) Upaya pendanaan non- APBD sudah dilakukan melalui pembinaan BUMD untuk penyaluran dana CSR, namun belum terintegrasi dalam skema pendanaan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk pengembangan kewirausahaan.
5.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Apakah saat ini ada kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan pengembangan kewirausahaan di Propinsi Sumsel ?	Dinas Koperasi dan UKM	Ada tapi belum maksimal. Beberapa kegiatan inventarisasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intellectual (merk, hak cipta, paten, Kekayaan Intellectual Komunal/ KIK, indikasi geografis, dsb.) sedang dan rutin dilakukan di Sumatera Selatan, khususnya oleh	Sistem Single Window Pendataan UMKM Provinsi	Sudah ada kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual, namun pemanfaatannya belum maksimal sehingga diperlukan ketersediaan sistem single window pendataan UMKM di Provinsi Sumatera Selatan

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel				Kondisi Saat Ini (2025)		Kondisi Yang Diharapkan (2029)		Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	Responden/O PD	(4)	(5)	(6)	(7)	
					Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan bersama perangkat daerah dan mitra (Dekranasda, Dinas Koperasi/UKM, perguruan tinggi, dsb.)			
			Dinas Perindustrian		Sudah pernah dilakukan fasilitasi terkait pendaftaran merk dagang tahun 2019. Untuk saat ini hanya pendampingan untuk NIB, PIRT.	Adanya kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual		Sudah dilakukannya inventarisasi data kekayaan intelektual, namun hanya melalui pendampingan NIB dan PIRT sehingga perlu diperkuatnya kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual yang lebih berkelanjutan
			BRIDA		Sudah ada kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual	Tersedianya basis data kekayaan intelektual yang terintegrasi, mutakhir, dan dimanfaatkan secara aktif untuk mendukung pengembangan kewirausahaan di Provinsi Sumatera Selatan.		Kegiatan inventarisasi kekayaan intelektual sudah dilakukan, namun belum sepenuhnya terintegrasi dan dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengembangan kewirausahaan.
			Bappeda		Tidak ada	Adanya kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta,		Diperlukan adanya kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual dalam rangka

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/O PD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					paten, dsb) yang terkait dengan pengembangan kewirausahaan di Propinsi Sumsel	pengembangan kewirausahaan
			Dinas Perdagangan	Sudah terdapat Program/Kegiatan/Sub Kegiatan terkait dengan Pengembangan Kewirausahaan	Tersedia Kebijakan terpadu lintas sektor yang mengatur pengembangan kewirausahaan produk Dalam Negeri dan Produk Luar Negeri.	Sudah ada program atau kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual, namun masih diperlukan adanya kebijakan Adanya kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual
II Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi						
6.	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	(a) Bagaimana kondisi/ kesiapan BRIDA atau OPD lain di Sumsel dalam mendukung Pengembangan kewirausahaan (anggaran, SDM, kemampuan melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait dengan riset dan inovasi)? (b) Apakah BRIDA atau OPD lain melakukan	BRIDA	(a) BRIDA siap mendukung penuh pengembangan kewirausahaan melalui kebijakan yang berlaku atau berdasarkan kajian perencanaan dengan pihak akademisi perguruan tinggi dan BRIN dalam rangka pengembangan kewirausahaan (b) BRIDA bekerjasama dengan pihak	(a) BRIDA dan OPD terkait memiliki dukungan anggaran, SDM, dan kapasitas koordinasi yang kuat dan berkelanjutan dalam mendukung pengembangan kewirausahaan. (b) Terbangunnya kerja sama yang terstruktur, dan berkelanjutan, dan berorientasi hasil antara BRIDA/OPD dengan BRIN, perguruan tinggi,	(a) BRIDA sudah siap mendukung melalui kebijakan dan kajian perencanaan, namun masih diperlukan penguatan berkelanjutan pada aspek anggaran, SDM, dan mekanisme koordinasi lintas pihak. (b) Kerja sama dengan perguruan tinggi dan BRIN sudah berjalan, namun belum sepenuhnya terstruktur dan berorientasi pada target hasil yang terukur

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel		Responden/O PD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		kerjasama dengan BRIN/swasta/ perguruan tinggi, khususnya dalam rangka pengembangan kewirausahaan untuk menghasilkan 100.000 pengusaha muda ?	Bappeda	(a) Bappeda mendukung pengembangan kewirausahaan melalui perencanaan yang tertuang didalam dokumen perencanaan daerah (b) Bappeda bekerjasama dengan akademisi melalui FGD, penyusunan kajian, buku Saku Investasi, Perdagangan, Industri dan Pariwisata	dan sektor swasta dalam pengembangan kewirausahaan dan penciptaan pengusaha muda.	dalam pengembangan kewirausahaan.
				(a) Target yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat tercapai (b) Dengan adanya 100.000 sultan muda dapat meningkatkan ekonomi lokal dan mengurangi angka pengangguran	(a) Bappeda mendukung pengembangan kewirausahaan sesuai yang tertuang di dalam dokumen perencanaan daerah dan diharapkan target yang dituju dapat tercapai (b) Sudah ada kerjasama dengan akademisi melalui FGD, penyusunan kajian dan lainnya dan diharapkan hadirnya 100.000 sultan muda dapat meningkatkan ekonomi lokal	
		Dinas Koperasi dan UKM	(a) Dinas Koperasi & UKM mendukung pengembangan kewirausahaan terkait dengan riset dan inovasi (b) Literasi dan edukasi untuk menumbuhkan	(a) Hasil riset dan inovasi dapat dimanfaatkan sebagai teknologi yg membantu pngembangan kewirausahaan (b) Menjadi program wajib	(a) Dinas Koperasi dan UKM mendukung pengembangan kewirausahaan melalui mitra riset dan diharapkan hasil riset inovasi dapat dimanfaatkan untuk membantu	

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel		Responden/O PD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				jiwa entrepreneur muda		pengembangan kewirausahaan (b) Sudah ada kerjasama melalui kegiatan pengembangan entrepreneur dan diharapkan program tersebut menjadi wajib sehingga dapat berkelanjutan
		Dinas Perindustrian	(a) - (b) Ya	(a) - (b) Adanya kerjasama yang berkelanjutan	(a) - (b) Sudah adanya kerjasama, namun bersifat sementara sehingga diperlukan kerjasama yang berkelanjutan untuk mengembangkan kewirausahaan	
		Dinas Pendidikan	(a) Dinas Pendidikan melalui Pendidikan Vokasi melaksanakan kegiatan kewirausahaan bagi siswa SMK (b) Dinas Pendidikan melalui pendidikan vokasi memiliki bursa kerja khusus (BKK) di 17 Kabupaten/Kota (c) Dinas Pendidikan melalui pendidikan	(a) Semakin sering melaksanakan kegiatan kewirausahaan (b) Menambah sekolah SMK untuk menjalankan bursa kerja khusus (c) Menambah	(a) Sudah ada kegiatan kewirausahaan melalui pendidikan vokasi, namun masih diperlukan peningkatan frekuensi dan keberlanjutan kegiatan agar dukungan terhadap pengembangan kewirausahaan semakin optimal.	

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/O PD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				vokasi memiliki kerjasama dengan industri		(b) Sudah ada kerja sama pendidikan vokasi dengan industri serta keberadaan BKK di 17 kabupaten/kota, namun masih diperlukan perluasan cakupan dengan menambah sekolah-sekolah SMK yang menjalankan BKK untuk memperkuat pengembangan kewirausahaan menuju 100.000 pengusaha muda.
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		(a) Disnakertrans memiliki UPTD BLKPPKT yang melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi (b) Disnakertrans belum melakukan kerjasama dengan BRIN/Swasta /PT untuk pengembangan kewirausahaan	(a) Pada Renstra Disnakertrans di tahun 2029 ditargetkan sudah mampu melakukan Pelatihan Berbasis Kompetensi sebanyak 80 Orang (b) Diharapkan tahun 2029 Disnakertrans dapat melakukan kerjasama dengan BRIN/Swasta /PT	(a) Sudah ada pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh UPTD BLKPPKT, namun masih dibutuhkan peningkatan kapasitas pelatihan agar dapat mencapai target Renstra tahun 2029, yaitu mampu melatih 80 orang dalam satu periode. (b) Diperlukan langkah untuk mendorong Disnakertrans mulai	

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel		Responden/O PD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(7)
7.	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Apakah di Propinsi Sumsel saat ini tersedia sarana pendukung (misalnya website, media koordinasi, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pencapaian 100.000 Sultan Muda ?	BRIDA	Belum tersedianya sarana pendukung (misalnya website, media koordinasi, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pencapaian 100.000 Sultan Muda	Tersedianya sarana pendukung kolaborasi riset dan inovasi yang terintegrasi (website, media koordinasi, dan platform digital) untuk mendukung pencapaian program 100.000 Sultan Muda.
			Bappeda	Belum ada	Diperlukan ketersediaan sarana pendukung untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pencapaian 100.000 Sultan muda
			Dinas Koperasi dan UKM	Belum ada	Diperlukan ketersediaan sarana pendukung untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pencapaian 100.000 Sultan muda

melakukan kerja sama dengan BRIN, swasta, dan perguruan tinggi guna memperkuat dukungan terhadap pengembangan kewirausahaan dan pencapaian target 100.000 pengusaha muda.

Saat ini belum tersedia sarana pendukung kolaborasi riset dan inovasi, sehingga koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan belum berjalan optimal.

Diperlukan ketersediaan sarana pendukung untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pencapaian 100.000 Sultan muda

Diperlukan ketersediaan sarana pendukung untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pencapaian 100.000 Sultan muda

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/O PD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Dinas Perindustrian	Belum	Tersedianya sarana pendukung (misalnya website, media koordinasi, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pencapaian 100.000 Sultan Muda	Diperlukan ketersediaan sarana pendukung untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pencapaian 100.000 Sultan muda
		Apakah di Propinsi Sumsel saat ini tersedia sarana pendukung (misalnya website, media koordinasi, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka Bantuan Operasional Desa/Kelurahan?	BRIDA	Sudah ada sarana pendukung (misalnya website, media koordinasi, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka Bantuan Operasional Desa/Kelurahan, namun pelaksanaannya belum optimal	Tersedianya sarana kolaborasi riset dan inovasi yang berfungsi optimal dan terkelola dengan baik untuk mendukung pelaksanaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan.	Sarana pendukung sudah tersedia, namun pelaksanaannya belum optimal, sehingga pemanfaatannya dalam mendukung kolaborasi riset dan inovasi masih terbatas.
			Bappeda	Belum ada	Ada	Diperlukan ketersediaan sarana pendukung untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka bantuan operasional Desa/Kelurahan
			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tersedia, tetapi Aplikasi masih dalam on proses	Aplikasi alur BKBK dari awal pengajuan Kab/Kota sampai dengan proses pencairan.	Sudah ada sarana pendukung melalui aplikasi, namun masih dalam proses dan diharapkan aplikasi dapat dimaksimalkan untuk mempermudah proses pencairan

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel				Responden/O PD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
III Kemitraan Riset dan Inovasi							
8.	Peningkatan difusi inovasi	Apakah Propinsi Sumsel melakukan transfer teknologi khususnya dalam Pengembangan/ penumbuhan kewirausahaan di kabupaten/kota?	BRIDA	Sudah ada, namun transfer teknologi khusus dalam pengembangan kewirausahaan masih terbatas	Terlaksananya transfer teknologi yang terstruktur, merata, dan berkelanjutan kepada kabupaten/kota untuk mendukung pengembangan dan penumbuhan kewirausahaan.	Transfer teknologi sudah dilakukan, namun masih terbatas dan belum merata, sehingga dampaknya terhadap pengembangan kewirausahaan di kabupaten/kota belum optimal.	
			Bappeda	Sudah dilakukan oleh OPD terkait	Hasil riset dan inovasi dapat dimanfaatkan sebagai teknologi yg membantu pengembangan kewirausahaan di Kabupaten/ Kota	Sudah ada transfer teknologi yang dilakukan oleh OPD terkait, namun masih diperlukan optimalisasi agar hasil riset dan inovasi dapat benar-benar dimanfaatkan sebagai teknologi pendukung pengembangan kewirausahaan di Kabupaten/ Kota.	
			Dinas Koperasi dan UKM	Iya	Hasil riset dan inovasi dapat dimanfaatkan sebagai teknologi yg membantu pngembangan kewirausahaan	Sudah ada upaya transfer teknologi, namun masih dibutuhkan penguatan pemanfaatan hasil riset dan inovasi sehingga teknologi tersebut dapat secara nyata membantu pengembangan kewirausahaan di daerah.	

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel				Responden/O PD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			Dinas Perindustrian	Belum	Adanya transfer teknologi khususnya dalam Pengembangan/ penumbuhan kewirausahaan di kabupaten/kota	Diperlukan implementasi transfer teknologi secara langsung untuk mendukung pengembangan dan penumbuhan kewirausahaan di Kabupaten/Kota.	
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Disnakertrans belum melakukan transfer teknologi khususnya dalam Pengembangan/ penumbuhan kewirausahaan di Kab/Kota	Diharapkan Disnakertrans dapat melakukan transfer teknologi khususnya dalam Pengembangan/ penumbuhan kewirausahaan di Kab/Kota	Diperlukan langkah agar Disnakertrans mulai melakukan transfer teknologi untuk pengembangan/ penumbuhan kewirausahaan, termasuk melalui Program Penempatan Tenaga Kerja dan Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja.	
9.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Apakah Propinsi Sumsel memiliki kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/ inovasi bagi pelaku usaha di kabupaten/kota?	BRIDA	Sudah pernah dilakukan kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/ inovasi bagi pelaku usaha di setiap kabupaten/kota, namun dampaknya belum signifikan	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/ inovasi yang terstruktur, merata, dan berdampak nyata bagi pelaku usaha di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.	Kegiatan sosialisasi dan diseminasi sudah pernah dilakukan, namun dampaknya belum signifikan terhadap peningkatan kapasitas dan kinerja pelaku usaha.	

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/O PD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Bappeda	Tidak ada	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/inovasi yang terencana, rutin, dan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.	Saat ini tidak tersedia kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/inovasi bagi pelaku usaha di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
			Dinas Koperasi dan UKM	Belum ada	Tersedianya program sosialisasi dan diseminasi hasil riset/inovasi yang terstruktur dan berkelanjutan bagi pelaku usaha di seluruh kabupaten/kota.	Kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/inovasi belum tersedia, sehingga pemanfaatan hasil riset oleh pelaku usaha belum berjalan.
			Dinas Perindustrian	Belum	Adanya kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/ inovasi bagi pelaku usaha di setiap kabupaten/kota	Diperlukan diadakannya kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/ inovasi bagi pelaku usaha di setiap kabupaten/kota
	Apakah Propinsi Sumsel memiliki kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset tentang Bantuan	BRIDA	Sudah pernah dilakukan kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset tentang Bantuan Operasional, namun	Tersedianya sosialisasi dan diseminasi hasil riset Bantuan Operasional Desa/Kelurahan yang merata dan berkelanjutan di	Sosialisasi dan diseminasi sudah dilakukan, namun masih terbatas dan belum merata di seluruh kabupaten/kota.	

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel						
(1)	(2)	(3)	Responden/O PD (4)	Kondisi Saat Ini (2025) (5)	Kondisi Yang Diharapkan (2029) (6)	Kesenjangan (7)
		Operasional Desa/Kelurahan di setiap kabupaten/kota?		masih terbatas dan belum merata	seluruh kabupaten/kota.	
			Bappeda	Tidak ada	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset terkait Bantuan Operasional Desa/Kelurahan yang terencana, rutin, dan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.	Kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset belum tersedia, sehingga diperlukan pelaksanaan yang terencana, rutin, dan menjangkau seluruh kabupaten/kota belum dapat terwujud.
			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tidak ada	Tidak ada	
IV Budaya Riset dan Inovasi						
10	Promosi dan kampanye inovasi	Apakah di Propinsi Sumsel pernah diselenggarakan promosi dan kampanye tentang program 100.000 Sultan Muda ?	BRIDA	Sudah pernah diselenggarakannya promosi dan kampanye melalui sosialisasi 12 program strategis kepala daerah, namun belum ada promosi secara khusus tentang 100.000 sultan muda sumsel	Terselenggaranya promosi dan kampanye yang fokus, konsisten, dan berskala luas khusus untuk mendukung program 100.000 Sultan Muda di Provinsi Sumatera Selatan.	Promosi dan kampanye sudah dilakukan secara umum, namun belum ada promosi khusus yang terfokus pada program 100.000 Sultan Muda.
		Apakah di Propinsi Sumsel pernah diselenggarakan promosi dan	Dinas Koperasi dan UKM	Sudah ada	Menjadi program wajib	Sudah ada kegiatan promosi dan kampanye kewirausahaan, namun masih diperlukan

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/O PD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		kampanye tentang Promosi Usaha Kecil dan Menengah Para Wirausaha Muda Sumatera Selatan?				penguatan agar kegiatan tersebut ditetapkan sebagai program wajib sehingga pelaksanaannya lebih terencana, terukur, dan berkelanjutan.
			Dinas Pemuda dan Olahraga	Melaksanakan pelatihan kewirausahaan pemuda di Kabupaten/Kota	Kegiatan dapat terus dilaksanakan dengan Peningkatan kualitas pelatihan. Peserta pelatihan diharapkan mampu menerapkan hasil pelatihan sehingga dapat meningkatkan produksi dan penjualan	Sudah ada pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan, namun masih dibutuhkan peningkatan kualitas pelatihan serta pendampingan agar peserta mampu menerapkan hasil pelatihan secara nyata untuk meningkatkan produksi dan penjualan.
			BRIDA	Sudah pernah diselenggarakan promosi dan kampanye tentang Promosi Usaha Kecil dan Menengah Para Wirausaha Muda Sumatera Selatan	Terselenggaranya promosi dan kampanye UKM wirausaha muda yang berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan akses pasar di Provinsi Sumatera Selatan.	Promosi dan kampanye sudah diselenggarakan, namun belum sepenuhnya dilakukan secara berkelanjutan dan terukur dampaknya terhadap penguatan UKM wirausaha muda.
		Apakah di Propinsi Sumsel pernah diselenggarakan promosi dan	BRIDA	Belum pernah diselenggarakannya promosi dan kampanye tentang Bantuan	Terselenggaranya promosi dan kampanye yang terencana, rutin, dan menjangkau	Promosi dan kampanye Bantuan Operasional Desa/Kelurahan belum pernah diselenggarakan,

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/O PD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		kampanye tentang Bantuan Operasional Desa/Kelurahan ?		Operasional Desa/Kelurahan	seluruh kabupaten/kota mengenai Bantuan Operasional Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan.	sehingga diperlukan pelaksanaan promosi dan kampanye yang terencana dan berkelanjutan untuk mendukung pemahaman dan implementasi Bantuan Operasional Desa/Kelurahan.
11	Apresiasi prestasi inovasi	Apakah di Propinsi Sumsel pernah diselenggarakan lomba inovasi? Apakah lomba inovasi tersebut dapat diarahkan untuk mendukung Pengembangan 100.000 Sultan Muda ?	BRIDA	Belum pernah menyelenggarakan secara khusus terkait lomba inovasi dalam mendukung 100.000 sultan muda sumsel	Terselenggaranya lomba inovasi yang terstruktur dan berkelanjutan serta diarahkan secara khusus untuk mendukung pencapaian program 100.000 Sultan Muda di Provinsi Sumatera Selatan.	Belum pernah diselenggarakan lomba inovasi yang secara khusus diarahkan untuk mendukung program 100.000 Sultan Muda.
			Dinas Koperasi dan UKM	Ada	Menjadi Agenda Tahunan dengan Dukungan Anggaran dan Kolaborasi bberpa pihak	Lomba inovasi belum diselenggarakan secara terstruktur dan berkelanjutan sebagai agenda tahunan, sehingga diperlukan penguatan perencanaan, dukungan anggaran, serta kolaborasi lintas pihak untuk mendukung pengembangan 100.000 Sultan Muda.

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel		Responden/O PD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesimpulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Apakah ada penyelenggaraan innovation award tentang inovasi pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan?	BRIDA	Belum pernah diselenggarakannya innovation award tentang inovasi pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan	Terselenggaranya innovation award untuk mendorong inovasi dalam pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan.
12	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Apakah ada program menumbuhkan perusahaan pemula berbasis riset/wirausaha baru di setiap kabupaten/kota untuk mendukung pencapaian 100.000 Sultan Muda ?	BRIDA	Sudah ada, namun hanya sebatas penumbuhan wirausaha baru	Program sudah ada, namun masih terbatas pada penumbuhan wirausaha baru dan belum berbasis riset serta inovasi secara optimal.
			Dinas Koperasi dan UKM	Belum ada	Program penumbuhan perusahaan pemula berbasis riset belum tersedia, sehingga diperlukan inisiasi dan pelaksanaan program penumbuhan perusahaan pemula berbasis riset di setiap kabupaten/kota untuk mendukung pencapaian 100.000 Sultan Muda.

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/O PD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Dinas Perindustrian	Ada kegiatan terkait penumbuhan wirausaha baru	adanya program menumbuhkan pertumbuhan pemuda berbasis riset/ wirausaha baru di setiap kabupaten/kota untuk mendukung pencapaian 100.000 Sultan Muda	Belum dilakukan inventarisasi dan kodefikasi teknologi masyarakat dan/atau kearifan lokal terkait pengembangan kewirausahaan pemuda.
13	Inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Apakah di Propinsi Sumsel ada kodefikasi teknologi masyarakat dan/atau kearifan lokal terkait dengan pengembangan kewirausahaan pemuda ?	BRIDA	Belum dilakukannya kodefikasi teknologi masyarakat dan/atau kearifan lokal terkait dengan pengembangan kewirausahaan pemuda	Tersedianya inventarisasi dan kodefikasi teknologi masyarakat serta kearifan lokal yang terstruktur untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.	Kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal belum dilakukan, sehingga diperlukan inventarisasi dan kodefikasi yang terstruktur untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.
			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Tidak ada	Program pengembangan kebudayaan dalam konteks budaya perwisata dan kearifan lokal adalah konsep pelestarian dan pengembangan budaya yang ber akar pada adat tradisi	Kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal belum tersedia, sehingga diperlukan penguatan inventarisasi dan kodefikasi kearifan lokal agar program pengembangan kebudayaan dapat mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda secara berkelanjutan.

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/O PD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Dinas Koperasi dan UKM	Belum ada	Tersedianya kodifikasi teknologi masyarakat dan/atau kearifan lokal yang terstruktur dan terdokumentasi untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda di Provinsi Sumatera Selatan.	Kodifikasi teknologi masyarakat dan/atau kearifan lokal belum tersedia, sehingga diperlukan penyusunan kodifikasi yang terstruktur dan terdokumentasi untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.
		Inventarisasi dan kodifikasi teknologi masyarakat atau kearifan lokal yang terkait dengan pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan ?	BRIDA	Belum ada Inventarisasi dan kodifikasi teknologi masyarakat atau kearifan lokal yang terkait dengan pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan	Tersedianya inventarisasi dan kodifikasi teknologi masyarakat atau kearifan lokal yang mendukung pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan	Belum tersedia inventarisasi dan kodifikasi teknologi masyarakat atau kearifan lokal terkait pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan.
			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Tidak ada	Tersedianya inventarisasi dan kodifikasi teknologi masyarakat atau kearifan lokal yang terstruktur dan terdokumentasi untuk mendukung pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan.	Inventarisasi dan kodifikasi teknologi masyarakat atau kearifan lokal belum tersedia, sehingga diperlukan penyusunan inventarisasi dan kodifikasi yang terstruktur untuk mendukung pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan.
V	Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah					

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/O PD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Apakah di Propinsi Sumsel ada prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pencapaian 100.000 Sultan Muda?	BRIDA	Belum ada prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pencapaian 100.000 Sultan Muda	Tersedianya prakarsa riset dan inovasi yang terencana dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian program 100.000 Sultan Muda di Provinsi Sumatera Selatan.	Saat ini belum terdapat prakarsa riset dan inovasi yang secara khusus diarahkan untuk mendukung pencapaian program 100.000 Sultan Muda.
			Dinas Koperasi dan UKM	Belum ada	Adanya prakarsa riset dan inovasi yang terencana dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian program 100.000 Sultan Muda di Provinsi Sumatera Selatan.	Prakarsa riset dan inovasi belum tersedia, sehingga diperlukan inisiasi dan pelaksanaan riset dan inovasi untuk mendukung pencapaian 100.000 Sultan Muda.
			Dinas Perindustrian	belum mulai	Adanya prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pencapaian 100.000 Sultan Muda	Prakarsa riset dan inovasi untuk mendukung pencapaian 100.000 Sultan Muda belum dimulai, sehingga diperlukan inisiasi dan pelaksanaan prakarsa riset dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.
		Apakah ada prakarsa riset dan inovasi untuk pengelolaan	BRIDA	Belum ada prakarsa riset dan inovasi untuk pengelolaan Bantuan	Tersedianya prakarsa riset dan inovasi yang terstruktur untuk mendukung	Belum terdapat prakarsa riset dan inovasi yang diarahkan untuk pengelolaan Bantuan

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel		Responden/O PD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Bantuan Operasional Desa/Kelurahan ?		Operasional Desa/Kelurahan	Operasional Desa/Kelurahan.
			Bappeda	Belum ada	Adanya prakarsa riset dan inovasi yang terencana dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan.
15	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Apakah setiap kabupaten/kota di Propinsi Sumsel melakukan pembentukan dan pengembangan klaster inovasi atau sentra UKM berbasis kelompok usaha untuk mendukung program 100.000 Sultan Muda ?	BRIDA	Belum ada pembentukan dan pengembangan klaster inovasi atau sentra UKM berbasis kelompok usaha untuk mendukung program 100.000 Sultan Muda	Prakarsa riset dan inovasi belum tersedia, sehingga diperlukan inisiasi dan pelaksanaan riset dan inovasi untuk mendukung pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan.
			Dinas Koperasi dan UKM	Belum ada	Belum terdapat pembentukan dan pengembangan klaster inovasi atau sentra UKM yang secara khusus diarahkan untuk mendukung program 100.000 Sultan Muda.
					Pembentukan dan pengembangan klaster inovasi atau sentra UKM belum tersedia, sehingga diperlukan inisiasi dan pengembangan klaster inovasi atau sentra UKM untuk mendukung program 100.000 Sultan

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/O PD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Apakah program Pengembangan 100.000 Sultan Muda telah dikaitkan dengan kebijakan di masing-masing kabupaten/kota (koherensi kebijakan)?	BRIDA	Iya, program pengembangan 100.000 Sultan muda merupakan salah satu dari 12 program strategis Gubernur Sumatera Selatan	Program 100.000 Sultan Muda terintegrasi dan selaras dengan kebijakan serta program pembangunan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.	Muda di setiap kabupaten/kota. Program 100.000 Sultan Muda telah ditetapkan sebagai program strategis provinsi, namun belum sepenuhnya diarusutamakan dan dioperasionalkan dalam kebijakan kabupaten/kota.
			Bappeda	12 Program Strategis Gubernur Sumatera Selatan termasuk program 100.000 Sultan Muda sudah disosialisasikan ke 17 Kabupaten Kota	Program pengembangan 100.000 Sultan Muda dapat tercapai melalui dukungan dari 17 kabupaten kota	Program 100.000 Sultan Muda telah disosialisasikan ke 17 kabupaten/kota, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan daerah, sehingga diperlukan penguatan dukungan kebijakan dari seluruh kabupaten/kota agar pencapaian program 100.000 Sultan Muda dapat terwujud.
			Dinas Koperasi dan UKM	Belum ada	Program Pengembangan 100.000 Sultan Muda terintegrasi dan selaras dengan kebijakan di seluruh kabupaten/kota di	Koherensi kebijakan belum tersedia, sehingga diperlukan penyeselaran dan integrasi kebijakan antara provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel						
(1)	(2)	(3)	Responden/O PD (4)	Kondisi Saat Ini (2025) (5)	Kondisi Yang Diharapkan (2029) (6)	Kesenjangan (7)
		Apakah ada kohensi/sinkronisasi kebijakan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan?	Bappeda	Belum ada	Provinsi Sumatera Selatan. Terwujudnya sinkronisasi dan keselarasan kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan.	program 100.000 Sultan Muda. Sinkronisasi kebijakan belum tersedia, sehingga diperlukan penguatan koordinasi dan penyelarasan kebijakan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan.
VI Penyeragaman dengan perkembangan global						
17	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Apakah di Propinsi Sumsel ada program/ kegiatan fasilitasi kepada pelaku usaha muda dalam memenuhi Standarisasi produk masing-masing (seperti: perijinan (BPOM, PIRT, dsb), Kemasan, Label Halal, Komposisi/ingredien nt), Ukuran Berat Bersih, dsb) ?dalam mendukung tercapainya 100.000 Sultan Muda	Dinas Perdagangan	Terdapat Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan terkait Pengawasan Perijinan, Kemasan, Label, dsb	Tersedia kebijakan terpadu lintas sektor yang memenuhi Standardisasi produk.	Diperlukan kebijakan atau program terpadu lintas sektor yang mampu menyatukan berbagai program pengawasan perizinan, kemasan, dan label agar standarisasi produk dapat dipenuhi secara menyeluruh.
			Dinas Koperasi dan UKM	Sudah ada	Adanya ruang khusus dan SDM yang berperan aktif dan bertanggung jawab melalui pola anggaran	Sudah ada program yang memfasilitasi untuk standarisasi produk, namun masih dibutuhkan ruang khusus, SDM yang berperan aktif, serta dukungan pola anggaran yang terstruktur untuk memastikan fasilitasi

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/O PD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Dinas Perindustrian	Iya, Sudah ada	Ada program/ kegiatan fasilitasi kepada pelaku usaha muda dalam memenuhi Standarisasi produk masing-masing (seperti: perijinan (BPOM, PIRT, dsb), Kemasan, Label Halal, Komposisi/ingredient), Ukuran Berat Bersih, dsb) dalam mendukung tercapainya 100.000 Sultan Muda	standardisasi produk berjalan optimal. Sudah ada program yang memfasilitasi untuk standarisasi produk, namun masih diperlukan peningkatan program fasilitasi yang secara eksplisit diarahkan untuk mendukung pencapaian target 100.000 Sultan Muda.
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terdapat program pelayanan penanaman modal untuk memfasilitasi perizinan UMKM untuk penerbitan NIB, dan kegiatan fasilitasi para UMKM mengenai sertifikasi halal,haki,dsb.	Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan berdasarkan kewenangan Prov/kab/kota	Sudah ada program yang memfasilitasi untuk standarisasi produk, namun masih diperlukan peningkatan jumlah penerbitan izin dan non- izin sesuai kewenangan Provinsi/ Kabupaten / Kota sebagai tindak lanjut dari layanan fasilitasi perizinan dan sertifikasi yang telah tersedia.
18	Penguatan kerjasama internasional	Apakah ada kerjasama internasional yang dilakukan Propinsi Sumsel untuk	BRIDA	Belum ada kerjasama internasional yang dilakukan Propinsi Sumsel untuk Pengembangan kewirausahaan pemuda	Terbangunnya kerja sama internasional yang terstruktur dan berkelanjutan untuk mendukung	Belum terdapat kerja sama internasional yang diarahkan untuk pengembangan kewirausahaan pemuda

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/O PD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pengembangan kewirausahaan pemuda dalam mencapai 100.000 Sultan Muda?		dalam mencapai 100.000 Sultan Muda	pengembangan kewirausahaan pemuda dalam pencapaian 100.000 Sultan Muda.	dalam mendukung pencapaian 100.000 Sultan Muda.
			Dinas Koperasi dan UKM	Belum ada	Terbangunnya kerja sama internasional yang terstruktur dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda dalam pencapaian program 100.000 Sultan Muda.	Kerja sama internasional belum tersedia, sehingga diperlukan inisiasi dan pengembangan kerja sama internasional untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda dalam mencapai 100.000 Sultan Muda.

6.3 Prioritas Penanganan Kesenjangan

Berdasarkan hasil analisis kesenjangan pada sub-bab 6.1 dan 6.2, terdapat beberapa isu prioritas yang memerlukan penanganan segera untuk memastikan keberhasilan program 100.000 Sultan Muda Sumsel. Prioritas ini dikelompokkan menjadi tiga level utama:

Level 1: Prioritas Tertinggi (Mendesak dan Fundamental)

1. **Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi:** Kesenjangan terbesar terletak pada belum optimalnya koordinasi dan sinergi antar-OPD. Sangat mendesak untuk membentuk satuan tugas atau tim khusus yang dipimpin oleh gubernur/wakil gubernur untuk memastikan seluruh OPD terkait bergerak bersama dan program tidak tumpang tindih.
2. **Penyusunan Regulasi Payung (Perda/Pergub):** Tidak adanya regulasi spesifik yang menjadi payung hukum bagi program 100.000 Sultan Muda adalah kesenjangan krusial. Penetapan Perda atau Pergub tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda akan memberikan kepastian hukum, legitimasi, dan keberlanjutan program di masa depan.
3. **Penyediaan Anggaran Khusus:** Belum adanya skema anggaran khusus yang teralokasi untuk program ini merupakan hambatan besar. Anggaran harus dialokasikan secara khusus dan terencana dalam APBD perubahan atau tahun anggaran berikutnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan inkubasi, pelatihan, dan bantuan modal.

Level 2: Prioritas Tinggi (Strategis dan Berdampak Besar)

1. **Membangun Basis Data Terpadu:** Kesenjangan data kewirausahaan harus segera diatasi dengan membangun basis data tunggal yang terintegrasi (Single Database) dari berbagai OPD untuk memudahkan penargetan dan monitoring.

2. **Mengoptimalkan Program Inkubasi:** Perlunya revitalisasi dan penguatan inkubator bisnis yang sudah ada agar lebih efektif dalam membina calon wirausaha muda. Ini termasuk pelatihan SDM pengelola inkubator dan penyediaan fasilitas yang memadai.
3. **Meningkatkan Promosi dan Kampanye Program:** Kesadaran dan minat publik terhadap program ini masih rendah. Diperlukan kampanye masif dan komunikasi publik yang efektif untuk menjangkau generasi muda di seluruh kabupaten/kota.

Level 3: Prioritas Jangka Menengah (Penguatan dan Keberlanjutan)

1. **Penguatan Kemitraan Strategis:** Meskipun sudah ada, kemitraan dengan perguruan tinggi, BRIN, dan dunia usaha perlu diperkuat dengan nota kesepahaman (MoU) dan program kerja yang jelas dan terukur.
2. **Penyediaan Infrastruktur Pendukung:** Pembangunan RTH menjadi RPK (Ruang Publik Kreatif) dan penyediaan akses internet di ruang publik dapat direncanakan untuk mendukung ekosistem inovasi jangka panjang, meskipun bukan prioritas paling mendesak di tahun pertama.
3. **Pengembangan Kerjasama Internasional:** Meskipun masih belum ada, menjajaki dan membangun kerjasama internasional untuk pertukaran pengetahuan dan akses pasar global adalah langkah strategis untuk keberlanjutan program di tahun-tahun mendatang.

Hasil analisis kesenjangan di Bab VI telah mengidentifikasi secara jelas area-area mana saja yang memerlukan perbaikan dan penguatan untuk mencapai target pembangunan. Temuan ini menjadi dasar yang kuat bagi perumusan langkah-langkah konkret. Selanjutnya, Bab VII akan merumuskan strategi-strategi utama yang harus dijalankan untuk menutup kesenjangan tersebut, baik dalam hal kapasitas kebijakan berbasis bukti maupun dalam pengembangan ekosistem riset dan inovasi secara keseluruhan.

BAB VII

STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

7.1 Strategi Penguatan Kapasitas Kebijakan Berbasis Bukti

Pada bagian ini diuraikan strategi untuk meningkatkan kemampuan Provinsi Sumatera Selatan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*). Strategi tersebut diarahkan pada optimalisasi berbagai faktor pendukung, meliputi penguatan kapasitas sumber daya manusia IPTEK daerah, penyediaan fasilitas pendukung analisis kebijakan dan inovasi, kecukupan dan keberlanjutan anggaran riset, keberlanjutan program riset dan inovasi, penguatan kelembagaan IPTEK, serta perluasan jejaring riset dan inovasi dengan mitra strategis. Faktor-faktor ini menjadi fondasi utama dalam memastikan proses perumusan kebijakan daerah berjalan secara terukur, sistematis, dan berbasis data.

Perumusan strategi ini juga mempertimbangkan capaian kemampuan daerah dalam lima tahun terakhir, mencakup jumlah rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dihasilkan dan dimanfaatkan, pengembangan inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, inovasi daerah lainnya, serta dinamika Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID). Melalui penguatan dan perbaikan berkelanjutan terhadap aspek-aspek tersebut, Provinsi Sumatera Selatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas analisis kebijakan dan mendorong inovasi yang lebih adaptif, efektif, serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian pembangunan daerah.

Tabel 7. 1 Strategi Daerah dan Arah Kebijakan Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti

No	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
1.	Penguatan kapasitas SDM IPTEK dan analisis kebijakan daerah	Meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM IPTEK, peneliti, analisis kebijakan, dan perencana melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, pengembangan talenta digital, serta kemitraan dengan perguruan tinggi guna mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti secara konsisten.
2.	Penguatan kelembagaan IPTEK sebagai penggerak <i>evidence based policy</i>	Memperkuat peran kelembagaan IPTEK, khususnya BRIDA, sebagai koordinator riset dan inovasi daerah yang terintegrasi dengan proses perencanaan dan perumusan kebijakan, sehingga hasil kajian riset secara sistematis dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan daerah.
3.	Optimalisasi program riset dan inovasi daerah yang berkelanjutan	Menyelenggarakan program riset dan inovasi daerah yang terstruktur, lintas sektor, dan berkelanjutan dengan orientasi pada kebutuhan strategis daerah, sehingga mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang relevan dan berdampak nyata.
4.	Penguatan pemanfaatan hasil riset dalam perumusan kebijakan daerah	Mendorong mekanisme formal yang mewajibkan penggunaan hasil kajian dan naskah akademik sebagai dasar penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah, guna meningkatkan konsistensi penerapan <i>evidence based policy</i> dalam proses pengambilan keputusan.
5.	Pengembangan jejaring riset dan inovasi berbasis kolaborasi Pentahelix	Mengoptimalkan kerja sama riset dan inovasi dengan akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media untuk memperkuat kualitas kajian, memperluas perspektif kebijakan, serta meningkatkan relevansi rekomendasi kebijakan berbasis bukti terhadap kebutuhan daerah.
6.	Penyediaan dan penguatan fasilitas pendukung riset dan analisis kebijakan	Menyediakan dan mengoptimalkan fasilitas riset, data, dan analisis kebijakan yang terintegrasi dengan kelembagaan IPTEK, sehingga proses penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
7.	Penguatan dukungan anggaran riset dan kebijakan berbasis bukti	Menjamin ketersediaan anggaran riset dan inovasi daerah yang memadai, berkelanjutan, dan terencana melalui APBD dan sumber pendanaan lain yang sah, guna mendukung keberlangsungan riset serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti secara optimal.

7.2 Strategi Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi

Mendorong pengembangan produk unggulan daerah (PUD) melalui penguatan ekosistem riset dan inovasi menjadi langkah

penting dalam meningkatkan daya saing serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Pendekatan ini dilakukan secara sistematis dengan melibatkan berbagai pihak, yakni pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan masyarakat. Setiap pihak berperan sesuai kapasitasnya untuk bersama-sama mengembangkan produk unggulan yang mampu bersaing di pasar. Komoditas yang telah ditetapkan sebagai PUD meliputi Padi, Jagung, Cabai, Bawang Merah, Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Kelapa, Sapi, Ikan (Ikan Patin, Lele, Nila, Mas, Gurame, dan Gabus), Udang, Wisata Alam, serta Kerajinan dan Produk Kreatif yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing. Strategi dan arah kebijakan untuk mendukung pengembangan ini telah disusun selaras dengan komponen ekosistem riset dan inovasi, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 7. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah

No	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah berbasis potensi lokal	Mendorong pengembangan industri hilir, memperkuat kapasitas pelaku usaha lokal, serta memfasilitasi inovasi dan diversifikasi produk untuk meningkatkan daya saing di pasar nasional dan global.
2.	Memperkuat kelembagaan dan ekosistem inovasi daerah	Membangun jejaring riset dan inovasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan komunitas serta memperkuat sistem pendukung inovasi dan teknologi untuk pengembangan produk unggulan.
3.	Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk produk unggulan	Mendorong penerapan prinsip ramah lingkungan dalam proses produksi, memperkuat regulasi pengelolaan sumber daya, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap praktik ekonomi hijau.
4.	Meningkatkan akses pasar dan promosi produk unggulan daerah	Mengembangkan platform pemasaran digital, memperluas jaringan distribusi, memperkuat branding daerah, serta mengikutsertakan produk unggulan dalam pameran dan promosi tingkat nasional maupun internasional.
5.	Meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas kewirausahaan daerah	Melaksanakan pelatihan teknis dan manajerial bagi pelaku UMKM, mendorong regenerasi pelaku usaha muda, serta membangun pusat pelatihan terpadu untuk pengembangan produk unggulan daerah.

Kemudian Adapun strategi penguatan ekosistem riset dan inovasi di daerah yang dirancang untuk menjawab berbagai tantangan dan isu yang akan dihadapi dalam lima tahun mendatang. Pendekatan ini mengacu pada kerangka pembangunan ekosistem riset dan inovasi yang terintegrasi. Salah satu persoalan utama yang dihadapi Provinsi Sumatera Selatan hingga dua dekade ke depan adalah masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, yang berdampak pada lambatnya percepatan pembangunan daerah. Melalui upaya sistematis dalam pengembangan ekosistem riset dan inovasi, diharapkan isu-isu prioritas tersebut dapat ditangani secara lebih efektif. Strategi dan arah kebijakan yang disusun telah diselaraskan dengan unsur-unsur utama dalam ekosistem riset dan inovasi, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 7.3.

Tabel 7. 3 Strategi Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah

No	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting	Memperluas program perlindungan sosial, meningkatkan akses pangan bergizi, memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak, serta mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga miskin berbasis komunitas dan kewirausahaan lokal.
2.	Mengoptimalkan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan hilirisasi komoditas unggulan	Mendorong penerapan pertanian modern berbasis teknologi, memperkuat rantai pasok dan industri pengolahan hasil pertanian, serta memperluas kemitraan dengan sektor swasta untuk meningkatkan nilai tambah produk daerah.
3.	Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan dasar pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur publik	Meningkatkan akses dan kualitas sekolah serta fasilitas kesehatan di seluruh wilayah, memperkuat kapasitas tenaga pendidik dan tenaga medis, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi.
4.	Memperkuat ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana daerah	Meningkatkan sistem peringatan dini, memperluas restorasi lahan gambut dan rehabilitasi hutan, memperkuat tata kelola sumber daya alam berbasis mitigasi risiko, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan pengelolaan lingkungan.
5.	Meningkatkan daya saing daerah melalui penguatan investasi	Menyederhanakan perizinan investasi, memperkuat infrastruktur ekonomi dan kawasan industri, mendorong pengembangan energi

	dan transformasi ekonomi berkelanjutan	terbarukan, serta memfasilitasi pelaku usaha lokal agar siap menghadapi transisi ekonomi hijau.
6.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kapasitas fiskal untuk mendukung pembangunan daerah	Mendorong reformasi birokrasi berbasis digital, memperkuat akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah, meningkatkan optimalisasi pendapatan asli daerah, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam pengembangan ekonomi dan pelayanan publik.

Dengan strategi yang telah dirumuskan pada Bab VII, langkah selanjutnya adalah menerjemahkannya ke dalam rencana aksi yang operasional dan terukur. Agar implementasi strategi dapat berjalan terarah, efektif, dan tepat sasaran, diperlukan suatu peta jalan yang jelas. Bab VIII menyajikan Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah yang memuat rencana aksi, tahapan strategis, serta mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat mencapai target 100.000 Sultan Muda Sumsel pada akhir periode 2029.

BAB VIII

PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH

8.1 Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah 100.000 Sultan Muda Sumsel

Rencana aksi penguatan ekosistem riset dan inovasi untuk mendukung program 100.000 Sultan Muda Sumatera Selatan dibangun melalui enam elemen utama ekosistem inovasi. Setiap elemen memuat rangkaian kegiatan strategis, indikator kinerja, target tahunan, serta sasaran akhir yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas Sultan Muda, meningkatkan pemanfaatan teknologi, serta memperluas akses pasar dan kemitraan. Rencana aksi ini disusun untuk memastikan bahwa ekosistem pendukung mulai dari kebijakan, kelembagaan, SDM, hingga jejaring inovasi berfungsi secara terpadu guna mempercepat lahirnya 100.000 pelaku usaha muda yang produktif, kreatif, dan berdaya saing di Sumatera Selatan. Berikut ini ringkasan penjelasan dari setiap elemen ekosistem riset dan inovasi daerah sebagai landasan pengembangan 100.000 Sultan Muda Sumsel.

1. Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah

Penguatan kebijakan dan infrastruktur riset menjadi dasar penting dalam mendukung lahirnya 100.000 Sultan Muda di Sumatera Selatan. Pemerintah provinsi perlu menyediakan regulasi yang mempermudah pengembangan kewirausahaan muda, akses permodalan, serta fasilitas inovasi seperti inkubator bisnis, laboratorium produksi, dan pusat pelatihan teknologi. Pemantapan kebijakan ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif agar para Sultan Muda dapat mengakses informasi, teknologi, serta sumber daya yang diperlukan untuk membangun usaha yang berkelanjutan dan adaptif terhadap kebutuhan pasar.

2. Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah

Peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi elemen krusial untuk mendukung pemberdayaan 100.000 wirausaha muda. Melalui penguatan peran OPD, lembaga inkubasi, lembaga keuangan daerah, dan institusi pendidikan, Sumatera Selatan dapat menyediakan layanan pendampingan usaha, pelatihan teknis, hingga konsultasi bisnis yang lebih terstruktur. Optimalisasi daya dukung kelembagaan ini memastikan Sultan Muda mendapatkan akses terhadap kompetensi manajerial, keterampilan teknologi, dan dukungan administratif yang memadai untuk mengembangkan usaha sejak tahap rintisan hingga skala tumbuh.

3. Kemitraan dalam Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah

Kolaborasi lintas pihak menjadi landasan untuk mempercepat pengembangan ekosistem 100.000 Sultan Muda. Kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, BUMD, lembaga riset, serta komunitas wirausaha diperlukan untuk membuka jalan bagi transfer teknologi, pembinaan usaha, pembukaan akses pasar, dan peluang investasi. Model kemitraan yang baik akan membantu menciptakan rantai nilai yang terintegrasi, mempermudah akses logistik, memperkuat pemasaran digital, serta memastikan setiap Sultan Muda dapat memanfaatkan dukungan ekosistem secara optimal.

4. Budaya Riset dan Inovasi Daerah

Pembentukan budaya inovasi dan kreativitas menjadi fondasi dalam mendorong tumbuhnya wirausaha muda yang kompetitif. Pemerintah provinsi perlu menumbuhkan semangat eksperimen, adopsi teknologi, serta keberanian mencoba model bisnis baru di kalangan generasi muda. Budaya inovasi ini dapat diperkuat melalui lomba inovasi, inkubasi kreatif, pelatihan digital, serta kampanye literasi kewirausahaan yang melibatkan sekolah,

kampus, dan komunitas lokal. Dengan budaya yang mendukung inovasi, para Sultan Muda akan lebih siap menghadapi tantangan pasar dan mengembangkan usaha berbasis solusi.

5. Koherensi Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah

Koherensi kebijakan diperlukan untuk memastikan seluruh program 100.000 Sultan Muda berjalan secara selaras, terukur, dan tepat sasaran. Penyelarasan kebijakan kewirausahaan muda dengan RPJMD, kebijakan ekonomi kreatif, program pengentasan kemiskinan, serta strategi transformasi digital akan memperkuat sinergi antar OPD dan meminimalkan duplikasi program. Melalui kebijakan yang terintegrasi, intervensi yang diberikan kepada Sultan Muda dapat lebih sistematis mulai dari tahap edukasi, inkubasi, penguatan usaha, hingga ekspansi pasar.

6. Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Pengembangan 100.000 Sultan Muda perlu diselaraskan dengan dinamika global agar wirausaha muda Sumsel mampu bersaing dalam ekonomi modern. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital, ekonomi hijau, keberlanjutan, dan tren bisnis global akan memperluas peluang inovasi bagi para pelaku usaha muda. Penyelarasan ini mencakup peningkatan literasi digital, pemanfaatan platform global, orientasi ekspor bagi produk unggulan lokal, serta integrasi konsep usaha ramah lingkungan. Dengan mengikuti arah perkembangan global, Sultan Muda Sumsel akan memiliki basis kompetitif yang lebih kuat dan berorientasi masa depan.

Tabel 3. 1 Matriks Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah 100.000 Sultan Muda Sumsel

Elemen / sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode SIPD	Indikator	Target					Sasaran Akhir	OPD	
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5			
Elemen 1 : Kebijakan dan infrastruktur RID											
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan / Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	4.01.05.1.01.0004	Tersedianya hasil Kajian Naskah Akademis/Kebijakan untuk Perda/Pergub dalam rangka mencapai 100.000 Sultan Muda	510 Dokumen	510 Dokumen	510 Dokumen	510 Dokumen	510 Dokumen	Implementasi Kebijakan Pergub tentang 100.000 Sultan Muda	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum) Prov Sumsel	
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan / Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	4.01.05.1.01.0002	Tersedianya produk hukum terkait pengembangan 100.000 Sultan Muda	780 Dokumen	780 Dokumen	780 Dokumen	780 Dokumen	780 Dokumen	Produk Hukum dalam rangka mencapai 100.000 Sultan Muda	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum) Prov Sumsel	
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan / Pendokumentasian Produk Hukum dan	4.01.05.1.01.0003	Dilaksanakannya sosialisasi Pergub tentang 100.000 Sultan Muda	110 Dokumen	110 Dokumen	110 Dokumen	110 Dokumen	110 Dokumen	Sosialisasi Pergub tentang 100.000 Sultan Muda	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum) Prov Sumsel	

Elemen / sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode SIPD	Indikator	Target					Sasaran Akhir	OPD
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5		
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Naskah Hukum Lainnya									
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi/ Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	2.20.02.1.01.0011	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Database 100.000 Sultan Muda	Dinas Kominfo Prov Sumsel
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan/ Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	5.05.02.1.01.0012	Tersedianya fasilitas dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi dalam rangka mencapai 100.00 Sultan Muda	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Fasilitas dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi 100.000 Sultan Muda	BRIDA

Elemen / sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode SIPD	Indikator	Target					Sasaran Akhir	OPD
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5		
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	2.20.02.1.01.0016	Tersedianya basis data usaha mikro 100.000 Sultan Muda	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Terbangunnya database pelaku usaha mikro 100.000 Sultan Muda	Dinas Kominfo Prov Sumsel
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati/Provinsi/Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.11.04.1.01.0004	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau yang diberi fasilitas sebagai ruang publik kreatif bagi 100.000 Sultan Muda	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	Fasilitas RTH sebagai ruang publik kreatif bagi 100.000 Sultan Muda	Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan Prov Sumsel
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati/Provinsi/Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.11.04.1.01.0004	Tersedianya akses internet yang terpasang di ruang publik/RTH	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	Akses internet publik yang berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat di ruang publik/RTH.	Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan Prov Sumsel
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan,	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan,	2.17.07.1.01.0001	Terbentuknya Inkubator pengembangan 100.000 Sultan Muda	1000 Unit	1000 Unit	1000 Unit	1000 Unit	1000 Unit	Inkubator 100.000 Sultan Muda beroperasi penuh sebagai pusat pembinaan dan	Dinas Koperasi & UKM

Elemen / sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode SIPD	Indikator	Target					Sasaran Akhir	OPD
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5		
	Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan								pengembangan wirausaha muda.	
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan/ Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.05.02.1.03.0001	Tersedianya fasilitas skema anggaran untuk mencapai 100.000 Sultan Muda	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Skema pendanaan yang berjalan dan mendukung pelaksanaan program 100.000 Sultan Muda.	BRIDA
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan/ Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	5.05.02.1.02.0006	Tersedianya fasilitas anggaran terhadap 100.000 Sultan Muda	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Pembiayaan program 100.000 Sultan Muda tersalurkan dan digunakan sesuai kebutuhan.	BRIDA

Elemen / sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode SIPD	Indikator	Target					Sasaran Akhir	OPD
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5		
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektua	5.05.02.1.04.0005	Tersedianya fasilitas perlindungan KI terhadap 100.000 Sultan Muda	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Pelindungan Kekayaan Intelektual bagi peserta 100.000 Sultan Muda terlaksana melalui layanan pendaftaran dan pendampingan KI.	BRIDA
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung RID										
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Invensi dan Inovasi/Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan kemitraan antar kelembagaan	5.05.03.1.02.0002	Tersedianya kerjasama dalam negeri dengan stakeholder untuk pengembangan 100.000 Sultan Muda	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Kemitraan dalam negeri aktif berjalan dan mendukung program 100.000 Sultan Muda.	BRIDA
	Invensi dan Inovasi/Fasilitasi dan Pembinaan untuk	5.05.03.1.02.0002	Terjalannya kerjasama riset dengan BRIN/Perguruan Tinggi	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Kolaborasi riset dengan BRIN/Perguruan Tinggi terlaksana	BRIDA

Elemen / sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode SIPD	Indikator	Target					Sasaran Akhir	OPD
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5		
	Penguatan kemitraan antar kelembagaan		untuk pengembangan 100.000 Sultan Muda						dan menghasilkan dukungan akademik bagi 100.000 Sultan Muda.	
Memfungsikan pusat inovasi/inkubator untuk pengembangan 100.000 Sultan Muda	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah/Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	2.17.08.1.01.0001	Tersedianya inkubasi yang mendapat fasilitas pengembangan	20 unit usaha	20 unit usaha	20 unit usaha	20 unit usaha	20 unit usaha	Program inkubasi berfungsi dan menerima fasilitas pengembangan untuk memperkuat peserta.	Dinas Koperasi & UKM Prov Sumsel
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	5.05.02.1.04.0003	Terbentuknya inkubator yang mendapat fasilitas pengembangan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Inkubator beroperasi efektif dengan dukungan fasilitas pengembangan untuk pembinaan wirausaha muda.	BRIDA

Elemen / sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode SIPD	Indikator	Target					Sasaran Akhir	OPD
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5		
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	2.16.03.1.02.0021	Tersedianya portal pelayanan Pemda yang terintegrasi untuk mendukung 100.000 Sultan Muda	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	Portal layanan terintegrasi Pemda berjalan optimal sebagai sarana pendukung 100.000 Sultan Muda.	Dinas Kominfo Prov Sumsel
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi / Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi	5.05.02.1.04.0004	Tersedianya fasilitas pelatihan website terhadap 100.000 Sultan Muda	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Pelatihan pembuatan dan pengelolaan website terselenggara dan dimanfaatkan oleh peserta 100.000 Sultan Muda.	BRIDA
Elemen 3 : Kemitraan RID										
Penguatan Kemitraan dan	Pemberdayaan	2.17.06.1.01.0006	Terbentuknya kemitraan	85 Unit Usaha	85 Unit Usaha	85 Unit Usaha	85 Unit Usaha	85 Unit Usaha	Kemitraan 100.000	Dinas Kopcrasi

Elemen / sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode SIPD	Indikator	Target					Sasaran Akhir	OPD
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5		
antar lembaga dan	Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		100.000 Sultan Muda						Sultan Muda berjalan aktif dan mendukung pengembangan wirausaha muda.	& UKM Prov Sumsel
	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan/ Bimbingan Teknis dan Supervisi di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, Kerjasama Pembangunan Ilmu Pengetahuan	5.05.03.1.01.0004	Tersedianya fasilitas kerjasama riset 100.000 Sultan Muda	1 pelatihan	1 pelatihan	1 pelatihan	1 pelatihan	1 pelatihan	Fasilitas kerjasama riset dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan inovasi dalam program 100.000 Sultan Muda.	BRIDA

Elemen / sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode SIPD	Indikator	Target					Sasaran Akhir	OPD
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5		
	dan Teknologi, serta Kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan									
Peningkatan difusi inovasi	Pengembangan Inovasi dan Teknologi / Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5.05.02.1.04.0001	Tersedianya fasilitas pelatihan inovasi 100.000 Sultan Muda	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Fasilitas kerjasama riset dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan inovasi dalam program 100.000 Sultan Muda.	BRIDA
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	5.05.02.1.04.0003	Tersedianya fasilitas diseminasi inovasi 100.000 Sultan Muda	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Diseminasi inovasi terlaksana dan memperluas pemanfaatan hasil inovasi peserta 100.000 Sultan Muda.	BRIDA

Elemen / sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode SIPD	Indikator	Target					Sasaran Akhir	OPD	
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5			
Elemen 4 : Budaya RID											
Promosi dan kampanye inovasi	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	2.17.08.1.01.0001	Tersedianya fasilitas promosi terhadap 100.000 Sultan Muda	150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	Fasilitas promosi dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan visibilitas peserta 100.000 Sultan Muda.	Dinas Koperasi & UKM Prov Sumsel	
Apresiasi prestasi inovasi	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan / Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur	5.05.02.1.01.0004	Terselenggaranya inovasi award bagi 100.000 Sultan Muda	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Inovasi Award terlaksana sebagai ajang apresiasi dan kreativitas peserta 100.000 Sultan Muda.	BRIDA	

Elemen / sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode SIPD	Indikator	Target					Sasaran Akhir	OPD
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5		
Pengembangan Perusahaannya berbasis riset	dan Reformasi Birokrasi Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan / Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan	2.17.07.1.01.0001	Tersedianya fasilitas inkubasi bagi 100.000 Sultan Muda	110 Unit Usaha	110 Unit Usaha	110 Unit Usaha	110 Unit Usaha	110 Unit Usaha	Layanan inkubasi berjalan efektif dalam mendukung pengembangan usaha peserta 100.000 Sultan Muda.	Dinas Koperasi & UKM

Elemen / sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode SIPD	Indikator	Target					Sasaran Akhir	OPD
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5		
	Pengentasan Kemiskinan									
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancangan Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	5.05.02.1.04.0002	Dilaksanakannya kodifikasi Teknologi Masyarakat/ Kearifan Lokal 100.000 Sultan Muda	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	Kodifikasi Teknologi Masyarakat/ Kearifan Lokal terdokumentasi dan mendukung pengembangan inovasi dalam program 100.000 Sultan Muda.	BRIDA
Elemen 5 : Koherensi Kebijakan Riset dan Inovasi										
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk	Pengembangan Inovasi dan Teknologi / Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5.05.02.1.04.0004	Dilaksanakannya riset untuk pengembangan 100.000 Sultan Muda	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	Hasil riset tersedia dan digunakan sebagai dasar pengembangan program 100.000 Sultan Muda.	BRIDA

Elemen / sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode SIPD	Indikator	Target					Sasaran Akhir	OPD
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5		
Penyelenggaraan dan/atau permasalahan daerah										
Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) / Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3.31.04.1.01.0001	Dikembangkan dan terbentuknya kluster inovasi 100.000 Sultan Muda	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Kluster inovasi 100.000 Sultan Muda berfungsi sebagai ekosistem kolaboratif untuk pengembangan wirausaha muda.	Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel

Elemen / sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode SIPD	Indikator	Target					Sasaran Akhir	OPD
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5		
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan / Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	5.05.02.1.01.0013	Dilaksanakannya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan 100.000 Sultan Muda	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	Koordinasi lintas pemangku kepentingan berjalan efektif dan memperkuat pelaksanaan program 100.000 Sultan Muda.	BRIDA
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global										
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi perubihan pengembangan ekosistem Riset dan	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para	2.17.07.1.01.0011	Dilaksanakannya sertifikasi dan standarisasi Usaha Mikro 100.000 Sultan Muda	400 Unit Usaha	400 Unit Usaha	400 Unit Usaha	400 Unit Usaha	400 Unit Usaha	Usaha Mikro 100.000 Sultan Muda tersertifikasi dan memenuhi standar yang ditetapkan.	Dinas Koperasi & UKM Prov Sumsel

Elemen / sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode SIPD	Indikator	Target					Sasaran Akhir	OPD
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5		
Inovasi di daerah	Pemangku Kepentingan / Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha									
	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.18.04.1.02.0007	Tersedianya fasilitas kemudahan perizinan bagi 100.000 Sultan Muda	2500 izin/non izin	2500 izin/non izin	2500 izin/non izin	2500 izin/non izin	2500 izin/non izin	Layanan kemudahan perizinan berfungsi optimal dan mempercepat legalitas usaha peserta 100.000 Sultan Muda.	DPMPSTSP Prov Sumsel
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang	2.17.06.1.01.0004	Dilaksanakannya pendampingan	5 Kelompok Masyarakat	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	Peserta 100.000 Sultan Muda mampu	Dinas Koperasi & UKM

Elemen / sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode SIPD	Indikator	Target					Sasaran Akhir	OPD
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5		
	Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi/ Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi		pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/ pencatatan keuangan bagi 100.000 Sultan Muda		Masyara kat	Masyara kat	Masyara kat	Masyara kat	mengelola pembukuan usaha melalui sistem aplikasi secara efektif.	Prov Sumsel
Penguatan kerjasama internasional	Fasilitasi Kerja Sama Daerah- / Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	4.01.03.1.03 .0001	Terjalannya kerjasama dengan luar negeri dalam pengembangan n 100.000 Sultan Muda	31 dokumen	31 dokumen	31 dokumen	31 dokumen	31 dokumen	Kemitraan internasional aktif memberikan dukungan dan peluang pengembangan n bagi 100.000 Sultan Muda.	Sekretari at Daerah (Bagian Pemerint ahan)

Elemen / sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode SIPD	Indikator	Target					Sasaran Akhir	OPD
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan/ Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.05.02.1.03.0001	Tersedianya produk 100.000 Sultan muda yang berstandar internasional	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Produk peserta 100.000 Sultan Muda memenuhi standar internasional dan siap bersaing di pasar global.	BRIDA
	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan/ Bimbingan Teknis dan Supervisi di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, Kerjasama Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Kemitraan	5.05.03.1.01.0004	Tersedianya fasilitas pelatihan dengan luar negeri dalam pengembangan 100.000 Sultan Muda	1 pelatihan	1 pelatihan	1 pelatihan	1 pelatihan	1 pelatihan	Pelatihan internasional terselenggara dan meningkatkan kapasitas global peserta 100.000 Sultan Muda.	BRIDA

8.2 Tahapan Strategis Berdasarkan Elemen Ekosistem

Pada bab ini menguraikan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh dalam rangka mencapai kondisi yang diharapkan dalam penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah sebagai bagian dari upaya mendukung tema prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu menciptakan 100.000 Sultan Muda Sumsel. Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ PID) Provinsi Sumatera Selatan ini disusun sebagai dokumen strategis yang merupakan dokumen turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memberikan arah, panduan, serta landasan terstruktur bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan berbasis riset dan inovasi. Peta jalan ini berfungsi sebagai kerangka kerja integratif yang menyatukan berbagai komponen penting, mulai dari kebijakan, sumber daya manusia, infrastruktur, pendanaan, jejaring kemitraan, hingga regulasi, agar bergerak secara terpadu menuju pembangunan daerah yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based development*). Melalui penyusunan peta jalan ini, diharapkan Provinsi Sumatera Selatan mampu membangun ekosistem riset dan inovasi yang berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan, serta relevan dengan kebutuhan dan potensi lokal, sekaligus selaras dengan dinamika dan perkembangan global.

Secara tematik, peta jalan ini difokuskan pada upaya penguatan kapasitas generasi muda, kewirausahaan, serta inovasi daerah dalam rangka mendukung terwujudnya 100.000 Sultan Muda Sumsel. Peta jalan ini memuat tahapan dan langkah strategis yang akan dilaksanakan secara bertahap dari tahun pertama hingga tahun kelima sebagai bagian dari upaya sistematis dalam menumbuhkan wirausaha muda yang inovatif, produktif, berdaya saing, serta mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Dalam implementasinya, peta jalan ini disusun dengan mengacu pada kerangka ekosistem riset dan inovasi daerah yang mencakup enam elemen utama, yaitu: (1) kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi daerah, (2) kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi, (3) kemitraan riset dan inovasi, (4) budaya riset dan inovasi, (5) keterpaduan atau koherensi riset dan inovasi di daerah, serta (6) penyelarasan dengan

perkembangan global. Keenam elemen tersebut menjadi fondasi utama dalam merancang setiap tahapan pelaksanaan peta jalan agar berjalan secara sinergis, terarah, berkelanjutan, dan berorientasi pada hasil.

Dengan demikian, peta jalan ini tidak hanya menjadi instrumen perencanaan strategis dalam bidang riset dan inovasi, tetapi juga menjadi alat pengendali dan pengarah pembangunan daerah yang berorientasi pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, kewirausahaan muda, dan inovasi. Kehadirannya diharapkan mampu memastikan bahwa program dan kegiatan yang dirancang dalam RIPJ PID berjalan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD, mendukung penciptaan Sultan Muda Sumsel, meningkatkan daya saing daerah, memperkuat ekonomi lokal, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan secara berkelanjutan. Adapun tujuan utama penyusunan peta jalan (*road map*) 100.000 Sultan Muda Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan arah dan pedoman strategis bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah secara terencana, terukur, dan berkelanjutan sebagai bagian dari pelaksanaan RPJMD.
- b) Mendorong percepatan lahirnya pengusaha muda (Sultan Muda) yang inovatif dan berdaya saing, melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi sebagai basis pengembangan usaha.
- c) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya daerah dalam mendukung riset, inovasi, dan kewirausahaan, melalui penguatan kebijakan, infrastruktur, pendanaan, serta kemitraan multipihak.
- d) Mewujudkan keterpaduan dan koherensi program riset dan inovasi daerah, agar seluruh kebijakan, program, dan kegiatan lintas perangkat daerah berjalan selaras, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil.
- e) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, melalui pengembangan ekosistem kewirausahaan muda berbasis inovasi yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat daya saing Provinsi Sumatera Selat

Tabel 8. 2 Langkah-Langkah Strategis Tema Prioritas 100.000 Sultan Muda Sumsel

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah						
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Tersedianya hasil Kajian Naskah Akademis/Kebijakan untuk Perda/ Pergub dalam rangka mencapai 100.000 Sultan Muda	Pengumpulan data awal dan penyusunan kerangka kajian NA/ kebijakan pendukung regulasi 100.000 Sultan Muda.	• Penyusunan dan pengesahan dokumen kajian di tingkat kabupaten/kota untuk harmonisasi regulasi daerah. • Penyelarasan substansi kajian dengan kebutuhan aktual program.	Pemutakhiran kajian NA/Kebijakan untuk penguatan Pergub dan sinkronisasi antarpemerintah daerah.	Penyempurnaan regulasi berbasis hasil monitoring penerapan Pergub 100.000 Sultan Muda di daerah.	Evaluasi implementasi kajian NA di seluruh kabupaten/kota dan pemberian rekomendasi regulasi lanjutan.
	Tersedianya produk hukum terkait pengembangan 100.000 Sultan Muda	Identifikasi kebutuhan regulasi dan penyusunan dasar produk hukum penetapan terkait program.	Penyusunan produk hukum teknis pendukung layanan pembinaan, sertifikasi, dan kemitraan usaha.	Harmonisasi dan revisi produk hukum penetapan agar sesuai dengan dinamika pengembangan peserta.	Penyusunan produk hukum lanjutan yang mendukung pelestarian ekosistem 100.000 Sultan Muda.	Evaluasi efektivitas seluruh produk hukum dan penetapan regulasi penyempurnaan jangka panjang.
	Dilaksanakannya sosialisasi Pergub tentang 100.000 Sultan Muda	Identifikasi kebutuhan, wilayah sasaran, dan OPD pendukung untuk pelaksanaan sosialisasi.	• Pelaksanaan sosialisasi sesuai target • Pengumpulan umpan balik awal untuk peningkatan proses sosialisasi	• Penguatan kualitas materi dan metode sosialisasi • Penyesuaian konten berdasarkan	Perluasan jangkauan sosialisasi ke lebih banyak komunitas dan kelompok pemuda.	• Evaluasi menyeluruh pelaksanaan sosialisasi selama 5 tahun dan pencapaian total #550 dokumen.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
				evaluasi tahun sebelumnya		Penyusunan rekomendasi keberlanjutan dan penyempurnaan mekanisme sosialisasi.
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadana, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	Identifikasi kebutuhan data, metadana, dan standar interoperabilitas untuk Database 100.000 Sultan Muda.	Penyusunan dokumen statistik sektoral sesuai standar SDI	Penerapan standar data dan interoperabilitas untuk memperkuat integrasi database lintas-OPD.	Optimalisasi pemutakhiran data sektoral berbasis standar SDI	Evaluasi keseluruhan pemenuhan standar data dan penyempurnaan format database 100.000 Sultan Muda.
	Tersedianya fasilitas dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi dalam rangka mencapai 100.000 Sultan Muda	Identifikasi kebutuhan penataan basis data riset dan inovasi yang mendukung 100.000 Sultan Muda.	Penyusunan dokumen fasilitas/pembinaan penataan basis data	Pelaksanaan pembinaan OPD terkait untuk harmonisasi data riset dan inovasi.	Penguatan mekanisme integrasi dan validasi data riset dan inovasi	Evaluasi pelaksanaan pembinaan dan penyusunan rekomendasi penguatan basis data riset dan inovasi.
	Tersedianya basis data usaha mikro 100.000 Sultan Muda	Identifikasi sumber data, kebutuhan variabel, dan format pendataan usaha mikro calon Sultan Muda.	Penyusunan dokumen awal pendataan usaha mikro sesuai prinsip SDI	Penyelarsaan data UMKM lintas kabupaten/kota dan integrasi dengan sistem provinsi.	Optimalisasi pemutakhiran data usaha mikro berbasis SDI	Evaluasi dan finalisasi database usaha mikro 100.000 Sultan Muda untuk digunakan dalam perencanaan lanjutan.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau yang diberi fasilitas sebagai ruang publik kreatif bagi 100.000 Sultan Muda	Identifikasi lokasi potensial RTH yang dapat dikembangkan sebagai ruang publik kreatif.	• Penataan awal awal RTH prioritas (5 Ha) dengan zonasi ruang publik kreatif. • Penyediaan fasilitas dasar (jalur pedestrian, penerangan, titik kumpul).	Pengembangan fasilitas pendukung aktivitas kreatif (pengung mini, area komunitas, dinding mural, area UMKM).	Pemantapan fungsi RTH sebagai ruang publik kreatif dan integrasi dengan kegiatan komunitas pemuda.	Evaluasi pemanfaatan RTH kreatif dan penyempurnaan sarana sesuai kebutuhan 100.000 Sultan Muda.
	Tersedianya akses internet yang terpasang di ruang publik/RTH	Pemetaan kebutuhan titik wifi dan infrastruktur jaringan di RTH prioritas.	Instalasi jaringan internet dasar dan hotspot publik di RTH tahap pertama.	Perluasan jaringan internet pada RTH tambahan serta peningkatan kapasitas bandwidth.	Optimalisasi layanan internet publik dengan sistem monitoring penggunaan.	Evaluasi kualitas layanan internet dan peningkatan area cakupan untuk keberlanjutan.
	Terbentuknya Inkubator pengembangan 100.000 Sultan Muda	Identifikasi calon wirausaha muda dan pemetaan kebutuhan inkubasi per sektor	Pembentukan inkubator dasar dan onboarding batch pertama 1.000 peserta.	Pengembangan layanan inkubasi (pelatihan bisnis, pendampingan, klinik perizinan, akses pembiayaan).	Penguatan kemitraan dengan industri, UMKM besar, dan perguruan tinggi untuk scale-up peserta inkubasi.	Evaluasi kinerja inkubator dan penyempurnaan model inkubasi untuk keberlanjutan dan dampak ekonomi.
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; dan	Tersedianya fasilitas skema anggaran untuk mencapai 100.000 Sultan Muda	Identifikasi kebutuhan pendanaan dan pemetaan sumber pembiayaan potensial.	• Penyusunan dokumen skema pendanaan dasar • Konsultasi awal dengan OPD dan lembaga keuangan untuk memastikan	• Integrasi kemitraan dengan lembaga pembiayaan (bank, fintech, CSR). • Penyempurnaan skema pendanaan	Implementasi penuh skema pendanaan kepada peserta program	• Evaluasi keberlanjutan skema pendanaan • Penyusunan rekomendasi optimalisasi dan perluasan sektor

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
			kelayakan skema.	sektor prioritas wirausaha muda. • Uji coba penyaluran dana terbatas		penerima manfaat
	Tersedianya fasilitas anggaran terhadap 100.000 Sultan Muda	Penyusunan peta kebutuhan pendanaan awal dan dokumen alokasi anggaran dasar untuk 100.000 Sultan Muda	- Penyesuaian dokumen anggaran berdasarkan evaluasi kebutuhan peserta dan prioritas program. - Penguatan koordinasi OPD pengampu pendanaan program.	Optimalisasi dokumen anggaran untuk mendukung ekspansi peserta dan penambahan layanan pembinaan.	Penyelarsan dokumen pendanaan dengan kemitraan eksternal dan peluang pembiayaan tambahan.	Evaluasi menyeluruh efektivitas penyaluran anggaran serta penyusunan dokumen keberlanjutan pendanaan jangka panjang.
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Tersedianya fasilitas perlindungan KI terhadap 100.000 Sultan Muda	Identifikasi potensi produk/karya peserta yang memenuhi kriteria KI	- Penyusunan mekanisme pendampingan dan standar layanan KI. - Pelatihan dasar terkait KI bagi peserta dan fasilitator.	- Fasilitasi pendaftaran KI (merek, hak cipta, desain industri) untuk peserta terpilih. - Penyusunan laporan tahunan perlindungan KI	- Penguatan kemitraan dengan Kementerian dan lembaga terkait untuk percepatan pendaftaran KI. - Perluasan jenis KI yang dapat difasilitasi (indikasi geografis,	- Evaluasi keseluruhan perlindungan KI - Penyempurnaan sistem pendampingan dan penyusunan rekomendasi keberlanjutan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					kekayaan komunal, dll). • Integrasi layanan KI dalam inkubator 100.000 Sultan Muda	
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi						
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Tersedianya kerjasama dalam negeri dengan <i>stakeholder</i> untuk pengembangan 100.000 Sultan Muda	Identifikasi calon mitra dalam negeri (UMKM besar, perusahaan nasional, lembaga pemerintah, komunitas wirasusaha).	• Penandatanganan kerjasama dasar dengan beberapa mitra prioritas. • Penyusunan mekanisme pemanfaatan kerjasama bagi peserta program.	• Perluasan kemitraan strategis untuk dukungan pelatihan, pemasaran, dan pembiayaan • Pelaksanaan kolaborasi konkret dalam bentuk program pembinaan bersama.	Penguatan sistem koordinasi dan monitoring kinerja kemitraan	Evaluasi efektivitas seluruh kemitraan dan penyempurnaan model kolaborasi untuk keberlanjutan program.
	Terjalannya kerjasama riset dengan BRIN/Perguruan Tinggi untuk pengembangan 100.000 Sultan Muda	Identifikasi topik riset strategis dan pemetaan perguruan tinggi/BRIN yang relevan.	• Perumusan nota kesepahaman awal dengan BRIN/ Universitas • Penyusunan rencana riset pendukung untuk pengembangan kapasitas 100.000 Sultan Muda.	• Pelaksanaan riset kolaboratif (kajian kewirausahaan muda, teknologi produksi, pasar digital). • Penyusunan laporan awal riset	Pemanfaatan hasil riset sebagai rekomendasi untuk perbaikan program dan inkubasi.	Pemanfaatan hasil riset sebagai rekomendasi untuk perbaikan program dan inkubasi.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Memfungsikan pusat inovasi/ inkubator untuk pengembangan 100.000 Sultan Muda	Tersedianya inkubasi yang mendapat fasilitas pengembangan	Identifikasi unit usaha potensial dan pemetaan kebutuhan inkubasi.	• Seleksi 20 unit usaha untuk batch pertama • Penyediaan fasilitas dasar (pelatihan bisnis, mentoring, akses pasar)	• Pendampingan lanjutan untuk 20-40 unit usaha termasuk pelatihan teknologi, peningkatan SDM, dan fasilitasi pemasaran. • Monitoring perkembangan usaha secara berkala	Peningkatan fasilitas inkubasi seperti akses pembiayaan, uji coba teknologi produksi, dan desain produk.	Evaluasi kinerja inkubasi dan penguatan model inkubasi untuk skala usaha menengah.
	Terbentuknya inkubator yang mendapat fasilitas pengembangan	Identifikasi kebutuhan fasilitas inovasi dan pemetaan kapasitas inkubator.	• Pengadaan fasilitas pendukung early-stage (ruang kerja, internet, pelatihan dasar). • Penyusunan SOP operasional inkubator	• Optimalisasi fungsi inkubator melalui penambahan fasilitas pengembangan (coaching intensif, layanan desain & teknologi). • Pelaksanaan program pembinaan reguler	• Integrasi layanan inkubator dengan program besar 100.000 Sultan Muda (pemasaran digital, teknologi produksi, branding). • Penguatan SDM pengelola inkubator	Evaluasi efektivitas inkubator dan penyusunan rekomendasi perbaikan layanan.
Penyediaan sarana pendukung	Tersedianya portal pelayanan Pemda yang terintegrasi	Identifikasi kebutuhan layanan digital	• Integrasi layanan dasar (perizinan sederhana,	• Penambahan fitur layanan lanjutan seperti monitoring	• Optimalisasi kinerja portal melalui	• Evaluasi keseluruhan kinerja dan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	untuk mendukung 100.000 Sultan Muda	untuk mendukung aktivitas 100.000 Sultan Muda.	informasi program, pendaftaran kegiatan). • Penyusunan alur layanan dan manual penggunaan portal	bantuan, pengajuan proposal, dan pusat informasi usaha. • Uji coba pemanfaatan portal oleh peserta	peningkatan kecepatan, keamanan, dan aksesibilitas. • Pendampingan penggunaan portal untuk peserta program	pemanfaatan portal. • Penyempurnaan layanan berbasis masukan pengguna untuk keberlanjutan program.
	Tersedianya fasilitas pelatihan website terhadap 100.000 Sultan Muda	Identifikasi kebutuhan pelatihan website dan pemetaan kemampuan digital peserta.	• Pelaksanaan pelatihan dasar pembuatan website (profil usaha, landing page sederhana). • Penyusunan modul pelatihan standar (materi, video, template).	• Pelatihan lanjutan: optimasi website, integrasi media sosial, dan dasar SEO. • Pendampingan pembuatan website bagi kelompok usaha prioritas. • Publikasi hasil pelatihan melalui laporan diseminasi	Penguatan kemampuan peserta dalam pemeliharaan website, update konten, dan keamanan digital.	• Evaluasi efektivitas pelatihan dan efektivitas website yang dibuat peserta. • Penyempurnaan program pelatihan untuk meningkatkan kemandirian digital wirausaha muda.
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi						
Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Terbentuknya kemitraan 100.000 Sultan Muda	Identifikasi potensi koperasi lintas kabupaten/kota serta unit usaha yang siap	• Pembentukan 85 kemitraan awal untuk ruang kolaborasi, pemasaran produk, dan	• Perluasan kemitraan hingga mencakup koperasi sektor produksi,	Penguatan kelembagaan kemitraan melalui monitoring, standarisasi	• Evaluasi efektivitas seluruh kemitraan koperasi.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		bermitra dengan 100.000 Sultan Muda.	akses permodalan. • Sosialisasi model kemitraan koperasi bagi peserta	perdagangan, dan jasa. • Penguatan skema kemitraan berbasis kebutuhan wirausaha muda (akses pasar, pelatihan, pendampingan).	peran mitra, dan kolaborasi program koperasi dengan pemerintah daerah.	• Penyempurnaan model kemitraan untuk keberlanjutan dan peningkatan dampak program.
	Tersedianya fasilitas kerjasama riset 100.000 Sultan Muda	Pemetaan kebutuhan riset dan identifikasi lembaga/peneliti potensial yang dapat berkolaborasi.	• Pelaksanaan pelatihan kerjasama riset dasar untuk meningkatkan literasi riset peserta. • Penyusunan mekanisme koordinasi riset antar pihak terkait.	• Implementasi kerjasama riset tematik (pasar, produk, teknologi tepat guna). • Penerbitan laporan hasil supervisi dan pendampingan riset.	Pendalaman riset lanjutan berbasis rekomendasi tahun sebelumnya dan pemanfaatannya untuk program inkubasi.	Evaluasi keseluruhan kerjasama riset dan penyusunan roadmap riset lanjutan untuk mendukung keberlanjutan program.
Peningkatan difusi inovasi	Tersedianya fasilitas pelatihan inovasi 100.000 Sultan Muda	Identifikasi kebutuhan pelatihan inovasi dan pemetaan teknologi prioritas.	• Pelaksanaan pelatihan dasar inovasi (desain produk, teknologi sederhana, inovasi proses). • Pengembangan modul pelatihan inovasi	• Pelatihan inovasi lanjutan: prototipe, uji teknologi, standarisasi produk. • Pendampingan penerapan inovasi bagi peserta	• Integrasi hasil pelatihan dengan program inkubasi dan akses permodalan. • Penguatan kapasitas teknis SDM pendamping	Evaluasi program pelatihan inovasi serta penyusunan rekomendasi inovasi unggulan yang siap dikembangkan lebih lanjut.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Tersedianya fasilitas diseminasi inovasi 100.000 Sultan Muda	Identifikasi inovasi peserta yang potensial untuk didiseminasikan dan pemetaan kanal diseminasi.	- Pelaksanaan diseminasi dasar (sosialisasi inovasi, publikasi awal, forum berbagi praktik baik). - Penyusunan materi diseminasi standar.	- Penguatan diseminasi melalui gelar inovasi, video showcase, dan publikasi digital. - Pendampingan peserta dalam mempresentasikan inovasinya	Pengembangan kanal diseminasi terpadu (portal inovasi, kolaborasi dengan media, dan event pemerintah daerah).	Evaluasi pemanfaatan diseminasi dan penyempurnaan strategi untuk memperluas jangkauan inovasi 100.000 Sultan Muda.
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi						
Promosi dan kampanye inovasi	Tersedianya fasilitas promosi terhadap 100.000 Sultan Muda	Identifikasi kebutuhan promosi UMKM peserta dan pemetaan kanal promosi yang tersedia di Pemda serta mitra.	- Pengembangan paket fasilitas promosi (booth, katalog produk, media digital). - Pendampingan promosi bagi peserta prioritas awal.	- Perluasan fasilitas promosi melalui kerja sama event daerah dan marketplace lokal. - Produksi materi promosi terpadu (foto produk, video singkat, katalog digital).	- Integrasi fasilitas promosi dengan portal 100.000 Sultan Muda dan kanal promosi OPD lain. - Optimalisasi promosi melalui kolaborasi komunitas dan media pemerintah.	- Evaluasi dampak fasilitas promosi terhadap peningkatan omzet. - Penyempurnaan model promosi berbasis digital dan kolaborasi multipihak.
Apresiasi prestasi inovasi	Terselenggaranya inovasi award bagi 100.000 Sultan Muda	Penyusunan konsep dasar Inovasi Award dan kriteria penilaian untuk wirausaha muda.	Pelaksanaan Inovasi Award perdana dan publikasi pemenang sebagai role model.	- Pengembangan kategori penilaian baru (teknologi, kreativitas, dampak sosial). - Pendampingan lanjutan bagi	Kolaborasi dengan BRIN/PT dalam kurasi inovasi dan penjurian.	Evaluasi penyelenggaraan 5 tahun, dokumentasi best practices, dan penyempurnaan format award.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Tersedianya fasilitas inkubasi bagi 100.000 Sultan Muda	Pemetaan fasilitas inkubasi yang tersedia dan kebutuhan inkubasi peserta.	Pelaksanaan inkubasi dasar: manajemen usaha, keuangan, pemasaran digital.	penerima penghargaan. • Penguatan inkubasi lanjutan: desain produk, perizinan, distribusi. • Kemitraan inkubator dengan komunitas wirausaha daerah.	Integrasi layanan inkubasi dengan Rumah Kemasan, Creative Center, dan fasilitas Pemda lainnya.	Evaluasi efektivitas inkubator dan rekomendasi peningkatan kapasitas layanan.
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Dilaksanakannya kodifikasi Teknologi Masyarakat/ Kearifan Lokal 100.000 Sultan Muda	Pemetaan awal teknologi/kearifan lokal yang relevan bagi wirausaha muda.	Pengumpulan data lapangan dan dokumentasi praktik kearifan lokal prioritas.	Penyusunan naskah kodifikasi dan uji penerapan dalam model usaha mikro.	• Diseminasi hasil kodifikasi kepada peserta melalui pelatihan dan workshop. • Kolaborasi pihak lokal (tokoh masyarakat, perajin, komunitas budaya).	Evaluasi pemanfaatan kearifan lokal dalam usaha peserta dan penyempurnaan dokumen kodifikasi.
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah						
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan	Dilaksanakannya riset untuk pengembangan 100.000 Sultan Muda	Identifikasi kebutuhan riset prioritas (pasar, kapasitas usaha muda, peluang sektor unggulan).	Pelaksanaan riset tematik awal dan penyusunan laporan berbasis data kebutuhan peserta.	• Riset lanjutan yang fokus pada model bisnis, digitalisasi, dan potensi skala usaha.	Integrasi hasil riset dengan kebijakan dan program pengembangan usaha di tingkat provinsi.	Evaluasi lima tahun hasil riset dan penyusunan rekomendasi penguatan ekosistem usaha muda.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
daerah untuk promosi PUD				Diseminasi hasil riset kepada OPD dan peserta program		
Penyelenggara pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Dikembangkan dan terbentuknya klaster inovasi 100.000 Sultan Muda	Pemetaan sektor unggulan dan potensi klaster inovasi wirausaha muda di daerah.	Penyusunan desain awal klaster inovasi dan identifikasi peran aktor (pemerintah, UMKM, akademisi, industri).	- Pembentukan klaster inovasi awal dan penyusunan dokumen rencana aksinya. - Fasilitasi kolaborasi pelaku usaha dalam klaster.	Pengembangan aktivitas klaster: inkubasi kolaboratif, akses pasar, dan pendampingan inovasi.	Evaluasi kinerja klaster dan perbaikan model ekosistem inovasi untuk keberlanjutan program.
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Dilaksanakannya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan 100.000 Sultan Muda	Pemetaan pemangku kepentingan dan penyusunan forum koordinasi lintas OPD, akademisi, dan mitra.	Pelaksanaan koordinasi rutin dan penyusunan dokumen sinkronisasi program awal.	- Penguatan kolaborasi melalui pembagian peran antar-pemangku kepentingan. - Penyelarasan program lintas sektor untuk mendukung peserta 100.000 Sultan Muda.	Integrasi koordinasi dalam perencanaan daerah dan penguatan mekanisme monitoring bersama.	Evaluasi menyeluruh kolaborasi lima tahun dan penyusunan rekomendasi model koordinasi berkelanjutan.
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global						
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi	Dilaksanakannya sertifikasi dan standarisasi Usaha Mikro 100.000 Sultan Muda	Identifikasi kebutuhan jenis sertifikasi dan standar usaha mikro untuk	Pelaksanaan sertifikasi dasar (NIB, Standar Usaha, Izin Higiene, dll).	Fasilitasi sertifikasi lanjutan (P-IRT, Halal, Laik Hygiene).	Peningkatan cakupan usaha mikro yang mengikuti sertifikasi.	Evaluasi efektivitas sertifikasi & standarisasi

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah		peserta 100.000 Sultan Muda.	• Pendampingan pemenuhan persyaratan teknis bagi usaha mikro prioritas.	• Monitoring penerapan standar usaha bagi peserta tersertifikasi.	• Integrasi layanan sertifikasi dengan lembaga terkait untuk percepatan proses.	yang telah diterapkan. • Penyempurnaan mekanisme pendampingan untuk keberlanjutan sertifikasi usaha.
	Tersedianya fasilitas kemudahan perizinan bagi 100.000 Sultan Muda	Identifikasi kebutuhan jenis izin usaha dan kendala OSS-RBA yang dihadapi peserta.	• Fasilitasi pembuatan NIB & perizinan dasar. • Pelatihan penggunaan OSS-RBA bagi peserta prioritas	• Pendampingan penyelesaian izin risiko menengah-tinggi. • Penataan layanan "helpdesk legalitas" untuk percepatan penerbitan izin	Memperluas cakupan layanan perizinan melalui klinik usaha terpadu.	• Evaluasi kualitas layanan perizinan dan tingkat keberhasilan legalitas usaha peserta. • Penyusunan rekomendasi penyederhanaan layanan untuk keberlanjutan.
	Dilaksanakannya pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan bagi 100.000 Sultan Muda	Identifikasi jenis aplikasi pembukuan yang paling sesuai untuk usaha mikro peserta (misal: SiApik, BukuKas, dan sejenisnya).	• Pelatihan dasar penggunaan aplikasi pembukuan. • Pendampingan pencatatan keuangan awal bagi kelompok sasaran.	• Penguatan literasi keuangan dan integrasi aplikasi dengan kebutuhan usaha. • Monitoring transaksi dan laporan keuangan yang dihasilkan kelompok dampingan.	• Perluasan pendampingan ke kelompok usaha baru dan peningkatan kualitas pencatatan keuangan kelompok lama. • Penguatan mentoring bagi peserta yang	• Evaluasi efektivitas penggunaan aplikasi pembukuan pada kelompok sasaran. • Penyempurnaan modul pendampingan keuangan sebagai standar

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Penguatan kerjasama internasional	Terjalannya kerjasama dengan luar negeri dalam pengembangan 100.000 Sultan Muda	Identifikasi potensi mitra internasional dan peluang kerja sama yang relevan untuk pengembangan 100.000 Sultan Muda.	• Penajakan kerja sama dengan lembaga internasional melalui FGD, pertemuan virtual, dan desk diplomacy. • Penyusunan draft dokumen kerja sama yang diarahkan pada dukungan inkubasi, pelatihan, dan pemasaran global.	• Penandatanganan kerja sama dengan mitra internasional terpilih. • Implementasi awal program kolaborasi seperti mentoring global dan pembukaan akses pasar luar negeri.	• Perluasan jejaring kerja sama dengan negara atau lembaga internasional baru. • Penguatan kemitraan yang telah berjalan melalui program pendampingan lanjutan.	• Evaluasi efektivitas seluruh kerja sama internasional yang telah ditandatangani. • Penyempurnaan model kerja sama untuk mendukung keberlanjutan ekosistem global 100.000 Sultan Muda.
	Tersedianya produk 100.000 Sultan muda yang berstandar internasional	Identifikasi potensi produk unggulan peserta yang memenuhi standar internasional (ISO, HACCP, GMP, dan lainnya).	• Penyusunan pedoman penyesuaian standar internasional untuk produk prioritas. • Pendampingan pemenuhan standar dasar untuk produk unggulan terpilih.	• Uji kelayakan dan sertifikasi standar internasional bagi produk yang siap. • Pengujian kualitas produk melalui lembaga berstandar global.	• Ekspansi pembinaan standar internasional kepada lebih banyak pelaku 100.000 Sultan Muda. • Fasilitasi peningkatan kualitas produksi untuk memenuhi	• Evaluasi penerapan standar internasional pada produk peserta. • Penyempurnaan panduan pengembangan produk berstandar global untuk keberlanjutan.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	Tersedianya fasilitas pelatihan dengan luar negeri dalam pengembangan 100.000 Sultan Muda	Identifikasi tema pelatihan internasional yang relevan dan lembaga luar negeri yang dapat menjadi mitra penyelenggara.	• Penetapan mitra internasional untuk pelatihan. • Penyusunan kurikulum pelatihan berbasis kebutuhan wirausaha muda Sumsel.	• Pelaksanaan pelatihan internasional pertama, baik secara daring maupun luring. • Seleksi peserta dan pembekalan pra-pelatihan	permintaan internasional. • Peningkatan cakupan pelatihan dengan menambah sesi lanjutan atau kelas tematik. • Pendampingan penerapan ilmu pelatihan ke dalam usaha peserta.	• Evaluasi penyelenggaraan pelatihan internasional dan dampaknya terhadap pengembangan usaha. • Penyusunan rekomendasi penyempurnaan program pelatihan global untuk keberlanjutan.

8.3 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Untuk memastikan implementasi Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah, khususnya dalam pencapaian target 100.000 Sultan Muda Sumsel, berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan, diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi (Monev) yang terstruktur dan berkelanjutan. Monev ini bertujuan untuk mengukur kemajuan, mengidentifikasi hambatan, dan melakukan perbaikan secara dini. Mekanisme yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1) Institusi Pelaksana Monev:

- o Penanggung jawab utama Monev adalah **Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan**, bekerja sama dengan **Bappeda** sebagai koordinator perencanaan pembangunan.
- o Tim pelaksana Monev bersifat lintas OPD, melibatkan perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan OPD terkait lainnya.

2) Periode dan Frekuensi Pelaporan:

- o **Pelaporan Triwulanan:** Setiap OPD pelaksana wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatan kepada Sekretaris Tim Monev setiap 3 bulan.
- o **Rapat Evaluasi Semesteran:** Dilaksanakan setiap 6 bulan untuk mengevaluasi capaian semester, membahas kendala, dan merumuskan strategi akselerasi.
- o **Laporan Tahunan:** Pada akhir tahun anggaran, akan disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) yang mencakup evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RIPJ PID dan RPJMD.

3) Indikator Kunci Monev:

Monev akan difokuskan pada indikator-indikator kunci berikut, yang tercantum dalam Tabel 8.1 Rencana Aksi:

- o **Indikator Input:** Realisasi anggaran yang diserap untuk setiap program/kegiatan.
- o **Indikator Output:** Jumlah Naskah Akademik yang dihasilkan, jumlah pelaku usaha yang diinkubasi, jumlah pelatihan yang diselenggarakan, jumlah kemitraan yang terbentuk.
- o **Indikator Outcome:** Jumlah Sultan Muda yang berhasil dibina (kumulatif menuju 100.000), peningkatan omzet usaha, dan penciptaan lapangan kerja baru.

- o **Indikator Dampak:** Kontribusi program terhadap penurunan angka pengangguran terbuka dan pengurangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.
- 4) Mekanisme Tindak Lanjut:
- o **Rekomendasi Perbaikan:** Hasil evaluasi akan dituangkan dalam rekomendasi perbaikan yang bersifat korektif bagi OPD yang mengalami kendala.
 - o **Penyelarasan Program:** Apabila ditemukan adanya tumpang tindih atau ketidaksinkronan program, Tim Monev akan merekomendasikan penyesuaian dan realokasi anggaran.
 - o **Penghargaan dan Sanksi:** Untuk mendorong kinerja, akan diberikan penghargaan kepada OPD dengan kinerja terbaik dan teguran/rencana aksi khusus bagi OPD yang kinerjanya di bawah target.

Dengan mekanisme Monev yang ketat dan transparan ini, diharapkan implementasi RIPJ PID dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu mencapai target strategis 100.000 Sultan Muda Sumsel pada tahun 2029.

8.4 Kesimpulan

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJ PID) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen strategis yang disusun sebagai turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1) Potensi Sumber Daya Alam dan Ekonomi yang Melimpah

Provinsi Sumatera Selatan memiliki kekayaan sumber daya alam dan ekonomi yang sangat besar, yang tercermin dari beragamnya Produk Unggulan Daerah (PUD) di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Komoditas unggulan seperti padi, jagung, kelapa sawit, karet, kopi, aneka ikan, dan kerajinan songket memiliki kontribusi signifikan terhadap

perekonomian daerah. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dioptimalkan karena masih rendahnya nilai tambah, keterbatasan akses pasar, dan minimnya penerapan teknologi dalam rantai nilai produksi.

2) Ekosistem Riset dan Inovasi yang Perlu Diperkuat

Meskipun Provinsi Sumatera Selatan telah meraih predikat sebagai daerah sangat inovatif dengan nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) yang konsisten tinggi, masih terdapat berbagai keterbatasan dalam ekosistem riset dan inovasi. Kemampuan daerah dalam menghasilkan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*) masih rendah, dengan hanya 2 rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dalam 5 tahun terakhir. Jumlah inovasi tata kelola dan pelayanan publik menunjukkan tren penurunan, sementara sinergi dan kolaborasi antar-OPD masih belum optimal. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan infrastruktur riset.

3) Permasalahan Strategis Daerah yang Memerlukan Solusi Inovatif

Identifikasi permasalahan utama daerah mengungkapkan sembilan isu strategis yang saling terkait, meliputi kemiskinan dan stunting, produktivitas pertanian, layanan pendidikan dan kesehatan, pemerataan infrastruktur, mitigasi bencana, daya saing dan investasi, kapasitas fiskal, transformasi ekonomi, serta reformasi birokrasi. Permasalahan-permasalahan ini memerlukan pendekatan penyelesaian yang holistik dan berbasis riset serta inovasi, tidak hanya sekadar pendekatan konvensional.

4) Tema Prioritas 100.000 Sultan Muda Sumsel sebagai Solusi Integratif

Penetapan program "100.000 Sultan Muda Sumsel" sebagai tema prioritas merupakan jawaban strategis atas berbagai permasalahan pembangunan daerah. Program ini secara langsung menyasar permasalahan pengangguran dan kemiskinan melalui penciptaan wirausaha baru, mendorong transformasi ekonomi melalui pengembangan sektor kreatif dan digital, serta meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah. Ruang lingkup program yang mencakup berbagai sektor prioritas dengan dukungan pelatihan, akses permodalan, dan pendampingan menunjukkan pendekatan yang komprehensif.

5) Tantangan dan Peluang yang Jelas Teridentifikasi

Pengembangan ekosistem riset dan inovasi di Provinsi Sumatera Selatan menghadapi berbagai tantangan, seperti mutu kebijakan

yang belum berbasis bukti, penerapan kebijakan yang belum optimal, rendahnya budaya riset, kurangnya sinergi pentahelix, keterbatasan anggaran, dan infrastruktur riset yang belum memadai. Namun demikian, terdapat pula peluang besar yang dapat dimanfaatkan, antara lain arah kebijakan nasional yang mendukung riset dan inovasi, potensi kerja sama lintas lembaga, serta dukungan sumber daya manusia dan infrastruktur yang terus berkembang.

6) Kesenjangan yang Memerlukan Penanganan Prioritas

Analisis kesenjangan mengungkapkan bahwa prioritas tertinggi penanganan adalah penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas OPD, penyusunan regulasi payung berupa Perda/Pergub tentang pengembangan kewirausahaan, dan penyediaan anggaran khusus untuk program 100.000 Sultan Muda. Selain itu, pembangunan basis data terpadu, optimalisasi program inkubasi, dan peningkatan promosi program juga menjadi prioritas strategis yang harus segera direalisasikan.

7) Strategi Penguatan yang Terarah dan Terukur

Strategi yang dirumuskan mencakup penguatan kapasitas kebijakan berbasis bukti melalui 7 (tujuh) strategi utama, serta pengembangan ekosistem riset dan inovasi melalui 5 (lima) strategi untuk pengembangan produk unggulan daerah dan 6 (enam) strategi untuk penyelesaian permasalahan prioritas. Strategi-strategi ini dirancang untuk menjawab kesenjangan yang teridentifikasi dan memperkuat fondasi riset dan inovasi daerah secara berkelanjutan.

8) Peta Jalan yang Komprehensif untuk Mewujudkan Target 2029

Peta jalan yang disusun mencakup rencana aksi dengan 18 kegiatan strategis yang melibatkan berbagai OPD, dilengkapi dengan target tahunan dan sasaran akhir yang jelas. Tahapan strategis berdasarkan enam elemen ekosistem riset dan inovasi memastikan implementasi berjalan secara sinergis, terarah, dan berkelanjutan. Mekanisme monitoring dan evaluasi yang terstruktur memberikan kepastian bahwa program dapat dipantau, dievaluasi, dan diperbaiki secara berkala untuk mencapai target 100.000 Sultan Muda Sumsel pada tahun 2029.

8.5 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut disampaikan beberapa rekomendasi untuk mendukung keberhasilan implementasi RIPJ PID Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029:

1) Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan Pemerintah Daerah

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur, perlu menunjukkan komitmen politik yang kuat dalam mendukung implementasi program 100.000 Sultan Muda Sumsel. Komitmen ini harus diwujudkan melalui penerbitan regulasi payung, pengalokasian anggaran yang memadai, pembentukan tim percepatan yang efektif, serta kepemimpinan yang mendorong kolaborasi lintas OPD dan pemangku kepentingan.

2) Percepatan Penyusunan Regulasi dan Kelembagaan

Sangat mendesak untuk segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda yang menjadi payung hukum bagi program 100.000 Sultan Muda Sumsel. Selain itu, perlu diperkuat kelembagaan BRIDA dan dibentuk satuan tugas khusus yang bertanggung jawab atas koordinasi, implementasi, dan monitoring program secara lintas sektor.

3) Optimalisasi Anggaran dan Sumber Pendanaan

Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus dan berkelanjutan untuk mendukung program 100.000 Sultan Muda Sumsel dalam APBD tahun anggaran mendatang. Selain itu, perlu dijajaki dan dikembangkan skema pendanaan inovatif dari sumber-sumber non-APBD, seperti dana CSR dari BUMN/BUMD/swasta, program kewirausahaan dari perbankan dan lembaga keuangan, serta pendanaan dari pemerintah pusat melalui APBN.

4) Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektor

Diperlukan penguatan mekanisme koordinasi yang efektif antar-OPD melalui forum-forum rutin, sistem informasi terpadu, dan pembagian peran yang jelas. Bappeda dan BRIDA perlu berperan sebagai koordinator utama untuk memastikan seluruh program dan kegiatan di setiap OPD selaras, tidak tumpang tindih, dan saling mendukung untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

5) Pembangunan Basis Data dan Sistem Informasi Terpadu

Sangat penting untuk segera membangun basis data kewirausahaan yang terintegrasi (Single Database) yang menghimpun data dari seluruh OPD terkait. Basis data ini harus digital, akurat, dan terhubung dengan Satu Data Indonesia, serta dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program.

6) Peningkatan Kapasitas SDM dan Penguatan Inkubasi

Program pelatihan dan pendampingan bagi calon wirausaha muda perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Inkubator bisnis yang sudah ada harus direvitalisasi dan diperkuat dengan fasilitas, SDM pengelola, dan program inkubasi yang lebih terstruktur. Pemerintah daerah juga perlu menjalin kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas untuk memperkuat ekosistem pendukung.

7) Penguatan Promosi dan Kampanye Publik

Diperlukan strategi promosi dan kampanye publik yang masif dan kreatif untuk meningkatkan kesadaran dan minat generasi muda terhadap program 100.000 Sultan Muda Sumsel. Pemanfaatan media digital, sosial media, dan saluran komunikasi lainnya harus dioptimalkan untuk menjangkau target sasaran di seluruh kabupaten/kota.

8) Implementasi Monitoring dan Evaluasi yang Berkelanjutan

Mekanisme monitoring dan evaluasi harus segera diimplementasikan secara konsisten sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (triwulanan, semesteran, dan tahunan). Hasil monitoring dan evaluasi harus menjadi dasar bagi perbaikan program secara berkelanjutan, dan harus ada mekanisme penghargaan bagi OPD yang berkinerja baik serta sanksi bagi yang tidak mencapai target.

9) Penyelarasan dengan Kebijakan Nasional dan Perkembangan Global

Program-program riset dan inovasi di Provinsi Sumatera Selatan harus terus diselaraskan dengan kebijakan nasional, termasuk Asta Cita Presiden, RPJMN, dan kebijakan BRIN. Selain itu, perlu dijajaki peluang kerjasama internasional untuk transfer pengetahuan dan teknologi, perluasan akses pasar, serta pengembangan produk berstandar global.

10) Partisipasi Aktif Seluruh Pemangku Kepentingan

Keberhasilan implementasi RIPJ PID membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan masyarakat. Kolaborasi dan sinergi yang kuat akan menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kondusif bagi lahirnya 100.000 Sultan Muda Sumsel yang inovatif, produktif, dan berdaya saing tinggi.

Demikian Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJ PID) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025--2029 ini disusun. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengarahkan pemanfaatan riset dan inovasi untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Dengan komitmen, kolaborasi, dan kerja keras bersama, cita-cita mewujudkan Sumatera Selatan yang maju, inklusif, dan berkelanjutan melalui penguatan IPTEK dan kewirausahaan pemuda dapat terwujud pada tahun 2029 dan seterusnya.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU